



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3.Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2002 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 15 Seri C – 1);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 - 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

7. Rencana

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat.

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3.....

Pasal 3

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas-asas keterbukaan, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan, demokratis dan berkelanjutan.

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Visi Kepala Daerah adalah "DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT, DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh) ";
- b. Misi Kepala Daerah adalah :
 - a) mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya;
 - b) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang profesional dan religius (*Good Governance and Clean Government*); dan
 - c) mewujudkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya.

Program Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III : VISI DAN MISI KEPALA DAERAH;
- BAB IV : STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; dan
- BAB V : PENUTUP.

Pasal 6

Isi dan uraian RPJM Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd

MOKH. MUSLIKH
ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA
SUKABUMI,

cap.ttd

MOHAMAD MURAZ
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 8

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 Ayat 3 Bahwa Kepala daerah terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Presiden.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri.

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 dan merupakan RPJMD II yang arah pembangunannya dititik beratkan pada pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam MDGs yang diharapkan tercapai pada tahun 2013. Secara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi tahun 2008-2013 adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) kelembagaan dan organisasi perangkat daerah, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota.

Dalam upaya melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, yaitu munculnya beberapa issue strategis yang diantaranya adalah :

1. Pemanasan Global (*Global Warming*),
2. Tingginya Harga Bahan Bakar Minyak,
3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran,
4. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan,
5. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
6. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan,
7. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang
8. Masih Rendahnya Kinerja Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
9. Masih Rendahnya Investasi,

Pemerintah Kota Sukabumi akan berusaha mengembangkan potensi dan meminimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan mencapai kinerja pembangunan 2008-2013.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi,
2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Sukabumi,
3. Sasaran-Sasaran Strategis Yang Ingin Dicapai Selama 5 (lima) Tahun Kedepan Yang Diejawantahkan Dalam Program Pembangunan Dan Rencana Kerja,

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah : Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan kota Sukabumi.

Mengakomodasi janji-janji politik kepala daerah terpilih sehingga dapat merealisasikannya dalam rencana pembangunan selama periode kepemimpinannya.

Menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk menentukan arah pembangunan Kota Sukabumi di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Kegunaan dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai :

Petunjuk SKPD dalam menyusun rencana kerjanya;

Pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu 2008-2013;

Melanjutkan RPJMD tahap 1 (Renstra Kota Tahun 2003 – 2008) dengan memperbaiki kekurangan, arah mencapai tujuan dalam RPJMD Tahun 2008 – 2013;

Potret diri RPJMD Tahap 1 untuk melangkah pada tahap berikutnya dalam rangka mencapai tujuan akhir (RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025).

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden RI Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025; Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Serie E,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002-2011;
Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025;
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 No. 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi No. 12.

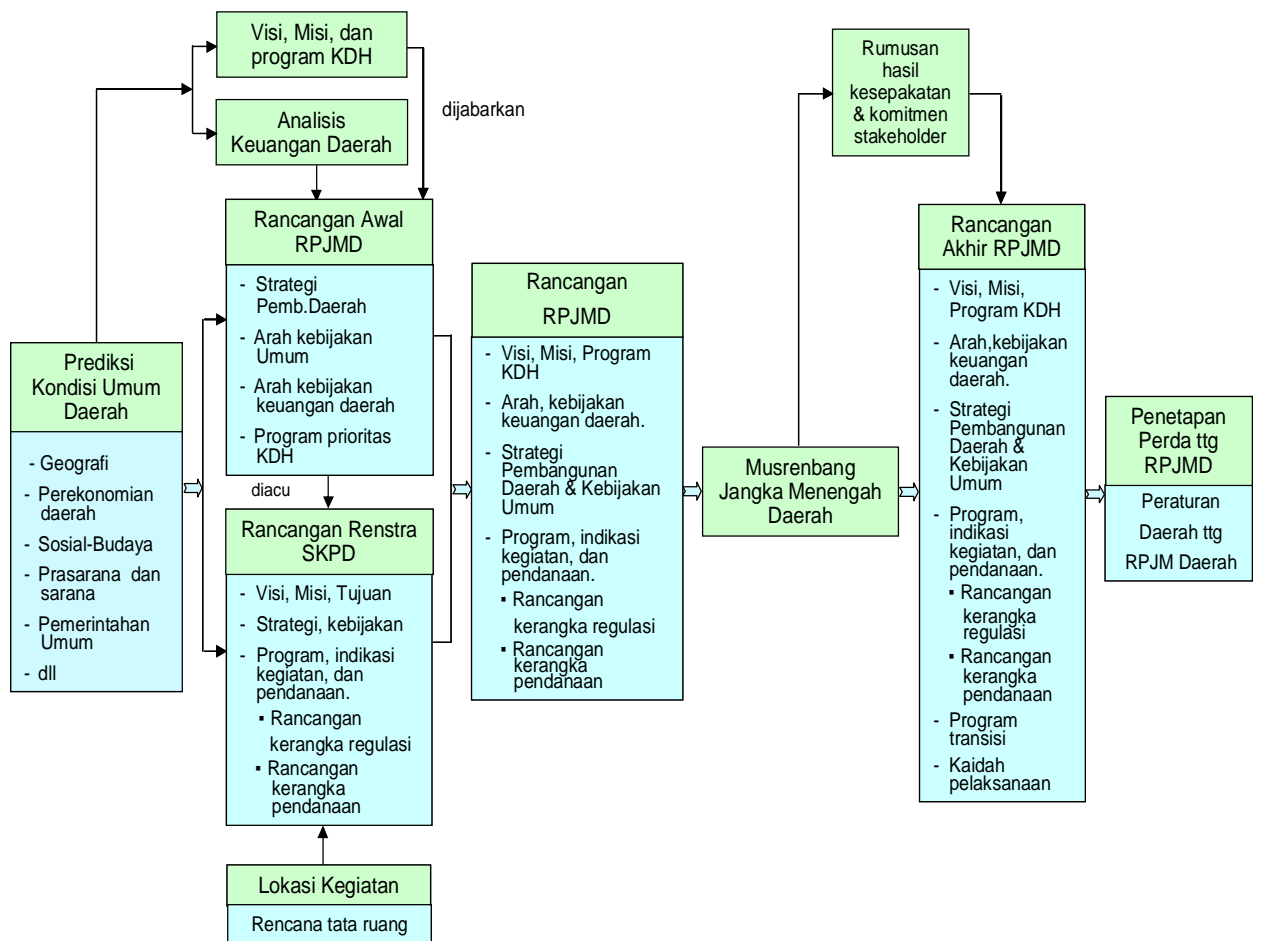
1.4. Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 maupun RTRW Kota Sukabumi Tahun 2002-2011, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Sukabumi, yang dari keberadaan RKPD Kota Sukabumi tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya, dalam kaitan dengan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 kedalam RKPD Kota Sukabumi untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi. Gambaran tentang Proses Tata Cara Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 serta hubungan antara RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar -1.1.

Gambar 1.1.

Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi



1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, maksud dan tujuan, landasan hukum, kerangka berpikir penyusunan RPJMD Kota Sukabumi 2008-2013 serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini diuraikan kondisi umum daerah dari tahun 2003 – 2006 baik kondisi geografis, kondisi perekonomian daerah, kondisi sosial budaya daerah, kondisi penataan ruang dan sarana prasarana daerah serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondisi pemerintahan umum, issue strategis, scenario serta kondisi yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan 2013.

BAB III VISI DAN MISI

Menguraikan tentang visi, misi walikota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, dan agenda pembangunan tahun 2008-2013.

BAB IV STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan baik aspek perekonomian, aspek agama, sosial dan budaya, aspek penataan ruang, sarana dan prasarana serta

sumberdaya alam dan lingkungan hidup, aspek pemerintahan umum, arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pembiayaan daerah. Selain itu diuraikan pula program prioritas dan program-program pembangunan beserta sasaran program dan pagu indikatifnya serta indikasi kegiatan 2008-2013.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi program transisi tahun 2014 untuk mengisi masa transisi pada masa berakhirnya tahun perencanaan 2013, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 serta penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan eksport-import. Namun demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyurut dikarenakan kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja, Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang memiliki areal 1.215 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1995 Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha, sehingga ada penambahan desa-desa dan kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibeureum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi)

Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)

Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya ini, merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi untuk mengembangkan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (*hinterland*).

Sesuai dengan kondisi obyektif yang terus berkembang, pertumbuhan kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hal inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi kedepan keberadaan Kota Sukabumi " **Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa** " yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi

No.7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025; Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 No. 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi No. 12. Visi kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP yang terdiri dari komponen peningkatan kemampuan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Letak Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik koordinat 106° 45' 50" BT dan 106° 45' 10" Bujur Timur, 6° 50' 44" Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan 0° – 3° dan 3° – 8° di bagian utara. Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Hal ini juga membuka kesempatan kepada Kota Sukabumi untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan berkualitas dibidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan visi Kota Sukabumi dengan didukung oleh tenaga profesional, kelengkapan sarana dan prasarana perekonomian, jasa pendidikan dan kesehatan berskala pelayanan regional.

2.1.2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 7,5 Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 346 Rukun Warga (RW) dan 1.453 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah paling banyak dipergunakan untuk Pertanian yaitu seluas 2.316 Ha dan yang paling kecil adalah penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 300 Ha. Kecamatan Lembursitu merupakan Kecamatan paling luas yaitu 8,89 Km² atau sebesar 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Citamiang dengan Luas 4,04 Km². Adapun Luas masing- masing Kecamatan Di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi & Luas Wilayah Se Kota Sukabumi Tahun 2007

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah RT	Jumlah RW	Kepadatan (Jiwa / Km ²)
1	Cikole	Selabatu	0.97	57	9	9.090,7
		Gunung Parang	0.64	35	9	9.135,9
		Kebonjati	0.48	55	10	18.385,4
		Cikole	0.79	36	7	6.922,8
		Cisarua	2.00	74	19	6.547
		Subang Jaya	2.20	67	14	5.188,2
2	Citamiang	Cikondang	0.65	39	9	12.235,4
		Gedong Panjang	1.00	28	6	6.839
		Nanggaleng	1.20	62	13	10.979,2
		Citamiang	0.73	39	7	10.323,3
		Tipar	0.46	49	8	19.043,5
3	Gunung Puyuh	Gunung Puyuh	0.94	43	12	7.392,6
		Karamat	1.11	37	9	6350,4

		Sriwidari Karang Tengah	0.95 2.50	57 67	14 16	10.136,8 5.018,4
4	Warudoyong	Warudoyong Nyomplong Benteng Dayeuh Luhur Sukakarya	0.43 0.52 1.28 2.33 3.04	32 48 55 69 47	5 9 9 21 13	13.546,5 13.519,2 7.841,4 5.399,6 3.756,9
5	Baros	Sudajaya Hilir Jaya mekar Jaya Raksa Baros	1.29 1.59 1.45 1.79	25 32 27 60	8 7 7 18	3.820,2 2.363,5 3.671,7 6.777,1
6	Cibeureum	Sindang Palay Limusnunggal Babakan Cibeureum Hilir	1.65 2.63 2.65 1.84	21 39 29 44	5 12 8 10	2.781,2 2.852,9 1.931,7 4.941,8
7	Lembursitu	Lembursitu Situmekar Cipanengah Cikundul Sindangsari	3.22 1.54 1.53 1.58 1.02	67 30 31 32 20	21 8 8 9 6	2.910,9 3.025,9 3.909,8 3.370,9 4.799
	Jumlah	33	48.00	1.453	346	5.489,1

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

2.1.3. Topografi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan

a. Topografi

Secara topografi Kota Sukabumi merupakan dataran Tinggi, yang menurut penggunaannya yaitu tanah yang digunakan untuk lahan pertanian sebesar 2.316 Ha (48,25%) dari seluruh wilayah dan sisanya seluas 2.384 Ha (51,75%) adalah lahan kering. Fenomena yang terjadi di daerah perkotaan adanya perubahan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain, akibat banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan dan industri yang berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian, khususnya sawah.

b. Klimatologi

Suhu udara Kota Sukabumi berkisar antara 15° C - 20° C sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi tahun 2006 terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan 483,5 mm (26 hari hujan, rata-rata curah hujan 17,4 mm) sedangkan terendah pada bulan Agustus dengan curah hujan 2 mm (2hari hujan, rata-rata hujan 1 mm). Sukabumi mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan Kering). Lahan Bukan Sawah (Lahan Kering) sendiri dibedakan atas lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, Kolam/tebat/empang dan lahan lain-lain, penggunaan lahan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Luas Tanah Per Kecamatan menurut Penggunaannya
Di Kota Sukabumi Tahun 2007

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Lain-Lain (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Baros	352	218	41	611
2	Citamiang	154	217	33	404
3	Warudoyong	415	296	49	760
4	Gunung Puyuh	202	324	24	550
5	Cikole	177	484	47	708
6	Lembursitu	450	392	48	890
7	Cibeureum	566	253	58	877
	Jumlah	2.316	2.184	300	4.800

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

2.2. Kondisi Perekonomian Daerah

2.2.1. Kondisi Makro Ekonomi

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan kinerja perekonomian Kota Sukabumi, digunakan indikator Makro yang biasa digunakan untuk menilai kinerja perekonomian. Indikator Makro tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan juga kinerja sektor perekonomian.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan positif, Pada tahun 2002 LPE sebesar 5,34 % dan Pada Tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 6,23% setelah pada Tahun 2005 tumbuh menjadi 5,95%. Kondisi tersebut belum menggambarkan adanya percepatan pembangunan perekonomian di Kota Sukabumi, meskipun terdapat kenaikan pertumbuhan namun pergeserannya relatif tidak terlalu besar, selain itu jika melihat target LPE yang ditetapkan dalam Renstra 2003-2008 Pada Tahun 2006 sebesar 6,30% menunjukkan gap sebesar 0,07 % sehingga tingkat capaian baru mencapai 98.88 %.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi 2000 - 2007

No	Tahun	LPE (%)		r
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	4.82		
2	2001	5.08		5.12%
3	2002	5.34		4.87%
4	2003	5.39		0.93%
5	2004	5.77	5.70	6.59%
6	2005	5.95	6.00	9.41%
7	2006	6.23	6.30	7.38%
8	2007	6.64	6.50	10.39%

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

b. Struktur Perekonomian Kota Sukabumi

Struktur perekonomian Kota Sukabumi dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor terhadap PDRB, Secara Umum Peranan sektoral Perekonomian Kota Sukabumi (2003 - 2006) rata-rata didominasi oleh sektor tersier (54,37%), kemudian diikuti oleh sektor sekunder (45,44 %) dan terakhir sektor primer (0,19 %). Besarnya peranan sektor tersier tersebut disumbang oleh (i) sektor perdagangan hotel restoran (34,76 %), (ii) sektor angkutan dan komunikasi (8,98 %), (iii) sektor perbankan dan lembaga keuangan (6,17 %), dan (iv) sektor jasa-jasa (4,46 %).

Tabel 2.4.

Distribusi Persentase PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku dan Konstan Tahun 2002-2006

No	Lapangan Usaha	2002		2003		2004		2005		2006	
		B	K	B	K	B	K	B	K	B	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6,15	5,82	5,65	5,46	5,72	5,62	5,12	4,83	4,96	4,53
2	Pertambangan dan Penggalaian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	4,38	4,63	4,41	4,69	4,56	4,90	4,66	5,04	4,90	5,31
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,23	1,08	1,28	1,09	1,28	1,12	1,29	1,22	1,22	1,20
5	Bangunan	5,73	6,15	6,61	6,51	6,15	6,07	5,74	6,25	5,52	6,25
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	44,91	42,98	41,95	42,89	41,17	42,73	42,93	42,34	42,69	42,45
7	Pengangkutan dan Komunikasi	14,69	16,14	14,43	15,85	14,25	16,00	14,89	16,11	15,83	16,44
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,42	8,09	10,54	8,78	11,83	9,24	11,38	9,82	10,43	9,43
9	Jasa-Jasa	15,48	15,10	15,30	14,71	15,02	14,31	13,97	14,38	14,44	14,37

B = Atas Dasar Harga Berlaku ; K = Atas Dasar Harga Konstan
 Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

Apabila dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan rata-rata 10.49%, 9.55% dan 8.64%. Sektor-sektor tersebut merupakan potensi unggul untuk dikembangkan pada masa-masa yang akan datang.

Tabel 2.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sukabumi Tahun 2004 - 2007

SEKTOR	2004	2005	2006	2007
a.Pertanian	8.74	-8.88	-0.42	3.35
b.Pertambangan & Penggalian	1.82	2.17	-0.76	-6.5
a.Industri Pengolahan	10.40	9.15	11.93	9.77
b.Listrik, Gas & Air Bersih	8.75	14.65	5.24	14.68
c.Bangunan	- 1.37	9.16	6.16	5.04
a.Perdagangan, Hotel & restoran	5.38	4.99	6.51	6.97
b.Pengangkutan & Komunikasi	6.76	6.65	8.45	8.24
c.Keuangan, Jasa Perusahaan & Persewaan	11.30	12.61	2.01	0.59
d.Jasa-jasa	2.88	6.43	6.17	6.81
PDRB KOTA SUKABUMI	5.77	5.95	6.23	6.64

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

Dari data tersebut dapat dilihat pertumbuhan per sektornya, sektor Industri Pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu rata-rata sebesar 10,49% diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih rata-rata sebesar 9,55% serta sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan rata-rata sebesar 8,64%. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan negatif adalah sektor pertanian, peternakan dan kehutanan yaitu rata-rata sebesar -0,19%. Dengan demikian sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan, dan sektor listrik, gas dan air bersih berpotensi untuk lebih dikembangkan pada masa-masa yang akan datang, sedangkan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan membutuhkan perhatian yang khusus untuk diberdayakan.

c. Daya Saing Sektor

Keterbatasan dana investasi yang dimiliki suatu daerah dalam pengembangan wilayahnya menyebabkan perlunya upaya alokasi dana investasi yang efektif terhadap sektor-sektor yang akan memberikan dampak yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor-sektor ekonomi disuatu wilayah dapat dibagi ke dalam sektor Basis yaitu sektor yang mampu menjual produknya ke luar wilayah dan sektor Non Basis yaitu sektor yang produknya hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal. *Sektor Non Basis*, karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, maka permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan wilayah setempat sehingga tidak dapat berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sedangkan Sektor Basis adalah sektor yang tidak hanya dapat memenuhi permintaan lokal akan tetapi juga dapat memenuhi permintaan yang berasal dari luar wilayah, sehingga pertumbuhan sektor ini dapat melebihi pertumbuhan alamiah wilayahnya.

Perkembangan sektor basis selain meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, sehingga sektor basis dapat juga disebut sebagai sektor yang menjadi *mesin penggerak* pertumbuhan suatu wilayah dan juga disebut *sektor unggulan*. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang ada di suatu wilayah ada beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode *Location Quotient* (LQ), dilakukan melalui penghitungan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor dalam suatu wilayah dengan kemampuan sektor yang sama di wilayah yang lebih luasnya, dimana wilayah yang pertama merupakan bagiannya.

Tabel 2.6.
Daya Saing Sektor PDRB Kota Sukabumi Terhadap Jawa Barat
Tahun 2003 - 2006

No	Lapangan Usaha	LQ	
		2003	2006
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan		
	Perkebunan dan Perikanan	0.42	0.42
	a. Tanaman Bahan Makanan	0.22	0.24
	b. Tanaman Perkebunan	0.01	0
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.62	1.46
	d. Kehutanan	0	0
	e. Perikanan	0.19	0.2
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0
	a. Minyak dan Gas Bumi	0	0
	b. Pertambangan Tanpa Gas	0	0
	c. Penggalian	0.05	0.05
3	Industri Pengolahan	0.1	0.11
	a. Industri Migas	0	0
	b. Industri Tanpa Migas	0.1	0.11
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.55	0.54
	a. Listrik	0.45	0.45
	b. Gas	0	0
	c. Air Bersih	2.72	2.83
5	Bangunan/ Kontruksi	2.42	2.15
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.43	2.39
	a. Perdagangan besar dan eceran	2.71	2.65
	b. Hotel	0.85	0.82
	c. Restoran	1.17	1.19
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.78	3.64
	a. Pengangkutan	4.33	4.32
	1. Angkutan Rel	0.05	0.03
	2. Angkutan Jalan Raya	4.6	4.64
	3. Angkutan Laut	0	0
	4. Angkutan Sungai dan Penyebrangan	0	0
	5. Angkutan Udara	0	0
	6. Jasa Penunjang Angkutan	9.44	9.29
	b. Komunikasi	2.2	1.95
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.76	2.98
	a. Bank dan lembaga keuangan selain bank	2.85	3.42
	b. Lembaga keuangan tanpa bank	6.52	6.74
	c. Sewa Bangunan	1.58	1.6
	d. Jasa Perusahaan	4.28	4.61
9	Jasa-jasa	1.88	1.64
	a. Pemerintahan Umum	1.91	1.62
	b. Swasta	1.83	1.68
	1. Sosial Kemasyarakatan	4.75	4.22
	2. Hiburan Rekreasi dan Jasa Perusahaan	4.43	3.78
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	1.17	1.1

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Dari hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi Kota Sukabumi yang mempunyai daya saing di Jawa Barat pada tahun 2003-2006 adalah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor air bersih, sub sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dilihat lebih spesifik pada setiap sub sektor, pada sub sektor perdagangan, hotel, restoran, sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran Kota Sukabumi mempunyai daya saing di tingkat Jawa Barat, hanya sektor hotel saja yang tidak mempunyai daya saing. Di sektor pengangkutan dan komunikasi, sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi Kota Sukabumi mempunyai daya saing di tingkat wilayah Jawa Barat. Di sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan semua

sub sektor, yaitu sub sektor bank dan lembaga keuangan selain bank, sub sektor lembaga keuangan tanpa bank, sub sektor sewa bangunan dan jasa perusahaan mempunyai daya saing di tingkat Jawa Barat.

d. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita atau PDRB Perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh Penduduk Kota Sukabumi pada setiap tahunnya. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2001 mencapai Rp. 4.907.558,80 sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp. 10.433.877,85 mengalami kenaikan setelah pada Tahun 2005 mencapai Rp. 8.662.800,22. Apabila melihat target yang ditentukan pada tahun 2006 dalam Renstra 2003-2008 telah melebihi target dengan tingkat capaian 139,22%. PDRB per Kapita Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, namun demikian hal ini tidak seluruhnya mencerminkan adanya kenaikan daya beli masyarakat dalam periode waktu tersebut karena dalam kenaikan PDRB tersebut masih terkandung faktor kenaikan harga (inflasi).

e. Daya Beli

Purchasing Power (kemampuan daya beli masyarakat) sebagai komponen indeks daya beli yang mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Selama Periode Tahun 2001 – 2006 kemampuan daya beli penduduk Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang relatif kecil namun trendnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2001 kemampuan daya beli penduduk Kota Sukabumi sebesar Rp. 549.540,- per jiwa per bulan dan pada Tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp. 562.060,- per jiwa per bulan dan tahun 2007 mencapai Rp. 565.520. Namun jika melihat target yang ditetapkan dalam Renstra 2003-2008 Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 590.650,- per jiwa per bulan menunjukkan adanya *gap* sebesar Rp. 28.590,- per jiwa per bulan dengan tingkat capaian sebesar Rp. 95,20%. Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena apabila pertumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun, selain itu Laju Inflasi juga menjadi salah satu penghambat Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.7.

Perkembangan Daya Beli Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2000-2007

NO	TAHUN	Daya Beli (Rp. ribu)		Pertumbuhan (%)
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	502.960		
2	2001	549.540		8.48%
3	2002	549.890		0.06%
4	2003	550.340		0.08%
5	2004	554.570	569.70	0.76%
6	2005	558.030	580.09	1.38%
7	2006	562.060	590.65	1.33%
8	2007	565.520	601.39	1.32%
	Rata - Rata	549.11		1.68%

Sumber : Buku IPM Kota Sukabumi Tahun 2007

f. Inflasi

Inflasi Kota Sukabumi Pada Tahun 2000 adalah 6,34% dan cenderung mengalami fluktuasi dengan rata-rata inflasi 10,36%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Sukabumi, LPE Kota Sukabumi cenderung mengalami pertumbuhan rata-rata 5,39% per tahun. Pada Tahun 2005 inflasi meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 19,71% yang dipicu oleh regulasi kenaikan Bahan Bakar Minyak yang mencapai 132%, dan pada tahun 2006 kembali turun menjadi 12,22% dan tahun 2007 mencapai 4.34%.

Tabel 2.8.
Perkembangan Inflasi Kota Sukabumi
Tahun 2002 – 2007

Tahun	LPE (%)	INFLASI (%)
2000	4.82	6.34
2001	5.08	10.57
2002	5.34	8.71
2003	5.39	9.52
2004	5.77	7.30
2005	5.93	19.71
2006	6.23	12.22
2007	6.64	4.34
Rata - Rata	5.65	9.84

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2007

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Sukabumi dari Tahun 2001 – 2005 berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami peningkatan pemerataan yang ditunjukkan oleh menurunnya angka *gini ratio* pada Tahun 2001 sebesar 0,165% dan Tahun 2007 menjadi 0,2%. Hal ini dapat dikatakan pemerataan pendapatan di Kota Sukabumi relatif merata, karena berada pada kisaran 0,2%.

g. Kondisi Sektor-Sektor Perekonomian

Sektor Pertanian

Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering), lahan kering sendiri dibedakan atas lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, kolam/empang dan lahan lain-lain. Menurut penggunaannya, tanah untuk lahan sawah sebesar 2.316,746 Ha (48,26%) dari seluruh wilayah dan sisanya seluas 2.483,485 Ha (51,74 %) adalah lahan kering.

Dari sekitar 2.316,746 Ha lahan pertanian, menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti padi sawah, palawija, hortikultura, sayur-sayuran, tanaman hias serta tanaman obat. Berdasarkan data dalam Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007, Luas panen bersih padi tahun 2006 seluas 4.050 Ha mencapai 22.578,85 ton dibandingkan dengan luas panen padi tahun 2005 yang mencapai 4.018 Ha yang mencapai 21.670 ton atau meningkat sebesar 4,2%.

Dari hasil produksi pertanian di Kota Sukabumi khususnya gabah masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi. Kebutuhan terhadap beras sekitar 31.654,71 ton pada tahun 2006, sedangkan produksi sekitar 22.578,85 ton sehingga terdapat kekurangan sebesar 9.075,86 ton. Kekurangan tersebut disuplai dari Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Karawang. Dari kondisi tersebut di Kota

Sukabumi tidak ada lumbung pangan di tingkat petani, tetapi ada di tingkat huler (penggilingan). Pemerintah daerah pada prinsipnya tidak menyediakan *buffer stock* secara khusus, tetapi stock beras dilaksanakan oleh BULOG wilayah Sukabumi dan Cianjur.

Pada tahun 2006 populasi ternak sapi tercatat 630 ekor sapi, kerbau 131 ekor dan domba sebanyak 7.232 ekor. Jumlah ternak yang masuk ke Kota Sukabumi mencapai 48.738 ekor yang terdiri dari 5.917 ekor sapi, 10.207 ekor kerbau, 32.614 ekor kambing/domba. Jumlah ternak yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Sukabumi adalah sebanyak 16.724 ekor yang terdiri dari 5.467 ekor sapi, 2.782 ekor kerbau dan 8.475 ekor kambing/domba. Untuk menunjang kegiatannya, pada sektor pertanian terdapat 4 (empat) koperasi, yaitu koperasi sapi potong, domba, hortikultura dan koperasi padi.

Sektor Industri Pengolahan

Pada tahun 2006 jumlah perusahaan industri besar sebanyak 8 perusahaan dan industri sedang sebanyak 16 perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.302 orang pekerja. Selain itu kelompok industri yang menghasilkan barang-barang logam, mesin dan peralatannya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.534 orang pekerja, yang diikuti oleh industri tekstil, pakaian jadi dan kulit dengan tenaga kerja sebanyak 1.335 orang. Dengan melihat laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang cukup signifikan dan kondisi penyerapan tenaga kerjanya memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 – 2013 sektor industri pengolahan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja, namun demikian dukungan regulasi dan kemudahan berusaha harus lebih dioptimalkan.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pelayanan listrik di wilayah Kota Sukabumi dikelola oleh PT. PLN APJ Sukabumi, umumnya diperuntukkan bagi kegiatan perumahan. Saat ini sesuai dengan tingkat perkembangan kota 95% bagian kota mendapatkan pelayanan listrik. Pemakaian listrik tidak terbatas hanya pada kebutuhan rumah saja, tetapi juga untuk industri, kegiatan perkantoran dan komersil. Listrik merupakan salah satu fasilitas penerangan yang cenderung bertambah menjadi kebutuhan pokok penduduk. Kebutuhan listrik akan terus bertambah, terutama di kawasan perkotaan. Pada Tahun 2005, daya terpasang mencapai 84.895.215 VA, produksi listrik yang terjual 130.654.263 kwh dengan jumlah pelanggan mencapai 79.959 yang terdiri dari 73.188 pelanggan rumah tangga, 4.177 pelanggan usaha, 2.436 pelanggan publik dan 158 pelanggan industri. Seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan dan daya yang terjual, pendapatan PT. PLN APJ Sukabumi pada Tahun 2005 juga mengalami kenaikan sebesar 16.84% dari Rp. 68,3 milyar pada Tahun 2004 menjadi Rp. 79.8 milyar pada Tahun 2005. Pada tahun 2006, daya terpasang listrik di Kota Sukabumi mencapai 64.435.900 VA dengan produksi listrik yang terjual sebanyak 130.654.263 KwH dengan jumlah pelanggan mencapai 53.792 pelanggan yang terdiri dari 48.411 pelanggan rumah tangga, 3.604 pelanggan usaha, 1.688 pelanggan publik dan 89 pelanggan industri. Namun demikian pada tahun 2006 baik daya terpasang maupun pelanggan mengalami penurunan.

Tabel 2.9.
Perkembangan Daya Terpasang Dan Produksi Listrik Yang Terjual
Tahun 2001 – 2006

TAHUN	Daya Terpasang (VA)	TERJUAL (Kwh)	Pendapatan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)	Rugi/Laba (Rp.000)
2001	54.222.200	98.156.677	30.514.726	32.045.860	(1.531.134)
2002	60.730.725	91.849.167	42.661.599	47.728.045	(5.066.446)
2003	63.387.875	101.754.398	58.500.619	56.985.969	1.514.650
2004	65.927.625	111.707.580	68.297.000	*)	
2005	84.895.215	130.654.263	79.801.505		
2006	65.435.900				

Sumber : PT PLN Cabang Sukabumi

*) tidak ada data

Tabel 2.10.
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik
Di wilayah Kota Sukabumi Tahun 2001 – 2006

TAHUN	Rumah Tangga (R1 – R4)	Usaha (S1 – S4)	Industri (I1 – I4)	Publik (Rp.000)
2001	43.086	3.130	103	1.651
2002	51.188	3.240	101	1.684
2003	52.692	3.389	101	1.717
2004	53.812	3.496	96	1.773
2005	73.188	4.177	158	2.436
2006	48.411	3.604	89	1.688

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, BPS Tahun 2007

Pelayanan kelistrikan bagi kegiatan perekonomian Kota Sukabumi, merupakan salah satu bagian beban biaya yang cukup tinggi dimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek harga, pihak pemerintah Kota Sukabumi tidak bisa banyak campur tangan karena energi listrik dan pelayanan listrik mempunyai kebijakan yang lingkupnya nasional. Prasarana Air Minum merupakan prasarana yang tidak kalah pentingnya, sejalan dengan perkembangan penduduk, maka kebutuhan akan air bersih pun menjadi semakin meningkat dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya permintaan akan air bersih. Volume air minum yang disalurkan pada Tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 12,1% yaitu dari 4.650.912 m³ pada Tahun 2005 menjadi 4.147.704 m³. Sementara itu dari 22.345 pelanggan PDAM Kota Sukabumi pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sebanyak 21.883 pelanggan, pelanggan terbanyak adalah dari kategori pelanggan non niaga sebanyak 20.334 pelanggan (93,25%), sedangkan jumlah pelanggan terkecil adalah kategori pelanggan industri, yaitu hanya sebanyak 15 pelanggan.

Untuk air minum, meskipun dari data tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami penurunan jumlah pelanggan dan berarti adanya peralihan dari penggunaan air bersih/minum yang berasal dari PDAM ke penggunaan sumber air lainnya seperti sumur bor atau sumur gali dan lain-lain yang secara lingkungan dapat mempengaruhi kondisi air bawah tanah Kota Sukabumi. Selain itu karena kondisi sumber air baku Kota Sukabumi banyak yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi dan kondisi volume airnya cenderung menurun, menuntut kita untuk melakukan kerjasama yang lebih intensif dan saling menguntungkan dengan Kabupaten Sukabumi.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan seperti halnya di wilayah-wilayah perkotaan lainnya, memberikan kontribusi terbesar pada Produk Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi yaitu sebesar 43,59 % pada tahun 2006. Dari data Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007 tercatat perusahaan yang memiliki SIUP mengalami peningkatan sebesar 6,01% yaitu dari 3.505 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 3.729 perusahaan pada tahun 2006. Dari jumlah tersebut terdiri dari 69 perusahaan besar, 175 perusahaan menengah dan 3.485 perusahaan kecil.

Untuk perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengalami penurunan sebesar 4,33% yaitu dari 208 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 199 perusahaan pada tahun 2006, dari jumlah tersebut 26 berbentuk badan usaha PT, 3 berbentuk koperasi, 61 berbentuk perusahaan CV dan 133 berbentuk PO.

Sektor Pengangkutan, Komunikasi dan Pariwisata

Pelayanan transportasi umum masyarakat Kota Sukabumi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan angkutan umum dalam kota dan angkutan umum luar kota (antar kota). Angkutan umum dalam kota yang pada tahun 2006 telah berjumlah 1.539 armada atau naik sebesar 8 unit dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebanyak 1.531 armada, angkutan umum dalam kota ini melayani 28 trayek.

Untuk angkutan umum luar kota pada tahun 2006 berjumlah 347 buah bus, jumlah penumpang yang diberangkatkan melalui terminal bus Kota Sukabumi pada tahun 2005 adalah sebanyak 1.082.766 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1.055.617 orang ke daerah-daerah di wilayah Jabodetabek dan 27.149 orang ke wilayah Jawa Tengah. Jumlah tersebut dilayani dengan melalui 165.532 kali pemberangkatan atau rata-rata sebanyak 453.510 pemberangkatan per hari. Kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2006 yaitu sebanyak 916.210 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 891.531 orang ke daerah-daerah di wilayah Jabodetabek dan 24.679 orang ke wilayah Jawa Tengah. Jumlah tersebut dilayani dengan melalui 157.526 kali pemberangkatan atau rata-rata sebanyak 431.580 pemberangkatan per hari. Sedangkan angkutan barang dilayani oleh kendaraan angkut truk yang pada tahun 2006 berjumlah 771 buah truk.

Selain angkutan umum pergerakan orang di Kota Sukabumi dilakukan dengan kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Dari data dalam Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007 di Kota Sukabumi perkembangan jumlah dan jenis kendaraan pribadi di Kota Sukabumi mengalami peningkatan yaitu sebanyak 2.801 unit pada tahun 2003 menjadi sebanyak 6.584 unit pada tahun 2006. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11.
Perkembangan Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Baru di Polresta Sukabumi
Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2003 – 2006

No	Jenis Kendaraan	2003	2004	2005	2006
1	Sedan	25	24	14	13
2	Jeep	21	13	8	9
3	Otolet	95	83	63	22
4	Station Wagon/Mini bus	224	235	304	208
5	Mobil Ambulance	3	1	0	0
6	Bus/Microbus/L-300	60	20	19	31
7	Truck	120	131	} 292	} 155
8	Pick Up	127	177		
9	Tanki + Gandengan	15	5		
10	Pemadam Kebakaran	2	0	} 6798	} 6146
11	Box	26	17		
12	Sepeda Motor	2080	3058		
13	Scooter / Vespa	3	4		
	Jumlah	2801	3768	7498	6584

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007

Dari data terlihat bahwa kendaraan roda dua tumbuh secara signifikan, kondisi ini dipicu oleh kemudahan fasilitas kredit memperoleh kendaraan roda dua.

Untuk sektor telekomunikasi saat ini pemakaian fasilitas telepon sudah dirasakan cukup baik. Fasilitas telepon sebagian besar sudah bukan lagi masuk ke kawasan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi, tetapi sudah masuk ke kawasan-kawasan permukiman. Tingkat pelayanan jaringan kabel telepon di Kota Sukabumi (berdasarkan data dari Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007) sudah mencapai 44.575 pelanggan dengan perincian golongan Bisnis sebanyak 2.747 pelanggan, golongan Perumahan sebanyak 29.553 pelanggan, dan Flexi sebanyak 12.275 pelanggan dengan cakupan wilayahnya sebagian besar di bagian Utara Kota Sukabumi, terutama di wilayah Cikole, Citamiang sebagai wilayah inti Kota Sukabumi.

Sektor pariwisata di Kota Sukabumi pada hakekatnya hanya memiliki obyek wisata yang jumlah relatif sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi hanya memiliki 2 obyek wisata, 56 restoran dan rumah makan, 4 kolam renang serta beberapa usaha pariwisata lainnya yang meliputi bilyard, golf, karaoke dan ketangkasan, namun demikian sebagai kota pusat pelayanan, Kota Sukabumi berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya seperti hotel, restoran dan lain sebagainya. Perkembangan sektor pariwisata di Kota Sukabumi diperlihatkan dengan aktifitas perhotelan yang ditandai oleh jumlah perusahaan akomodasi dan jumlah tamu yang menginap. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan akomodasi di Kota Sukabumi berjumlah 34 perusahaan dengan jumlah kamar 646 kamar dan 937 tempat tidur.

Sementara itu jumlah tamu yang menginap pada tahun 2006 adalah sebanyak 88.618 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 221 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 88.397 orang. Jumlah tamu tersebut menurun sebesar 1,01% jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang jumlahnya mencapai 89.521 orang.

Sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan

Industri perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana memegang peranan penting dan sentral dalam perekonomian suatu

daerah. Oleh karena itu peranan perbankan sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Kota Sukabumi. Berdasarkan data Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007, pada tahun 2006 tercatat 36 kantor bank yang terdiri dari Bank Pemerintah 9 buah, Bank Swasta Nasional sebanyak 24 buah, dan Bank Pembangunan Daerah sebanyak 3 buah. Besarnya simpanan dana pihak ketiga yang ada di bank-bank Kota Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 24,75% dari Rp. 1.433 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 1.788 milyar pada tahun 2006.

Kegiatan perekonomian di Kota Sukabumi juga didukung dengan adanya berbagai jenis koperasi. Menurut jenisnya koperasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu koperasi menurut lembaga dinas, koperasi menurut usaha komoditi dominan dan koperasi lainnya. Banyaknya koperasi aktif di Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2006 mencapai 323 buah dengan jumlah anggota mencapai 27.359 orang dari 323 koperasi 139 diantaranya dalam kondisi sehat dan jumlah modal sendiri sebesar Rp 17.682.102.000,- modal luar sebesar Rp 20.923.931.000,- dan aset sebesar Rp 38.973.117.000,-.

Selain Koperasi Ekonomi Mikro juga dipengaruhi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Sukabumi. Tahun 2006 tercatat ada 1.667 Industri yang berskala Kecil dan 22 Industri yang berskala Menengah dengan daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar yaitu sebanyak 10.079 orang dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. UMKM juga menyerap tenaga kerja perempuan yang relatif besar terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha jasa perdagangan, kerajinan, dan jasa boga. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, di antaranya adalah rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar, dan rendahnya daya saing. Apabila dilihat dari kredit yang dikucurkan oleh perbankan umum untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun 2003 – 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.

Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Kota Sukabumi, Tahun 2003 - 2007 (Juta Rp.)

PLAFOND KREDIT	2003	2004	2005	2006	2007
Mikro (s/d Rp. 50 juta)	156,711	205,711	394,478	290,418	290,418
Kecil (>Rp. 50 juta - Rp. 500 juta)	86,561	145,505	199,055	200,154	200,154
Menengah (>Rp. 500 juta - Rp. 5 miliar)	55,356	81,724	122,212	162,584	162,584

Sumber : Annual Report Bank Indonesia, 2007

Dari data terlihat bahwa kredit yang dikucurkan pada UMKM cenderung mengalami peningkatan dengan porsi yang terbesar disalurkan pada usaha mikro dan kecil, dengan demikian geliat usaha UMKM ini dapat lebih dikembangkan pada 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Misi ke – 3.

2.2.2. Kondisi Investasi

Perkembangan investasi di Kota Sukabumi, secara akumulatif sejak tahun 2002 hingga tahun 2006 ditunjukkan oleh angka persetujuan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Sukabumi yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13.

Akumulasi Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kota Sukabumi (Tahun 2002 –2006)

Tahun	PMDN Non Govt'	Investasi Per Tahun (Rp)	rata-rata pertumbuhan	PMA	Investasi Per Tahun (Rp)	rata-rata pertumbuhan	TOTAL REALISASI INVESTASI
	Akumulasi Nilai Investasi (Rp)			Nilai Investasi (Rp)			
2002	67,163,661,807.00			2,200,000,000.00			69,363,661,807.00
2003	115,091,312,754.00	47,927,650,947.00	-40.14%	2,200,000,000.00	-	0%	117,291,312,754.00
2004	157,254,974,561.00	42,163,661,807.00	-13.67%	2,200,000,000.00	-	0%	159,454,974,561.00
2005	233,498,289,640.00	76,243,315,079.00	44.70%	2,200,000,000.00	-	0%	235,698,289,640.00
2006	293,527,727,566.00	60,029,437,926.00	-27.01%	2,700,000,000.00	500,000,000.00	19%	296,227,727,566.00
RATA-RATA		56,591,016,439.75	-9.03%	2,325,000,000.00	125,000,000.00	5%	202,168,076,130.25

Sumber : Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal, Tahun 2007, diolah

Perkembangan investasi sebagaimana digambarkan diatas, terlihat masih didominasi oleh penanam modal dalam negeri non pemerintah, sedangkan apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhannya menunjukkan angka negatif, hal ini menunjukkan adanya aliran investasi yang justru ke luar dari Kota Sukabumi, kondisi ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya dalam upaya untuk senantiasa menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi yang dalam kaitan ini merupakan elemen yang cukup penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan-peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya, sudah tidak dapat ditawar – tawar lagi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kota Sukabumi.

Tabel 2.14.

Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Kota Sukabumi, Jenis Valuta, Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi Berdasarkan Bank Pelapor Provinsi Jawa Barat (Juta Rp.)

KOTA SUKABUMI	2003	2004	2005	2006	2007
A. Menurut Jenis Penggunaan					
1.Modal Kerja	129,668	197,155	289,421	351,541	411,438
2.Investasi	18,287	46,224	36,632	40,768	77,631
3.Konsumsi	159,767	253,089	473,426	398,749	430,446
B. Menurut Sektor Ekonomi					
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	11,672	26,613	22,083	30,871	33,722
2. Pertambangan Dan Penggalian	570	1,731	4,243	2,923	2,518
3. Industri Pengolahan	21,360	45,680	64,858	91,798	145,418
4. Perdagangan, Hotel dan Restoran	91,230	140,502	200,058	227,578	238,297
5. J a s a - j a s a	23,117	26,767	32,932	39,139	68,944
a. Listrik, Gas Dan Air Bersih	83	44	-	1	-
b. B a n g u n a n	2,497	2,013	3,002	6,700	3,497
c. Pengangkutan dan Komunikasi	1,511	1,387	1,949	3,327	1,414
d. Jasa Dunia Usaha	16,430	21,101	22,340	25,879	37,493
e. Jasa Sosial Masyarakat	2,596	2,222	5,641	3,232	26,540
6. Lain-Lain	159,774	253,175	475,304	398,749	430,615

Sumber : Annual Report Bank Indonesia, 2007

Dengan berkurangnya investasi yang dikucurkan akan mengakibatkan rendahnya kinerja ekonomi kota, meskipun modal kerja yang dikucurkan relatif stabil akan tetapi belum dapat menambah pendapatan masyarakat secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada pengeluaran pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder bukan didapat dari adanya penambahan kegiatan ekonomi akan tetapi berasal dari pinjaman salah satunya dari penggunaan kredit untuk konsumsi, hal ini memperlihatkan adanya gejala pola hidup yang masih konsumtif dalam masyarakat Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam menyikapi kondisi masyarakat tersebut diatas perlu adanya program/kegiatan yang sinergi sehingga dapat menyatukan pandangan-pandangan, saling membahu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi Kota Sukabumi dengan demikian pergerakan ekonomi masyarakat tumbuh sejalan dengan berkurangnya posisi kredit konsumsi masyarakat dan diharapkan kondisi tersebut dapat terus meningkat agar dapat lebih menggairahkan perkembangan ekonomi kerakyatan Kota Sukabumi.

2.2.3. Kondisi Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya sangat terkait erat dengan kemampuan keuangan/pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun dalam pengalokasian anggaran untuk kelangsungan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut.

a. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, dituntut untuk lebih berperan kontribusinya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, karena di sisi lain sumber penerimaan dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah tidak dapat diketahui secara pasti proporsi penerimaan untuk daerah. Oleh karena itu, kreativitas Pemerintah Daerah dalam menggali potensi PAD harus terus ditingkatkan. Target Anggaran Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 196.334.976.000,- (2003) menjadi Rp. 431.441.505.000,- (2007), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 2,19 %, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.15.
Target Anggaran Pendapatan Kota Sukabumi
Tahun 2003 – 2007 (Rp. 000)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran Pendapatan				
		2003	2004	2005	2006	2007
I	Pendapatan asli Daerah					
	Pajak Daerah	2,343,588.00	2,988,691.00	3,462,252.00	3,462,252.00	4,578,843.00
	Retribusi Daerah	17,304,563.75	20,223,274.00	24,226,484.00	33,609,405.00	37,702,382.00
	Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah	397,031.00	432,534.00	622,648.00	990,634.00	888,955.00
	Lain-Lain PAD yang sah	3,406,682.25	2,441,369.00	2,154,007.00	1,464,174.00	849,664.00
	Jumlah I	23,451,865.00	26,085,868.00	30,465,391.00	39,526,465.00	44,019,844.00
II	Dana Perimbangan					
	Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	20,715,655.00	11,079,988.00	12,771,400.00	34,094,287.00	26,768,302.00
	Dana alokasi umum	124,630,000.00	126,824,000.00	134,188,000.00	216,741,000.00	285,095,000.00
	Dana alokasi khusus	6,100,000.00	5,500,000.00	7,290,000.00	1,727,000.00	21,715,000.00
	Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi	-	8,991,419.00	8,991,419.00	9,005,419.00	-
	Jumlah II	151,445,655.00	152,395,407.00	163,240,819.00	261,567,706.00	333,578,302.00
III	Lain-Lain Pendapatan yang sah					
	Bantuan dana kontingensi / penyeimbang dari pemerintah	12,428,609.00	17,353,700.00	18,613,510.00	15,239,500.00	16,485,825.00
	Bantuan dari Provinsi	9,008,847.00	7,853,978.00	5,870,000.00	-	37,357,534.00
	Penerimaan dari Pusat	-	-	-	-	-
	Jumlah III	21,437,456.00	25,207,678.00	24,483,510.00	15,239,500.00	53,843,359.00
	Jumlah I - III	196,334,976.00	203,688,953.00	218,189,720.00	316,333,671.00	431,441,505.00

Sumber : Laporan dari Dipenda Kota Sukabumi dan Bagian Keuangan Setda Kota Sukabumi, 2007

Sebagaimana terlihat dari tabel diatas bahwa Anggaran Pendapatan Kota Sukabumi dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, meskipun ada beberapa pos pendapatan yang mengalami penurunan anggaran, hal ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada pos Pajak Daerah dari anggaran sebesar Rp. 2.343.588.000,- Pada tahun 2003 menjadi Rp. 4.578.843.000,- Pada Tahun 2007 atau mengalami perkembangan (*trend*) anggaran mencapai 195,37 %. Pos retribusi daerah pada Tahun 2003 dianggarkan Rp. 17.304.563.754,41 anggarannya meningkat menjadi Rp. 37.702.382.000,- atau berkembang sebesar Rp. 217,88 % pada Tahun 2007, dari pos hasil perusahaan milik daerah / pengelolaan kekayaan daerah dari anggaran sebesar Rp. 397.031.000,- pada Tahun 2003 menjadi Rp. 888.955.000,- pada Tahun 2007 atau mengalami perkembangan (*trend*) anggaran mencapai 223,90 % sedangkan pada pos lain PAD yang sah mengalami penurunan anggaran pada Tahun 2003 sebesar Rp. 3.406.682.245,- menjadi Rp. 849.664.000,- Pada Tahun 2007 penurunan anggaran tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan rekening yang menyebabkan terbaginya alokasi dana yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah ke rekening yang lain sesuai dengan perkembangan peraturan Standar Akutansi Pemerintah. Namun demikian realisasi dari penganggaran pendapatan selama periode 2003-2007 secara umum dapat terealisasi melebihi anggaran.

Secara signifikan, realisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun realisasinya jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kota Sukabumi dari tahun ke tahunnya. Perkembangan tersebut untuk lebih jelasnya diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16.

**Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Sukabumi
Tahun 2003 – 2007 (dalam Milyard)**

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran Pendapatan				
		2003	2004	2005	2006	2007
I	Pendapatan asli Daerah					
	Pajak Daerah	2,690,215,684.44	3,290,217,768.84	3,786,646,091.00	4,196,430,000.00	4,797,712,840.00
	Retribusi Daerah	19,275,147,718.56	20,677,219,655.00	29,209,444,123.00	35,641,724,983.00	39,713,886,730.00
	Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah	491,730,479.33	432,535,100.00	622,647,248.00	990,634,844.00	1,151,018,090.00
	Lain-Lain PAD yang sah	3,316,730,021.59	2,589,842,054.93	2,958,885,876.00	2,567,325,620.00	5,375,596,654.00
	Jumlah I	25,773,823,903.92	26,989,814,578.77	36,577,623,338.00	43,396,115,447.00	51,038,214,314.00
II	Dana Perimbangan					
	Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan	23,020,647,999.00	15,141,444,890.00	17,467,329,461.00	39,558,851,814.00	25,149,236,099.00
	Dana alokasi umum	124,629,999,996.00	126,824,000,000.00	134,188,000,000.00	216,741,000,000.00	285,095,000,000.00
	Dana alokasi khusus	6,100,000,000.00	5,500,000,000.00	7,290,000,000.00	17,270,000,000.00	21,655,400,000.00
	Bagi hasil Bukan Pajak	-	11,498,442,003.00	9,008,522,503.00	10,874,279,737.00	-
	Bantuan keuangan Provinsi	-	-	23,548,540,071.00	-	-
	Jumlah II	153,750,647,995.00	158,963,886,893.00	191,502,392,035.00	284,444,131,551.00	331,899,636,099.00
III	Lain-Lain Pendapatan yang sah					
	Bantuan dana kontingensi / penyeimbang dari pemerintah	-	-	5,868,000,000.00	-	-
	Bantuan dari Provinsi	13,808,762,241.00	17,607,745,982.00	-	15,239,500,000.00	46,817,584,855.00
	Penerimaan dari Pusat	8,693,954,600.00	7,898,621,001.00	-	-	-
	Jumlah III	22,502,716,841.00	25,506,366,983.00	5,868,000,000.00	15,239,500,000.00	46,817,584,855.00
	Jumlah I - III	202,027,188,739.92	211,460,068,454.77	233,948,015,373.00	343,079,746,998.00	429,755,435,268.00

Sumber : Laporan dari Dipenda Kota Sukabumi dan Bagian Keuangan Setda Kota Sukabumi, 2007

Mengingat keterbatasan kemampuan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan keuangan daerah Kota Sukabumi besar ketergantungannya terhadap kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan partisipasi masyarakat dan swasta. Oleh sebab itu Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Sukabumi.

Melihat alokasi selama lima tahun terakhir Dana Perimbangan untuk Kota Sukabumi mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar 9% - 10%. Di lain pihak apabila melihat kondisi kecilnya penerimaan keuangan dari PAD maka diharapkan peningkatan dari dana perimbangan ini akan terus meningkat walaupun dihadapkan pada tantangan yang cukup berat yaitu perkembangan naiknya harga BBM di pasar dunia.

Dari tabel tersebut di atas dalam 5 tahun terakhir perkembangan Dana Lain-lain yang Sah mengalami fluktuasi dengan tingkat rata-rata setiap tahunnya sebesar 7% - 9.5% dan kontribusi rata-rata dari dana lain-lain yang sah setiap tahunnya terhadap APBD Kota Sukabumi baru menyumbangkan sebesar 8.05%. Apabila melihat kontribusi penerimaan Dana Lain-lain yang Sah terhadap APBD relatif kecil namun untuk Kota Sukabumi cukup berarti.

b. Kondisi Belanja

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana belanja dikelompokkan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Namun pada Tahun 2007 ini belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung terletak pada keterkaitan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Perkembangan alokasi belanja Kota Sukabumi pada Tahun 2002 - 2006 seperti nampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002-2006

Tahun	Aparatur Daerah	r (%)	Pelayanan Publik	r (%)
2002	26.831.282.000,00	-	93.714.271.000,00	
2003	46.355.569.000,00	72,77	165.233.305.000,00	76,32
2004	44.742.831.000,00	(3,48)	177.023.429.000,00	7,14
2005	44.529.630.000,00	0,48	188.020.785.000,00	6,21
2006	68.441.273.000,00	53,69	252.816.225.000,00	34,46
Rata-rata per Tahun		30,87		31,03
Tahun	Belanja Tdk Lngsng		Belanja Langsung	
2007	218.883.566.000,00		222.976.347.000,00	

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi (diolah) tahun 2007

Dari Tabel tersebut di atas, dalam 5 tahun terakhir perkembangan Belanja Aparatur Daerah berfluktuasi dengan tingkat rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 30,87%. Sedangkan perkembangan Belanja Pelayanan Publik meningkat setiap tahunnya dengan tingkat rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 31,03%. Untuk tahun 2007 diperkirakan besarnya Belanja Aparatur Daerah mencapai Rp. 72.849.000.000,00 dan Belanja Publik sebesar Rp. 267.996.619.573,00 dengan rasio antara Belanja Aparatur dan Publik adalah sebesar 21,4% dan 78,6%. (angka belum di konversi pada belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai Permendagri 13/2006 yang telah disempurnakan melalui Permendagri 59/2007). Sedangkan untuk Belanja Langsung untuk tahun 2007 mencapai Rp. 222.976.347.000,- dan Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 218.883.566.000,-.

c. Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2003-2006 APBD Kota Sukabumi mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. Rata-rata pertumbuhan pertahun untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar 3,50%. Sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan rata-rata pertahun mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan sebesar 99,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18.

Perkembangan Pembiayaan Kota Sukabumi Tahun 2002-2007

Tahun	Penerimaan	r (%)	Pengeluaran	r (%)
2002	14.268.378.367,92	-	5.219.500.000,00	
2003	24.270.997.533,30	70,10	8.392.123.533,30	60,78
2004	19.527.307.000,00	(19,54)	1.450.000.000,00	(82,72)

2005	15.360.695.000,00	(21,34)	1.000.000.000,00	(31,03)
2006	13.019.619.000,00	(15,24)	5.500.000.000,00	450
2007	22.615.206.000,00	73,70	9.283.558.000,00	68,79
Rata-rata per Tahun		3,50		(99,26)

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi (diolah) Tahun 2006

Kebijakan strategis dalam pembiayaan untuk Tahun 2007 menambah dana cadangan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di biayai dalam satu tahun anggaran, seperti rencana pembangunan gedung DPRD (selain melalui lelang *Voor Finaceering*) dan persiapan untuk biaya pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2008.

2.2.4. Aspek Ketenaga Kerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Oleh karenanya setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Tidak seimbangannya antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja menjadi penyebab terjadinya masalah ketenagakerjaan yaitu pengangguran, akibatnya banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan sebagai bekerja, sedangkan yang tidak atau belum terserap oleh pasar kerja tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan digolongkan sebagai penganggur (terbuka). Kondisi ketenaga kerjaan di Kota Sukabumi dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.19.
Kondisi Ketenaga Kerjaan di Kota Sukabumi

No	Uraian	2005		2006	
		%	Jumlah	%	Jumlah
1	Jumlah Penduduk		263,964		274,436
2	Angkatan Kerja	48.47	127,943.35	49.2	135,022.51
	Bekerja	37.71	99,540.82	37.64	103,297.71
	Mencari Pekerjaan	10.76	28,402.53	11.56	31,724.80
3	Bukan Angkatan Kerja	51.53	136,020.65	50.8	139,413.49
	Sekolah	18.11	47,803.88	20.42	56,039.83
	Mengurus Rumah Tangga	27.22	71,851.00	24.19	66,386.07
	Lain-Lain	6.20	16,365.77	6.19	16,987.59
4	Tingkat Partisipasi Angk Kerja	48.47		49.20	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	22.92		23.49	

Sumber : Inkesra Kota Sukabumi Tahun 2006

Dilihat dari komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Tingkat Kesejahteraan Pendidikan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Petani	12.719	12.563	12.495	12.597	12.653
	2. Pegawai Negeri	8.254	12.838	8.568	8.628	8.846
	3. Pegawai Swasta	13.897	14.447	14.669	14.807	16.456

Kota Sukabumi	Tingkat Kesejahteraan Pendidikan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	4. TNI Angkatan Darat	400	406	402	498	495
	5. TNI Angkatan Laut	42	46	66	72	67
	6. TNI Angkatan Udara	9	12	12	8	8
	7. Polri	627	649	725	824	863
	8. Pensiunan	3.662	3.737	3.845	3.743	3.964
	9. Pedagang/Wiraswasta	25.252	25.870	32.568	25.447	27.740
	10. Buruh	24.132	23.710	23.715	23.544	22.935
	11. Buruh Kasar	14.974	15.662	15.786	15.150	18.995
	12. Pelajar/Mahasiswa	54.258	56.117	57.652	58.178	62.538
	13. Pengangguran/IRT/dll	80.011	80.543	81.384	84.536	95.783
	Jumlah	238.237	246.600	25.1887	248.032	271.343

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Terlihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan buruh mendominasi jumlah penduduk yang bekerja, namun demikian dilihat dari angka pengangguran, Ibu Rumah Tangga masih relatif tinggi.

Angka pengangguran di Kota Sukabumi masih relatif tinggi, hal ini terlihat dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2003 sebesar 22,89% dan tahun 2006 sebesar 23,49%. Apabila melihat persentase pengangguran di atas menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kota Sukabumi yang ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang terus meningkat namun kondisi tersebut belum mempunyai dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21.
Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor di Kota Sukabumi Tahun 2000 – 2006

No	Kecamatan	Lapangan Usaha										Jumlah
		Pertanian	Pertamban- ngan & Penggalian	Industri	Listrik, Gas & Air	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan & Komunikasi	Keuangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	2000	3.43	0.45	11.86	0.15	6.49	43.83	7.85	0.91	25.03	-	100.00
2	2001	5.44	0.21	13.24	0.21	9.66	37.30	9.98	1.26	22.69	-	100.00
3	2002	8.55	0.39	14.27	-	10.90	30.46	11.52	0.39	23.52	-	100.00
4	2003	6.02	0.19	13.28	0.58	10.44	40.46	10.97	1.16	16.90	-	100.00
5	2004	7.12	0.28	8.54	0.67	9.08	39.61	12.62	2.66	19.43	-	100.00
6	2005	7.15	0.23	8.57	0.67	9.12	39.64	12.67	2.67	19.51	-	100.00
7	2006	7.57	0.70	11.86	0.29	6.25	41.73	11.38	2.33	18.43	0.16	100.00

Sumber : Masterplan Ketenagaa Kerjaan Kota Sukabumi 2004 – 2009, diolah

Dari data terlihat bahwa tenaga kerja di Kota Sukabumi banyak diserap oleh sektor-sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant, Jasa-Jasa, Industri Pengolahan serta sektor angkutan dan telekomunikasi. Ada beberapa alasan mengapa Pertumbuhan LPE yang positif belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada, yaitu :

Perekonomian Kota Sukabumi masih berada pada sektor tersier yang penyerapan tenaga kerjanya relatif tidak sebesar sektor primer dan sektor sekunder,

Kondisi ini juga dipengaruhi diantaranya oleh aspek pendidikan. Melihat jenjang pendidikan sampai dengan Tahun 2006, penduduk

Kota Sukabumi yang telah tamat SD sederajat mencapai 78.32 %, SLTP sederajat sebesar 46,12 %, SMU/SMA sebesar 47,41 %, dan Perguruan Tinggi sebesar 9.43% serta tidak/belum pernah sekolah sebesar 2.48%. Apabila dilihat keterkaitan (*Link and Match*) antara pendidikan dan tenaga kerja terlihat bahwa penduduk usia kerja di Kota Sukabumi yang berijazah SD sederajat memiliki persentase tertinggi, idealnya penduduk usia kerja Perguruan Tinggi memiliki persentase tertinggi dan yang berijazah SD sederajat memiliki persentase terendah, kondisi ini akan menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Selain itu selama kurun waktu 2000 – 2006 sektor industri dan jasa-jasa yang dapat menyerap tenaga kerja besar rata-rata pertumbuhannya hanya berkisar 1,46%.

Apabila dilihat dari Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Sukabumi selama kurun waktu tahun 2000 – 2006, menunjukkan angka capaian yang berfluktuasi dengan rata-rata mencapai 39.94 % untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22.
Perkembangan TPAK di Kota Sukabumi Tahun 2000 – 2006

NO	TAHUN	TPAK (%)		Pertumbuhan (%)
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	44.64		
2	2001	43.04		-3.72%
3	2002	49.62		13.26%
4	2003	44.85		-10.64%
5	2004	48.98	42.64	8.43%
6	2005	48.47	44.77	-1.05%
7	2006	45.50	47.00	-6.53%
Rata - Rata		39.94		-0.04%

Sumber : Masterplan Ketenagaa Kerjaan Kota Sukabumi 2004 – 2009, diolah

2.3. Kondisi Sosial Budaya Daerah

Sebagai salah satu Kota yang terletak diantara pusat pertumbuhan mega urban Jabodetabek dan Bandung Raya, Kota Sukabumi secara fisik dan ekonomi memang telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, tetapi yang menjadi masalah pertumbuhan kota yang ekspansif itu ternyata belum diimbangi dengan tingkat perkembangan bidang sosial budaya yang memadai seperti aspek kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat. Untuk menakar sejauh mana kemajuan program pembangunan bidang sosial budaya di Kota Sukabumi setidaknya harus berkaca pada dua hal :

Sejauhmana Kota Sukabumi mampu menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduknya, khususnya bagi penduduk miskin kota,

Sejauhmana kebijakan dan kemajuan Kota Sukabumi dapat bersejajaran dengan kepentingan upaya mengembangkan kualitas pembangunan manusia. Sebuah kota yang tumbuh besar secara fisik dan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.1. Kondisi Kependudukan

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Sukabumi pada pertengahan Tahun 2007 tercatat sebanyak 280.143 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Sukabumi selama periode Tahun 2004-2006 yang mengalami peningkatan pada Tahun 2004 mencapai 3,72% dan Tahun 2005 sebesar 2,44% dan pada akhir Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Sukabumi diperkirakan mencapai 317.696 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2013 diperkirakan sebesar 2,27%. Kondisi ini harus diimbangi dengan penyediaan sandang, pangan dan infrastruktur kota yang memadai.

Tabel 2.23.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2004 – 2006

NO	TAHUN	LPP (%)		
		LPP	LPP Alami	LPP Migrasi
1	2004	3.72%	2.19%	1.53%
2	2005	3.23%	1.99%	1.24%
3	2006	2.44%	1.84%	0.60%
Rata - Rata		3.13%	2.01%	1.12%

Sumber : Inkesra, 2006

b. Kepadatan Dan Sebaran Penduduk

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh dan Warudoyong memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Untuk Kecamatan Cikole kepadatan rata-rata sebesar $\pm 7.557,5$ orang/km², $\pm 6.577,1$ orang/km², \pm orang 6.170,3/km². Kecamatan-kecamatan tersebut berlokasi di pusat kota lama. Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah adalah Kecamatan Citamiang yaitu $\pm 1.095,6$ orang/km² dan Kecamatan Cibeureum yaitu $\pm 2.999,3$ orang/km², yang merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah hasil perluasan. Dengan demikian di masa yang akan datang adalah bagaimana distribusi kepadatan penduduk dapat merata di seluruh wilayah.

c. Struktur Penduduk Dan Angka Beban Tanggungan

Struktur penduduk Kota Sukabumi menggambarkan komposisi penduduk produktif dan non produktif sehingga dapat diketahui beban tanggungannya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur di Kota Sukabumi Tahun 2006 – 2007

Golongan Umur	Tahun	
	2005	2006
0 - 14	26,39	28,30
15 - 64	68,30	65,98
65+	5,31	5,73
Dependency Ratio	46,42	51,57

Sumber : Inkesra, 2006

Komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan terjadi pergeseran menjadi bertambahnya komposisi struktur umur produktif. Tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah menciptakan penduduk yang seimbang dalam rangka menciptakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah usia non produktif. Angka beban tanggungan menunjukkan seberapa jauh mereka yang berusia produktif (15–64) harus menanggung mereka yang belum/tidak produktif (0–14) dan pasca produktif (65+). Pada tahun 2005 Angka Beban Tanggungan ini mencapai 46,42 dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 51,57, kondisi ini memperlihatkan bahwa beban usia produktif menjadi semakin berat. Dengan kondisi tersebut Kota Sukabumi harus dapat memberdayakan generasi muda menjadi generasi yang siap dan maju untuk membangun Kota Sukabumi sebagai kota pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Selain itu harus ada upaya menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing, dan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perubahan pola persebaran penduduk diperluas ke wilayah Baros, Cibeureum dan Lembursitu serta di wilayah-wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi. Pengendalian jumlah penduduk juga memiliki peranan yang sangat penting, dilihat dari perkembangannya keberhasilan program Keluarga Berencana KB di Kota Sukabumi dilihat dari persentase pencapaian akseptor KB baru terhadap target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2006 telah mencapai 156,91%.

e. Mobilitas Penduduk

Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) serta diukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Secara ekonomi hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian masuknya para migran juga harus diimbangi oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu dari aspek kesehatan, dengan adanya para migran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Untuk lebih jelasnya data mobilitas penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Migrasi Penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2000 – 2005

Tahun	Penduduk				
	Lahir	Mati	Datang	Pindah	Perubahan
2000	1,027	1,094	0	0	-67
2001	438	400	0	0	38
2002	896	869	4,022	1,837	2,212
2003	1,012	878	723	1,473	-616
2004	1,121	823	1,028	1,219	107
2005	1,307	1,083	2,162	2,270	116

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

Dari tabel terlihat bahwa penambahan penduduk di Kota Sukabumi juga secara signifikan dipengaruhi oleh arus migrasi.

2.3.2. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Kota Sukabumi adalah beragama Islam, pada tahun 2003 penduduk yang beragama Islam tercatat sebanyak 236.450 jiwa atau sekitar 94,79 persen dari 249.192 penduduk. Sedangkan selebihnya menganut agama Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu. Karena itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi jumlah tempat peribadatan yang ada, yakni masih didominasi oleh tempat peribadatan umat Islam.

Pembangunan bidang keagamaan di Kota Sukabumi pada dasarnya adalah dalam upaya memfasilitasi peningkatan kualitas kerukunan sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kehidupan beragama dan aktifitas keagamaan diantaranya berupa penyelenggaraan MTQ dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota dan keikutsertaan dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat, selain itu untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Sukabumi dilaksanakan melalui himbuan untuk sholat subuh berjama'ah antara warga masyarakat dan aparaturnya di lingkungan Kota Sukabumi, komunikasi antar sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah.

2.3.3. Aspek Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Aspek pendidikan sebagai salah satu komponen IPM yaitu dengan melihat rerata dari variable Angka melek Huruf (AMH) yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun keatas bersekolah. Pada tahun 2001 - 2006 indeks pendidikan trendnya semakin meningkat, hal ini mencerminkan adanya keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Namun Ancaman lain yang diperkirakan akan muncul sebagai penghambat adalah biaya pendidikan yang semakin mahal. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kota Sukabumi selama periode Tahun 2000-2007 mengalami peningkatan, Kondisi Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi dalam kurun waktu Tahun 2000 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26.

Kecenderungan Angka Melek Huruf Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2007

NO	TAHUN	Angka Melek Huruf		Pertumbuhan (%)
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	98.04		
2	2001	98.26		22.39%
3	2002	98.60		34.48%
4	2003	98.90		30.33%
5	2004	99.03	99.04	13.13%
6	2005	99.06	100.00	3.03%
7	2006	99.08	100.00	2.02%
8	2007	99.27	100.00	19.14%
Rata - Rata		98.78		15.57%

Sumber : Buku IPM Kota Sukabumi Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2000 Angka Melek Huruf menunjukkan angka 98,04% dan berdasarkan data dari BPS pada Tahun 2006 telah mencapai sebesar 99,08%. Namun jika melihat target AMH yang ditetapkan dalam Renstra 2003-2008 (100%) berarti masih tersisa masyarakat yang belum melek huruf sebesar 0,92%. Untuk itu, berbagai kebijakan program pendidikan non formal kejar Paket A dan B tetap digulirkan dalam rangka peningkatan kemampuan baca masyarakat yang merupakan pintu utama dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat.

b. Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi selama periode Tahun 2000-2006 mengalami peningkatan secara signifikan sesuai dengan target yang diharapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008. Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2000 menunjukkan RLS sebesar 8,20 tahun dan tahun 2007 sebesar 9,34 tahun. Jika dikaitkan dengan target pendidikan pada Tahun 2005 Kota Sukabumi telah mencapai wajar dikdas 9 Tahun dan mulai Tahun 2006 Kota Sukabumi mencanangkan rintisan pendidikan wajib belajar 12 Tahun. Keberhasilan pembangunan dari variable RLS melalui upaya-upaya program kegiatan peningkatan indeks pendidikan berhasil dengan baik dan akan terus digunakan untuk menerapkan target pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.27.

Kecenderungan Rata-rata Lama Sekolah Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2007

NO	TAHUN	Rata-Rata Lama Sekolah		Pertumbuhan (%)
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	8.20		
2	2001	7.93		-3.40%
3	2002	8.40		5.60%
4	2003	8.70		3.45%
5	2004	8.92	8.40	2.47%
6	2005	9.15	9.00	2.51%
7	2006	9.30	9.10	4.09%
8	2007	9.34	9.20	2.03%
	Rata - Rata	8.73		2.45%

Sumber : Buku IPM Kota Sukabumi Tahun 2006

Berhasilnya pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan atau Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro Kota Sukabumi dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Data pencapaian APM pada Tahun 2006 dapat digambarkan sebagai berikut : pencapaian APM tingkat SD/ sederajat sebesar 97.05%. APM tingkat SMP/ sederajat sebesar 82.92%, dan APM tingkat SMU/ sederajat adalah sebesar 58.46%. Sedangkan untuk Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan penduduk seluruh umur yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap kelompok umur tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. Data indikator pencapaian APK diseluruh jenjang sekolah yang ada di Kota Sukabumi pada Tahun 2006, yaitu : pencapaian APK tingkat SD/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 105.85%. APK tingkat SMP/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 100.90 %. APK tingkat SMU/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 98.51 %.

Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang berpihak kepada pembangunan pendidikan sebagaimana telah dicerminkan dari visi dan misi yang hendak diwujudkan tentunya mengandung konsekuensi logis untuk diikuti dengan keberpihakan dalam anggaran. Pengalokasian anggaran pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi cenderung naik dari tahun ke tahun sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.28.

**Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007**

Perbandingan Alokasi	Tahun				
	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)
APBD Kota Smi	212,650,878,000.00	221,766,260,000.00	232,550,415,000.00	346,198,165,000.00	457,857,848,000.00
Ang. Pendidikan	51,280,798,171.00	57,584,377,280.00	63,168,100,583.00	74,859,608,787.00	124,632,966,000.00
Persentase	24,12 %	25,97 %	27,16 %	21,62 %	27,22 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 2007.

Sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan, strategi maupun program kegiatan akan sangat tergantung kepada kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia, dukungan pembiayaan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Penataan sumber daya manusia (tenaga kependidikan) khususnya tenaga guru meliputi 2 (dua) aspek, yaitu dari aspek mutu yang menyangkut kualifikasi dan kompetensi serta aspek jumlah seiring dengan kebutuhan di lapangan yang diarahkan kepada terpenuhinya rasio seimbang dengan jumlah siswa. Adapun jumlah Perkembangan Jumlah Tenaga Guru di Kota Sukabumi Tahun 2003-2007 dapat dilihat Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29.

**Perkembangan Jumlah Tenaga Guru di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007**

Jenjang	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
TK	59	59	59	59	91
SD	850	995	995	1015	1101
SMP	424	412	412	446	470
SMA	229	219	212	247	261
SMK	225	205	205	231	231
SLB	32	32	32	32	32
Jumlah	1.819	1.922	1.912	2.030	2.186

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 2007.

Sedangkan Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Guru di Kota Sukabumi Tahun 2003-2007 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.30.

**Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Guru di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007**

Kualifikasi Pendidikan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
SLTA	134	134	134	134	177
D-I	26	26	26	26	33
D-II	446	580	580	575	610

D-III	90	87	87	90	99
S-1	1084	1056	1056	1166	1228
S-2	39	39	39	39	39
Jumlah	1.819	1.922	1.912	2.030	2.186

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 2007.

a. Kondisi Perpustakaan

Yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan masyarakat yang cerdas adalah melalui upaya peningkatan minat baca masyarakat, keberhasilan upaya ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam. Dari data Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007, jumlah pengunjung perpustakaan padatahun 2005 adalah sebanyak 64.792 orang dengan buku yang dipinjam sebanyak 39.047 buah, meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak 98.465 orang pengunjung dengan 35.028 buah buku.

b. Kondisi Pendidikan Non Formal

Kondisi pendidikan non formal di Kota Sukabumi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan Kota Sukabumi sampai dengan tahun 2007 dilayani oleh :

1. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang berjumlah 19 PKBM dengan jumlah warga belajar sebanyak 870 orang, 417 laki-laki dan 453 perempuan,
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang melayani 21.254 orang anak usia 0 – 6 tahun yang belajar di 2.497 TK, 1.639 RA, 696 PAUD NF sedangkan jumlah anak yang belum terlayani berjumlah 16.422 orang anak,
3. Pendidikan Kesetaraan Paket A (3 lembaga, 60 warga belajar, 6 tutor), Paket B (16 lembaga, 947 warga belajar, 111 tutor) dan Paket C (8 lembaga, 729 warga belajar, 79 tutor),
4. Pendidikan Kesetaraan Fungsional (KF) dengan jumlah penduduk yang belajar sebanyak 157.696 orang,
5. Pendidikan Kursus dengan 12 jenis kursus.

2.3.4. Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan ditandai dengan pencapaian indikator kesehatan diantaranya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB), namun demikian untuk menunjang pencapaian indikator-indikator tersebut harus ditunjang oleh kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sukabumi mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlihat dari data Tahun 2003 telah mencapai 71,24 Tahun, dan Tahun 2006 menurut data dari BPS nilai AHH adalah 71,8 Tahun. Apabila melihat target Tahun 2006 yang tertuang dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008, AHH Kota Sukabumi telah tercapai dengan baik dengan tingkat capaian 101,54 %. Kondisi Angka Harapan Hidup Kota Sukabumi dalam kurun waktu Tahun 2003 – 2006 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.31.
Kecenderungan Angka Harapan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2004 – 2007

NO	TAHUN	AHH		Pertumbuhan (%)
		Pencapaian	Target Renstra	
1	2000	66.90		
2	2001	69.23		3.37
3	2002	71.03		2.53
4	2003	71.24		0.29
5	2004	71.40	69.97	0.22
6	2005	71.65	70.34	0.57
7	2006	71.80	70.71	0.56
	Rata - Rata	71.06		1.26

Sumber : Buku IPM Kota Sukabumi Tahun 2006

Dengan semakin tingginya Angka Harapan Hidup Kota Sukabumi, pada tahun-tahun mendatang harus diimbangi oleh penyediaan infrastruktur yang mudah untuk diakses oleh para lanjut usia serta pemberdayaan organisasi-organisasi penunjang aktifitas para lanjut usia.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Selain AHH, gambaran tingkat kesehatan masyarakat juga ditunjang oleh besarnya Angka kematian Bayi (AKB), yang menggambarkan jumlah Bayi yang lahir hidup per 1000 kelahiran Bayi. AKB di Kota Sukabumi selama periode Tahun 2003-2006 mengalami penurunan, pada Tahun 2003 mencapai 38,96 bayi /1000 dan Tahun 2006 sebanyak 39 bayi dari 6.942 bayi. Apabila melihat target Tahun 2004 yang ditetapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 sebesar 38,96 orang /1000 berada di atas target dengan tingkat capaian 110,062%. AKB merupakan ciri dalam menghasilkan tingkat keturunan yang berkualitas, memiliki harapan dengan penurunan jumlah bayi yang mati diharapkan akan meningkatkan ketersediaan SDM yang dapat berkiprah dan mendukung pembangunan.

Tabel 2.32.
Kecenderungan Angka Kematian Bayi Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2005

NO	TAHUN	Angka kematian bayi		Pertumbuhan (%)
		pencapaian	Target Renstra	
1	2000	41.00		
2	2001	40.78		-0.54%
3	2002	40.26		-1.29%
4	2003	38.96		-3.34%
5	2004	34.50	16.1	-12.93%
6	2005	32.27	15.8	
7	2006	31.97	15.5	
	Rata - Rata	32.58		-3.02%

Sumber : Renstra Kota Sukabumi 2003-2008 dan KUA 2007

c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Data kematian ibu di Kota Sukabumi cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2003 adalah sebanyak 9 orang, tahun 2004 sebanyak 8 orang, tahun 2005 sebanyak 4 orang dan tahun 2006 sebanyak 8 orang. Angka kematian ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial

ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 22,85%, ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk telah mencapai 81,79%. Cakupan kunjungan bayi telah mencapai 100%.

d. Status Gizi Balita

Kurang Energi Protein (KEP) balita masih menjadi masalah utama dalam penanganan gizi. Selama 5 tahun terakhir, KEP total (gizi buruk + gizi kurang) anak balita masih tetap tinggi. Walaupun terjadi penurunan total KEP dari tahun 2001 hingga 2003, namun terjadi peningkatan tajam pada tahun 2004 dan 2005. Fluktuasi seperti ini juga terlihat pada prevalensi gizi kurang yang menurun pada tahun 2001 ke 2003, tapi meningkat di tahun 2004 dan 2005. Hal ini kemungkinan disebabkan makin membaiknya sistem pencatatan dan pelaporan masalah gizi sehingga hampir seluruh kasus gizi buruk dan gizi kurang dapat dilaporkan.

Prevalensi gizi buruk menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi dari 0.74% tahun 2001 menjadi 1.70% pada tahun 2004, walau kembali menurun 1.21% pada tahun 2005. Penurunan ini dimungkinkan dengan adanya pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi) Ibu/Keluarga Balita Gizi Buruk & Gizi Kurang sejak tahun 2004, yang didanai oleh PHP II yang lebih tepat sasaran dan diterapkannya intervensi gizi buruk melalui pendekatan perawatan komunitas yang bersifat holistik selain penanganan rutin dengan pemberian PMT-Pemulihan pada kegiatan klinik gizi. Dengan adanya KIE ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dalam kesehatan semakin meningkat. Status gizi buruk khususnya pada balita terjadi penurunan setiap tahunnya, rata-rata 1,06 % per tahun

Tabel 2.33.
Status Gizi Balita Kota Sukabumi Tahun 2002 - 2006

No.	Status Gizi	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
		%	%	%	%	%
1	Gizi Buruk	0.91	1.10	1.70	1.21	1.06
2	Gizi Kurang	10.77	9.32	14.90	15.27	7.89
3	Gizi Baik	87.16	87.26	82.00	81.99	88.25
4	Gizi Lebih	1.17	2.31	1.40	1.52	1.52
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Masterplan Kota Sehat, 2007 - 2015

Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan yang telah dilaksanakan dapat dinilai keberhasilannya dengan melihat pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan kesehatan dan membandingkannya dengan target yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 227 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan. Pengalokasian anggaran pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan RSUD R. Syamsudin, S.H. cenderung naik dari tahun ke tahun sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.34.
Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Perbandingan Alokasi	Tahun				
	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)
APBD Kota Smi	212,650,878,000.00	221,766,260,000.00	232,550,415,000.00	346,198,165,000.00	457,857,848,000.00
Ang. Dinkes	8,078,919,000.00	8,471,187,000.00	8,976,324,000.00	13,733,948,000.00	21,804,121,000.00
Ang. RSUD	15,199,000,000.00	18,000,000,000.00	19,926,149,000.00	28,150,000,000.00	35,600,000,000.00
Total Anggaran Kesehatan	23,277,919,000.00	26,471,187,000.00	28,902,473,000.00	41,883,948,000.00	57,404,121,000.00
Persentase	10,95 %	11,94 %	12,43 %	12,10 %	12,54 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan RSUD R. Syamsudin, S.H., 2007.

Pelayanan kesehatan yang telah dilayani oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. kota Sukabumi sebagai Unit Swadaya di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi selama 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35.
Perkembangan Pelayanan Kesehatan dan Sistem
RSUD R. Syamsudin, S.H. Tahun 2003 – 2007

No	Jenis Pelayanan Sistem	Tahun					Ket
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan						
1	Hemodilaisa						KSO
2	CT. Scan						KSO
3	Rawat Inap Khusus						
4	Perawatan Jiwa						
5	Poli Executive						
6	Ambulance Executive						
7	Poliklinik VCT HIV AIDS						
8	Gawat Darurat Kebidanan						
9	Medical Check Up Lengkap						
	Sistem						
1	Akreditasi 12 Pelayanan						
2	I. T						
3	Persiapan BLUD						
4	Persiapan ISO						
5	Pelayanaan Keperawatan (MPKP)						
6	One Stop Service Pelayanan						

Sumber : Laporan RSUD R. Syamsudin, S.H., 2007

Bila dilihat pada tabel diatas terdapat pengembangan pelayanan setiap tahunnya baik menggunakan sistem KSO maupun dana APBD, khusus untuk poliklinik executive pada tahun 2007 telah disediakan tempat khusus, untuk peningkatan pelayanan HIV AIDS telah disediakan Poliklinik VCT HIV AIDS dan untuk medical Chek Up telah disediakan peralatan yang lengkap. edangkan output pelayanan RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36.

Out put Pelayanan RSUD R. Syamsudin, S.H Tahun 2003 – 2007

No	Indikator	SAT	Tahun				
			2003	2004	2005	2006	2007
1	BOR	%	65.49	65.71	75.97	77,06	82.27
2	ALOS	Hari	4.70	4.63	4.71	4.86	5.07
3	TOI	Hari	2.05	2.10	1.30	1.28	0.98
4	BTO	Kali	61.43	62.03	69.81	67.33	33.99
5	NDR	‰	18.94	21.56	22.60	23.59	25.54
6	GDR	‰	46.98	50.89	48.92	47.99	50.13
7	Hari Perawatan	Hari	52,586	57,246	72,682	81,915	45,966
8	Lama Dirawat	Hari	63,567	69,755	87,059	96,171	53,649
9	Pasien Keluar (H+M)	Orang	13,515	15,073	18,499	19,796	10,572
10	Total Keluar Mati	Orang	635	767	905	950	530
11	Kematian Perinatal	Orang	41	47	53	52	20
12	Keluar Mati > 48 Jam	Orang	256	325	418	467	270
13	Jumlah Pasien Rawat Inap	Orang	13,537	15,064	18,566	19,785	11,483
14	Kunjungan IGD	Orang	15,608	17,570	20,751	23,178	12,330
15	Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Orang	105,808	112,277	126,465	128,707	68,739
16	Operasi Besar	Orang	961	998	1,089	1,171	664
17	Operasi Sedang	Orang	406	340	422	437	258
18	Operasi Kecil	Orang	22	23	45	68	8
19	Operasi Khusus	Orang	136	169	331	340	143
Keterangan : Jumlah tempat Tidur Data Tahun 2007 sampai dengan bulan juni			220 TT	240 TT	279 TT	297 TT	311 TT

Sumber : Bidang Perencanaan dan SIRS RSUD R. Syamsudin, S.H.,2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejalan dengan pengembangan sarana dan prasarana tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) terus meningkat dari tahun ketahun sampai mencapai peningkatan sebesar 25,62 % meskipun ada penambahan tempat tidur sebesar 41 % berarti bahwa masyarakat baik kota maupun kabupaten sukabumi sangat memanfaatkan RSUD R. Syamsudin, S.H sebagai sarana pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi, demikian juga kunjungan rawat jalan ada kenaikan sebesar 21,64 % dari Tahun 2004.

2.3.5. Kondisi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sukabumi telah menunjukkan perubahan yang signifikan hal ini tercermin dari peningkatan hidup kualitas perempuan. Salah satu indikator keberhasilan di atas adalah Pemerintah Kota Sukabumi mengambil beberapa kebijakan terhadap peningkatan peran kaum perempuan dan anak seperti yang diamanatkan dalam *MDGs (Millennium Development Goals)* yang secara kualitatif dan kuantitatif di seluruh sektor dan aspek pembangunan memperlihatkan bahwa kiprah perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Salah satu tujuan pencapaian MDG adalah kesetaraan Gender yang intinya ingin menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Indeks Pembangunan Gender Kota Sukabumi pada tahun 2006 baru mencapai 60,36 sedangkan angka IPM Kota Sukabumi tahun 2006 sebesar 75,09. Jika dilihat antara angka IPM dengan angka IPG Kota Sukabumi di tahun 2006 ini, ternyata angka IPG masih lebih rendah dibanding angka IPM. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih terdapat ketimpangan jender dalam pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus dilakukan upaya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan, penguatan peran masyarakat dan peningkatan kualitas

kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga yang mempunyai misi pemberdayaan perempuan agar semakin mantap dan mandiri dalam pengausutmaan gender ke dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan.

Perlindungan terhadap anak di Kota Sukabumi lebih ditekankan pada peran aktif keluarga dalam melaksanakan perlindungan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.6. Kondisi Pemuda Dan Olah Raga

Pemuda merupakan salah satu sumber daya yang harus dikembangkan dan diberdayakan karena ditangan merekalah pembangunan Kota Sukabumi akan berlanjut dan pemuda merupakan salah satu tulang punggung keberhasilan pembangunan kota yang akan datang, disamping itu pemuda sebagai salah satu cita-cita penerus bangsa harus disiapkan dan dikembangkan pula beberapa aspek penunjang seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan hidup, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi hasil Registrasi Penduduk akhir Tahun 2006 yang tercatat dalam buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2006 bahwa jumlah penduduk usia 15 – 34 tahun di Kota Sukabumi mencapai 90.860 Jiwa atau 34,48% dari total penduduk Kota Sukabumi. Dengan potensi tersebut Kota Sukabumi harus dapat memberdayakannya menjadi generasi yang siap dan maju untuk membangun Kota Sukabumi sebagai kota berkualitas dan pusat perdagangan, kesehatan dan pendidikan.

Di bidang olah raga pembinaan keolahragaan belum ditangani secara komprehensif dan profesional selain itu masih adanya kendala sarana dan prasarana yang belum memadai diantaranya lapangan olah raga di tiap-tiap kecamatan.

Kegiatan kelompok masyarakat berolah raga secara teratur yang telah dilakukan di Kota Sukabumi

1. Olah raga massal di lapang Merdeka setiap hari minggu & Jumat Di halaman Setda setiap minggu di Puskesmas & Dinkes setiap jumat ; senam lansia,
2. Sanggar,
3. TKJ eksekutif, Legislatif dan fungsional ; 2 kali setahun, SKPD : 2 kali setahun.

Tantangan aspek kepemudaan adalah meningkatkan kualitas pemuda sehingga terbentuk generasi muda yang tangguh dan dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada pembangunan Kota Sukabumi, sedangkan tantangan dalam bidang olah raga adalah peningkatan prestasi olah raga dan memasyarakatkan olah raga diantaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.3.7. Kondisi Seni Dan Budaya

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yakni ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya. Pentingnya pembangunan kebudayaan di Kota Sukabumi ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah kebudayaan daerah itu sendiri dan yang lebih penting adalah melestarikan jati diri dan nilai

budaya di tengah semakin derasnya informasi dan pengaruh negatif budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia.

2.3.8. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kota Sukabumi didalam memasuki era otonomi daerah seperti sekarang Orientasi dan model keberlangsungan pembangunannya lebih menitik beratkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk melalui program peningkatan derajat kesehatan, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan taraf hidup penduduk dengan berbagai kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja dan usaha, pemerataan distribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan penduduk yang lainnya seperti infrastruktur dan suprastruktur secara berjenjang dan berkelanjutan dengan tujuan akhir yaitu meningkatnya kesejahteraan lahir dan bathin. Dengan kata lain model pembangunan ini mencerminkan azas pemerataan dimana pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pada pembangunan manusia ditinjau dari berbagai aspek merupakan solusi yang terbaik dan diharapkan dengan meningkatnya taraf hidup secara langsung berimplikasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan terwujudnya keberlangsungan berkehidupan sosial yang sehat. Salah satu kebijakan kehidupan sosial yang sehat adalah melalui program kemiskinan, ketelantaran dan ketunaan sosial adalah kegiatan-kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial terhadap para usia lanjut. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut cakupannya terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan dari tahun ke tahun cakupan aktifitas kegiatan ini berbanding terbalik dengan jumlah usia lanjut yang terbina dengan perkataan lain bahwa para usila yang terbina sudah lebih bisa mandiri untuk mengurus dirinya sendiri dan ketergantungan terhadap orang lain semakin berkurang.

Tabel 2.37.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kota Sukabumi

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin					
		Pra KS		KS I		Jumlah	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	2006	2534	8230	18586	64679	21120	72909
2	2007	2294	7427	17650	61213	19944	68640
	Perubahan	-240	-803	-936	-3466	-1176	-4269

Sumber : Dinas PMKB Tahun 2007

Jumlah penyandang masalah sosial di Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana jumlah penyandang masalah sosial tahun 2003 sebanyak 13.843 orang sedangkan jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang masuk kategori keluarga Pra KS dan keluarga KS I pada tahun 2006 berjumlah 21.120 KK atau sebanyak 72.909 Jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi sebanyak 19.944 KK atau sebanyak 68.640 jiwa. Apabila berdasarkan pada data masyarakat penerima Askeskin yang tercantum dalam SK Walikota Sukabumi Nomor 210 Tahun 2007 adalah sebanyak 46.530 Jiwa sedangkan masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai adalah sebanyak 12.346 KK .

Melihat target yang diharapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 ternyata jumlah penduduk miskin belum tertangani dengan optimal sesuai dengan target yang diharapkan dengan tingkat capaian baru mencapai 69,89%.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengatasi dan menangani program pengentasan kemiskinan, ketelantaran dan ketunaan social penanganannya dilakukan secara kontinyu dan bertahap. Bukti kongkrit kepedulian pemerintah tersebut adalah dengan menyisihkan dana sebesar 2,5% Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dipotong gaji pegawai. Hal ini dilakukan seiring dengan bertambahnya ragam penyandang masalah kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan para penyandang masalah sosial ini apabila tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di masyarakat .

Pemerintah Kota Sukabumi didalam mengatasi dan menangani program pengentasan kemiskinan, ketelantaran dan ketunaan social juga melibatkan potensi yang ada, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang peduli diantaranya :

Tabel 2.38.
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Potensi	Jumlah (Orang)
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	180
2	Karang Taruna	33
3	Organisasi Sosial	25
4	Panti Asuhan	16
5	Panti Werda	1

Sumber : Kansostek Kota Sukabumi 2006

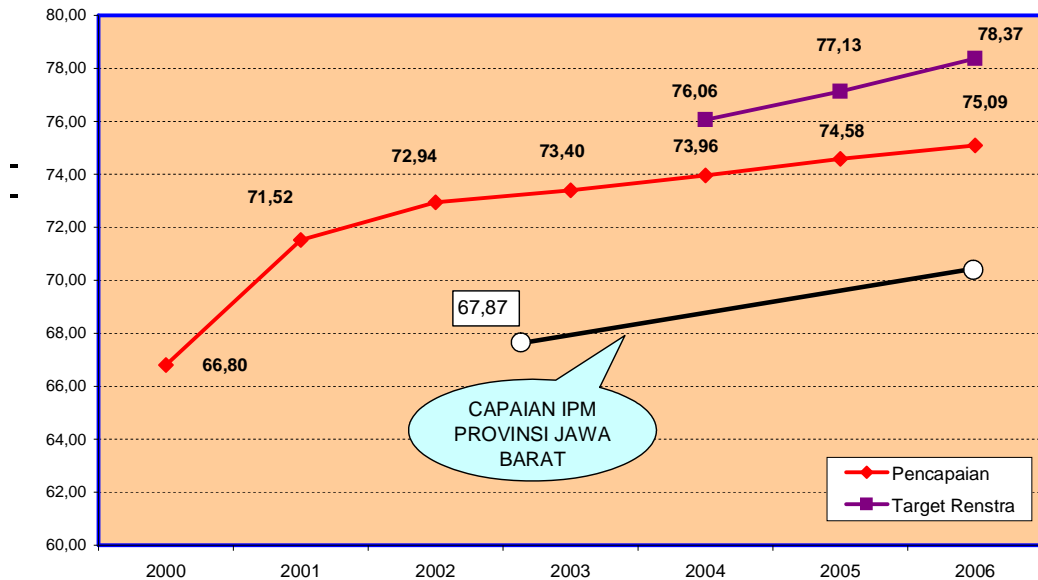
Pemerintah Kota Sukabumi didalam mengatasi dan menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut dilakukan dengan menggunakan pola skala prioritas. Hal ini dilakukan karena terbatasnya anggaran yang tersedia oleh karena itu maka kegiatannya dilakukan secara bertahap, kontinyu dan berkesinambungan.

Selain itu permasalahan sosial juga dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas, , Salah satu indikator tingkat kriminalitas dalam satu tahun di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah narapidana hasil putusan pengadilan pada tahun tersebut, berdasarkan data dalam Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007 jumlah narapidana yang menempati Lembaga Perasyarakatan di Kota Sukabumi pada tahun 2006 adalah sebanyak 184 orang dimana 70 orang diantaranya adalah penduduk Kota Sukabumi, keadaan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005 yaitu sebanyak 185 orang dimana 46 orang diantaranya adalah penduduk Kota Sukabumi.

2.3.9. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambaran perkembangan kondisi sosial daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauhmana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kurun waktu tahun 2000 – 2006 realisasi pencapaian IPM Kota Sukabumi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Target Dan Realisasi Pencapaian IPM Kota Sukabumi
Tahun 2003 – 2006



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, Desember 2007.

Berdasarkan grafik tersebut, pencapaian IPM Kota Sukabumi selama kurun waktu 2003 – 2006, realisasinya 3 (tiga) point di bawah target yang telah ditetapkan atau dengan perkataan lain telah terjadi "gap" antara target dan realisasi pencapaian IPM Kota Sukabumi. Kondisi ini juga secara keseluruhan akan bermuara pada pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat yang juga mengalami "gap".

Dalam upaya untuk menghilangkan "gap" tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan untuk meng-akselerasi pencapaian IPM Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam upaya mengakselerasi IPM, mengeluarkan suatu Program Pendanaan Kompetitif (PPK) yang difokuskan pada kompetisi kinerja kabupaten/kota di dalam menggalang sinergi dengan pemerintah propinsi, masyarakat, dan swasta untuk menjalankan misi akselerasi pencapaian IPM 80,0 di tahun 2010.

Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat berkompetisi dalam program tersebut dengan mengajukan proposal program-program inovatif dalam upaya akselerasi IPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Propinsi Jawa Barat turut berpartisipasi dalam program tersebut sebagai salah satu perwujudan kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati/Walikota Se-Jawa Barat. Dalam perjalanannya Kota Sukabumi mendapatkan dana sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) selama periode Tahun 2006–2007 untuk mengakselerasi pencapaian IPM-nya melalui program-program strategis yang inovatif dan terintegrasi.

Tantangan aspek kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tahun 2008–2013 ke depan adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pemberdayaan masyarakat akibat dari dampak sosial perekonomian yang semakin berat.

2.4. Kondisi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Daerah

2.4.1. Kondisi Penataan Ruang

Dalam RTRW Kota Sukabumi 2002 – 2011, Kota Sukabumi dalam merencanakan struktur ruang kotanya mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

- a. Pengelompokan kawasan fungsional kota yang memberikan pengaruh sangat kuat terhadap struktur ruang dan pengembangan ekonomi. Kawasan fungsional tersebut adalah perdagangan, industri, pemerintahan /perkantoran, pelayanan sosial, terminal dan kawasan pertanian/hijau .
- b. Pembentukan struktur ruang diarahkan untuk mewujudkan ruang kota yang serasi antara fungsi-fungsi sosial ekonomi dengan fungsi lingkungan (kawasan lindung/ruang terbuka).
- c. Perkembangan fisik kota yang tadinya sentralistik (*concentric*) diubah menjadi pengembangan dengan banyak pusat secara menyebar diantaranya dengan memanfaatkan daya tarik jalan lingkar selatan untuk mengembangkan salah satu pusat kegiatan baru berskala regional.
- d. Untuk meningkatkan akses antar simpul pelayanan dan antar kawasan fungsional, dikembangkan jaringan jalan sistem sekunder baik peningkatan jalan lama maupun pembangunan jalan baru.

Untuk memacu perkembangan kota, meningkatkan pelayanan sosial ekonomi terhadap masyarakat, mengatasi berbagai persoalan ruang dan pemerataan pembangunan, Kota Sukabumi menetapkan 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK) dimana Pusat Kota yang saat ini sudah terbentuk tetap dipertahankan sebagai kawasan pusat kota dan ditetapkan dalam satu Bagian Wilayah Kota (BWK II) yang meliputi Kecamatan Cikole. Secara garis besar pembagian BWK di Kota Sukabumi terdiri dari :

BWK I meliputi Kecamatan Gunung Puyuh dengan fungsi kawasan untuk perumahan dengan luas 548 Ha,

BWK II (pusat kota) meliputi Kecamatan Cikole dengan fungsi kawasan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan /perkantoran, perumahan dan pariwisata dengan luas 708 Ha,

BWK III meliputi Kecamatan Cibeureum dengan fungsi kawasan untuk Industri, perdagangan dan perumahan dengan luas 877 Ha,

BWK IV meliputi Kecamatan Citamiang dengan fungsi kawasan untuk perdagangan dan perumahan dengan luas 404 Ha,

BWK V meliputi Kecamatan Warudoyong dengan fungsi kawasan untuk Industri, perdagangan dan perumahan dengan luas 762,231 Ha,

BWK VI meliputi Kecamatan Baros dengan fungsi lahan untuk perdagangan dan jasa, perumahan serta pariwisata dengan luas 612 Ha,

BWK VII meliputi Kecamatan Lembursitu dengan fungsi lahan untuk perumahan, perdagangan dan pariwisata dengan luas 889 Ha.

Dari hasil evaluasi terdapat beberapa program yang belum dapat terealisasi dengan berbagai alasan diantaranya adalah keterbatasan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39.
Indikasi Program Pembangunan Kota Sukabumi
Tahun 2002-2011 Beserta Realisasinya

No	Sektor	Program	Lokasi	Pelaksanaan	Realisasi
1	Industri	1. Deliniasi sentra industri dan lokasi-lokasi industri 2. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri 3. Pengembangan kegiatan industri unggulan berbasis potensi yang ada	Kecamatan Cibeureum, Citamiang, Warudoyong	2002-2006	1. Belum dilakukan 2. Untuk jalan di lokasi industri dalam 3. Pengembangan kegiatan industri unggulan berbasis potensi yang ada
2	Perdagangan	1. Pembangunan pasar induk 2. Pembangunan pasar umum 3. Penataan tata niaga barang hasil industri dan pertanian 4. Pembangunan pergudangan dan bongkar muat	Kecamatan Lembur Situ, Cikole, Warudoyong, Citamiang, Gunungpuyuh	2002-2004	1. Belum dilakukan 2. Belum dilakukan 3. Belum dilakukan 4. Belum dilakukan
3	Pertanian	Deliniasi kawasan pertanian produktif Mengembangkan kegiatan pertanian yang prospektif dan unik Pengembangan kegiatan agrowisata dan agrobisnis	Kecamatan Lembursitu, Baros, Citamiang, Warudoyong, Cikole, Cibeureum	2002-2006	1. Belum dilakukan 2. Telah dilakukan dalam kegiatan PPK-IPM 80 Jabar 3. Belum dilakukan
4	Pariwisata	1. Penataan obyek wisata dan potensi wisata yang ada. 2. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata 3. Mengembangkan kegiatan budaya penunjang pariwisata 4. Promosi wisata	Kecamatan Cikole, Lembursitu	2003-2006	1. Belum dilakukan. 2. Belum dilakukan 3. Telah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pada Kantor Pariwisata 4. Telah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pada Kantor Pariwisata
5	Transportasi	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 2. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan 3. Pembangunan jaringan jalan baru 4. Penataan area parkir 5. Pembangunan area parkir 6. Pembangunan terminal regional (Tipe A) 7. Pembangunan terminal lokal (Tipe C)	Seluruh wilayah Kecamatan	2002-2011	1. Telah dilakukan 2. Telah dilakukan 3. Belum dilakukan 4. Telah dilakukan 5. Beberapa telah dilakukan tetapi belum maksimal 6. Belum dilakukan Beberapa telah dilakukan tetapi secara fungsional beberapa terminal Tipe C ini belum berjalan
6	Tata Ruang	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota 2. Penyusunan Rencana teknis ruang zona/sentra industri 3. Penyusunan rencana teknis kawasan perdagangan	Kecamatan Cikole, Citamiang, Cibeureum, Warudoyong, Lembursitu, Gunungpuyuh	2003-2005	1. Telah dilakukan untuk 7 kecamatan 2. Beberapa telah dilakukan tetapi untuk lokasi industri sesuai RTRW 2002 – 2011 belum dilakukan 3. Belum dilakukan
7	Prasarana Dasar	1. Pembangunan jaringan baru pipa air bersih 2. Perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase	Seluruh wilayah kecamatan	2002-2006	2. Telah dilakukan 3. Telah dilakukan

8	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 2. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah industri 3. Pembangunan ruang terbuka hijau 4. Penataan taman dan pemeliharaan hutan kota 	Seluruh wilayah kecamatan	2002-2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sesuai dengan mekanisme perijinan 2. Dilakukan sesuai mekanisme perijinan 3. Belum dilakukan 4. Telah dilakukan pada kegiatan GNRLK dan GNRHL
---	------------------	--	---------------------------	-----------	---

Sumber : Evaluasi RTRW Kota Sukabumi 2002 - 2011, Bappeda

Berdasarkan hasil evaluasi juga direkomendasikan untuk menyempurnakan strategi penataan ruang Kota Sukabumi dari pola Pertumbuhan Jamak (dengan 7 BWK) menjadi pola *Bipolar* (2 kutub) yaitu Kota Sukabumi bagian utara dan Kota Sukabumi bagian selatan.

2.4.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Daerah

Kondisi sarana dan prasarana di Kota Sukabumi saat ini masih belum optimal kualitas ataupun cakupan pelayanannya, sehingga belum memadai dalam menopang pembangunan sektor riil di Kota Sukabumi termasuk untuk mendorong sektor produksi serta pengembangan wilayah. Kondisi sarana dan prasarana wilayah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, listrik, dan energi.

a. Sarana Perekonomian

Sarana Perdagangan

Sarana perekonomian Sebagai kota perdagangan dan jasa, aktivitas perdagangan di Kota Sukabumi terbagi kedalam beberapa jenis perdagangan, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil dan swalayan/ department store. Berdasarkan data Tahun 2005/2006 jumlah keseluruhan jenis pedagang tersebut adalah sebanyak 3.300 unit. Dilihat dari tempat berdagangnya terdiri dari pasar sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu Pasar Dewi Sartika, Pasar Kaum, Pasar Pelita, Pasar Tipar Gede, Pasar Degung, Pasar Bungbulang dan Pasar Lembursitu dari ketujuh pasar tersebut hanya dua yang berada di wilayah Kecamatan Cibeureum dan Lembursitu (BACILE). Selain itu kondisi Pasar Pelita yang melayani perdagangan skala regional kondisinya kumuh dan semerawut, dimana dalam wilayah pasar sirkulasi lalu lintas angkutan umum dan kegiatan bongkar muat menambah kemacetan, selain itu banyaknya pedagang yang berdagang di badan jalan juga menjadi permasalahan.

Tabel 2.40.
Sarana Perdagangan Di Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2003 - 2007

Kota Sukabumi	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Warung	3.160	4.132	3.490	3.589	3.808
	2. Toko	2.365	2.387	2.410	2.543	2.579
	3. Kios	2.101	2.136	2.223	2.233	2.259
	4. Pasar	9	10	10	10	10
	5. Supermarket	9	11	15	18	21
Jumlah		7.644	8.676	8.148	8.393	8.677

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Selain pasar tempat berdagang yang ada di Kota Sukabumi, adalah Ruko sebanyak 242 unit yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Citamiang, Cikole, Gunung Puyuh dan Warungdoyong, serta Los sebanyak 2.172 unit dimana 1.707 unit (jumlah terbesar) berada di Cikole dan 392 unit di Citamiang sebagai bagian dari pusat Kota Sukabumi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan masih terpusat di wilayah Kecamatan Citamiang, Cikole, Gunung Puyuh dan Warungdoyong, dimana aktivitas perekonomian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi masih terpusat di 4 (empat) wilayah kecamatan ini yang merupakan kota lama. Kondisi ini sejalan dengan pendapatan per kapita masyarakatnya dimana wilayah Kecamatan Citamiang, Cikole, Gunung Puyuh dan Warungdoyong memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Baros, Cibeureum dan Lembursitu, hal ini dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan perkembangan wilayah antara wilayah Kecamatan Citamiang, Cikole, Gunung Puyuh dan Warungdoyong dengan wilayah Baros, Cibeureum dan Lembursitu.

Jasa Keuangan

Untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Sukabumi Jasa Keuangan dan Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya juga memegang peranan penting. Beberapa sarana Jasa Keuangan dan Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.

Sarana Jasa Keuangan Dari Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Di Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2006

No	KECAMATAN	BANK	NON BANK	PEGADAIAN	ASURANSI	JMLH
1	BAROS	-	-	-	-	-
2	CITAMIANG	2	1	1	3	7
3	WARUDYOYONG	5	-	-	1	6
4	GUNUNG PUYUH	-	-	-	1	1
5	CILKOLE	10	2	-	2	14
6	LEMBURSI TU	-	-	-	-	-
7	CIBEUREUM	-	-	-	-	-
TOTAL		17	3	1	7	28

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2007

Dalam bidang jasa yang beraktivitas di wilayah Kota Sukabumi terdiri dari Perbankan sebanyak 17 unit, Non Perbankan sebanyak 3 unit, dan lembaga keuangan berbentuk Asuransi sebanyak 7 unit. Berdasarkan penyebarannya, sarana jasa keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagian besar berada di CICIGUWA. Hal ini ke empat kecamatan yang merupakan wilayah kota lama tersebut, hingga saat ini diindikasikan sebagai wilayah orientasi kegiatan transaksi dan perputaran uang yang cukup padat.

b. Sarana Pendidikan

Dalam pengembangan sarana dan prasarana, kebijakan yang ditempuh antara lain melanjutkan program regrouping sekolah dasar kompleks yang telah dirintis sejak tahun 1997, rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, dan pemenuhan secara bertahap sarana pendidikan seperti buku, mebeuler, perlengkapan olahraga, perlengkapan kesenian, laboratorium komputer, laboratorium IPA dan laboratorium bahasa. Khusus program regrouping sekolah dasar yang dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi anggaran dan efektivitas pembelajaran, sampai tahun 2007 telah mampu mengurangi jumlah sekolah dasar sampai batas aman dari 177 SD pada

tahun 1997 menjadi 112 SD, untuk lebih jelasnya keadaan sarana pendidikan khususnya ruang kelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42.
Perkembangan Jumlah Ruang Kelas
Tahun 2004 – 2007

Jenjang	Tahun 2004			Tahun 2005			Tahun 2006			Tahun 2007		
	Jml	Baik	Rsk	Jml	Baik	Rsk	Jml	Baik	Rsk	Jml	Baik	Rsk
SDN	992	560	432	992	698	294	992	803	189	992	940	52
SMPN	209	154	55	209	169	40	227	198	44	236	197	39
SMAN	105	39	66	108	45	63	116	53	63	119	58	61
SMKN	71	47	24	71	47	24	71	57	14	73	59	14
MIS	129	28	101	129	36	93	129	47	82	129	72	57
M.Ts.	62	35	27	62	39	23	64	43	21	72	55	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 2007.

Sedangkan pembangunan unit sekolah baru selama kurun waktu Tahun 2003 – 2007 di Kota Sukabumi telah dibangun beberapa Unit Sekolah Baru, baik yang dibangun untuk menambah akses maupun sebagai akibat dilakukannya penggabungan sekolah dasar, yaitu :

1. SDN Cipanengah CBM di Kecamatan Lembursitu. (Penggabungan SDN Cipanengah 1,2,3 dibangun pada lokasi baru)
2. SDN Suryakencana CBM di Kecamatan Cikole (dalam penyelesaian) (Penggabungan SDN Cipelang Leutik, SDN Selabatu dan SDN Ir H.Juanda).
3. SMPN 16 di Kecamatan Warudoyong (dalam penyelesaian).
4. TK Negeri Pembina di Kecamatan Lembursitu (Unit TK Baru).

Adapun pada tahun 2008 telah direncanakan untuk dibangun SDN Cibeureum CBM dan TK Negeri Pembina di Kec.Cibeureum, TK Negeri Kec. Cikole, SMKN 4 di Kec. Lembursitu, UPTD TK/SD Kec. Citamiang dan Kec. Cibeureum serta Relokasi SDN Cikole 2 ke SDN Dewi Sartika CBM.

Tabel 2.43.
Perkembangan Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Sarana Pendidikan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. TK Negeri	5	5	5	7	6
	2. TK Swasta	92	94	98	106	110
	3. SD Negeri	124	122	120	119	118
	4. SD Swasta	15	15	15	15	14
	5. Madrasah Ibtidaiyah	85	85	87	88	89
	6. SMP Negeri	15	15	15	16	17
	7. SMP Swasta	24	24	24	24	23
	8. Madrasah Tsanawiyah	13	15	15	15	16
	9. SMU Negeri	5	6	6	6	6
	10. SMU Swasta	15	15	16	16	16
	11. Aliyah	4	4	5	5	6
	12. SMK Negeri	3	3	3	3	3
	13. SMK Swasta	12	12	13	12	13
	14. PT Negeri	0	0	0	0	0

Kota Sukabumi	Sarana Pendidikan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	15. PT Swasta	10	10	10	11	11
Jumlah		422	425	427	436	442

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

c. Sarana Kesehatan

Dalam menunjang upaya pencapaian visi Kota yang menitik beratkan pada kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat harus didukung oleh sarana yang memadai baik kualitas maupun jumlahnya, data perkembangan sarana kesehatan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Rumah Sakit	3	3	3	3	3
	2. RS. Bersalin	6	6	8	9	10
	3. Poliklinik	6	7	8	9	9
	4. Puskesmas	15	15	15	15	15
	5. Puskesmas Pembantu	17	18	19	20	21
	6. Praktek Dokter	72	76	85	88	94
	7. Praktek Bidan	48	50	59	59	61
	8. Posyandu	399	406	412	424	428
	9. Apotik	30	31	32	31	33
Jumlah		596	612	630	646	661

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Dilihat dari data tersebut terlihat bahwa sarana kesehatan dari sisi jumlah sudah dapat melayani penduduk Kota Sukabumi.

d. Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan di Kota Sukabumi secara umum relatif mencukupi dan dapat melayani aktifitas keagamaan masyarakat, data jumlah sarana keagamaan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45.
Data Sarana Keagamaan Kota Sukabumi Tahun 2003 - 2007

Kota Sukabumi	Sarana Peribadatan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Masjid	379	380	397	402	406
	2. Surau	559	567	608	640	640
	3. Gereja Kristen	12	12	12	12	12
	4. Gereja Katolik	4	4	4	4	4
	5. Pura	0	1	1	1	1
	6. Vihara	3	3	3	3	3
	7. Kelenteng	2	2	2	2	2
Jumlah		959	969	1.027	1.064	1.068

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

e. Sarana Olah Raga dan Rekreasi

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat adalah aktifitas olah raga yang secara berkala dilakukan oleh masyarakat, aktifitas ini memerlukan sarana olah raga yang memadai. Selain itu sarana olahraga juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Selama ini lokasi yang menjadi tujuan utama masyarakat untuk berolah raga terutama hari minggu dan hari libur masih terpusat di lapangan merdeka, untuk

melakukan upaya pemerataan sarana olah raga ini harus dilakukan dengan pendekatan ke wilayahan. Perkembangan jumlah sarana olah raga di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46.

Perkembangan Jumlah Sarana Olah Raga dan Rekreasi Di Kota Sukabumi Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Sarana Olahraga dan Rekreasi	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Lapangan Terbuka	11	10	10	12	12
	2. Gedung Kesenian	0	0	0	0	1
	3. Galeri	0	0	0	0	0
	4. Taman Budaya	1	1	1	2	3
	5. Lapang Sepakbola	10	11	12	12	11
	6. Lapang Bola Volley	115	119	122	125	121
	7. Lap. Bulutangkis	128	143	149	158	157
	8. Lapangan Basket	32	35	39	40	40
	9. Lapangan Tennis	18	18	18	26	26
	10. Kolam Renang	3	4	4	4	6
	Jumlah	318	341	355	379	377

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Dari data terlihat bahwa masih minimnya lapangan olah raga di Kota Sukabumi relatif masih kurang dan sebarannya masih banyak berada di wilayah Kecamatan Cikole, Citamiang, Gunungpuyuh dan Warudoyong, untuk itu diperlukan pembangunan sarana olah raga di wilayah-wilayah Baros Cibeureum dan Lembursitu sehingga aktifitas olah raga masyarakat dapat terwadahi secara merata.

f. Sarana dan Prasarana Transportasi

Berdasarkan data pembangunan fasilitas jalan di Kota Sukabumi menurut Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi (BPS) tercatat bahwa Panjang jalan negara di Kota Sukabumi pada Tahun 2006 mencapai 8,5 km dalam kondisi baik, jalan provinsi mencapai 15,09 km dalam kondisi baik, sedangkan panjang jalan kota mencapai 142,532 km dengan rincian 43,118 km dalam kondisi baik, 45,567 km dalam kondisi sedang, dan sepanjang 53,847 km dalam kondisi rusak. Sampai sekarang, upaya pemenuhan kondisi jalan yang baik masih terus ditingkatkan.

Pelayanan Terminal dan Halte

Guna menunjang pergerakan orang dan barang, Kota Sukabumi memiliki 1 Terminal Tipe A dan 1 (satu) Terminal Tipe B. Nama terminal, tipe, luas dan pengelola terminal di Kota Sukabumi seperti tabel berikut.

Tabel 2.47.

Gambaran Terminal Di Kota Sukabumi Tahun 2007

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (M3)	Instansi Pengelola	Keterangan
1	Sudirman	A	5	Dishub / UPTD Terminal	Terdapat rencana relokasi terminal Sudirman seluas 5 Ha di Wilayah Selatan Kota (Jalan Lingkar)
2	Lembursitu	B	4.5	Dishub / UPTD Terminal	
3	Subang Jaya	Sub Terminal	-	Dishub / UPTD Terminal	
4	Bungbulang	Sub Terminal	-	Dishub / UPTD Terminal	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 2006

Dari kondisi di lapangan saat ini Terminal Sudirman merupakan pusat pergerakan dan tujuan utama dari kendaraan angkutan umum dalam dan luar Kota Sukabumi. Pesatnya perkembangan angkutan umum penumpang yang ada mengakibatkan lokasi terminal yang ada tidak mampu lagi menampung kendaraan umum pada jam-jam tertentu (*peak hours*). Pada kondisi ini kendaraan angkutan umum banyak menunggu (antri) di luar lokasi terminal hingga cukup menyulitkan dalam pengaturan jalur kendaraan. Disamping itu melimpahnya kendaraan mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan dari dan menuju terminal. Demikian halnya dengan kondisi di dalam terminal, padatnya penumpang yang berangkat dan tiba di Terminal Sudirman menjadikan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang tersebut terasa kurang nyaman.

Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi Terminal Sudirman ketempat yang lebih baik / strategis di wilayah Jalan Lingkar, dengan bangunan fisik terminal yang representatif. Bangunan tempat perhentian angkutan umum atau dikenal dengan Halte/ Shelter baru terdapat 8 buah dari 23 buah yang dibutuhkan.

Penataan

Cepatnya pertumbuhan Kota Sukabumi dan sekitarnya saat ini ternyata belum dapat diimbangi oleh prasarana jalan yang memadai. Hal ini ditandai oleh padatnya pergerakan kendaraan pada suatu ruas jalan, yang berakibat pada kemacetan dan menurunnya *Level of Service* (LOS) ruas jalan tersebut. Kinerja jalan di beberapa ruas jalan utama Kota Sukabumi tergambar dalam rasio volume per kapasitas total ruas jalan (*V/C Ratio*) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
V/C Ratio Ruas Jalan Utama di Kota Sukabumi Tahun 2007

No.	Nama Ruas Jalan	Status	Kapasitas Total (C) (smp/jam)	Volume Lalin (smp/jam)	V/C Ratio
1	Jend. Ahmad Yani	Nasional	3002,04	1212,59	0,40
2	Jend. Sudirman	Nasional	2740,40	1657,78	0,60
3	KHA Sanusi	Nasional	2388,26	1692,00	0,71
4	R.A Kosasih	Nasional	2618,70	2030,00	0,78
5	Kapt Harun Kabir	Propinsi	2676,24	355,00	0,13
6	Pelabuhan	Propinsi	2891,91	831,14	0,29
7	Otto Iskandardinata	Propinsi	2556,36	1804,62	0,71
8	R.H. Didi Sukardi	Propinsi	2169,93	996,44	0,46
9	Baros	Propinsi	2288,41	522,67	0,23
10	Bhayangkara	Kota	2743,40	1456,21	0,53
11	Laks. RE Martadinata	Kota	2622,07	2182,10	0,83
12	Perintis Kemerdekaan	Kota	2316,43	1720,06	0,74
13	R. Syamsudin SH	Kota	2766,84	908,55	0,33
14	Selabintana	Kota	2509,46	644,00	0,26
15	Siliwangi	Kota	2616,70	1365,76	0,52
16	Surya Kencana	Kota	2702,50	1463,93	0,54

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 2005

Tabel di atas menunjukkan padatnya arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu terutama pada jam sibuk (*peak hours*) baik di hari kerja maupun hari libur. Hal ini tergambar dari *Level Of Service* (LOS) sebagian besar ruas jalan yang masuk katagori padat (> 0,5). Kondisi ini juga salah satunya disebabkan oleh arus yang berasal dari luar kota melewati pusat kota dengan menggunakan jalan-jalan dalam kota. Upaya untuk

memecahkan permasalahan tersebut telah dilakukan dengan membangun jalan lingkaran selatan, namun sampai dengan tahun 2007 yang telah terbangun baru mencapai 2,2 kilometer dari 11 kilometer yang direncanakan.

g. Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk permasalahan dan kebutuhan akan sarana prasarana perumahan permukiman akan bertambah, selain itu konsentrasi penduduk yang berlebihan dalam suatu wilayah akan menambah beban pada lingkungannya yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung lingkungan itu sendiri.

Perumahan

Secara umum kondisi rumah di Kota Sukabumi sampai dengan pada akhir tahun 2006 yang termasuk dalam kategori rumah sehat telah mencapai 12.327 rumah dari 21.363 rumah yang disurvei atau sekitar 57,70%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2005 yang mencapai 9.124 rumah sehat dari 18.341 rumah yang disurvei atau sebesar 49,75%. Tingkat kepadatan rumah yang tinggi akan berpengaruh terhadap penularan penyakit seperti Tb Paru, ISPA, Kusta, dan Scabies. Apabila dalam satu rumah dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi akibat jenis lantai tanah maka akan memudahkan terjadinya penularan penyakit kepada anggota keluarga lainnya. Dilihat dari jumlah rumah dengan kategori kecil, sedang dan besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pada akhir tahun 2013 diperkirakan mencapai 297.377 jiwa, kebutuhan akan perumahan diperkirakan akan mencapai ± 34.000 unit rumah.

Penyediaan Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih Kota Sukabumi dipenuhi oleh dua jenis sumber, yaitu melalui sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Sukabumi dan melalui sistem non-perpipaan, masyarakat yang belum terlayani oleh jaringan PDAM didalam memenuhi kebutuhan air bersihnya dilakukan dengan memanfaatkan sumber air bersih lain, diantaranya : mata air, sumur gali, sumur pompa, dan hidrant umum, selain itu pula masih terdapat masyarakat yang masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data jumlah penduduk yang menggunakan air bersih di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk yang Menggunakan Air Bersih di Kota Sukabumi Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Uraian	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. KK. Memiliki Sumur Gali	20.520	20.871	20.477	20.858	24.715
	2. KK. Memakai PDAM	10.538	11.576	12.521	13.820	15.486
	3. KK. Memakai Sumur Pompa	12.168	12.384	13.418	14.028	15.720
	4. KK. Pengguna Mata Air	3.910	4.066	4.205	4.188	4.310
	5. KK. Pengguna Air Perpipaan	854	894	977	1.423	1.688
	6. KK. Pengguna Air Sungai/Danau	3.180	3.260	3.091	2.800	3.048
	Jumlah	51.170	53.051	54.689	57.117	64.967

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Dari data terlihat bahwa jumlah KK yang dilayani oleh PDAM mencapai 15.486 KK atau sebesar 23.84%. Namun demikian pada Tahun 2006 PDAM dihadapkan pada permasalahan sumber air baku yakni dengan terjadinya penurunan produksi air dari kapasitas design. Penurunan produksi air ini diantaranya dipengaruhi oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air akibat perubahan fungsi lahan disekitar area sumber serta intensitas dan frekuensi hujan. Potensi sumber air dari berbagai sumber saat ini pada umumnya dalam kondisi maksimum yaitu sebesar 505 lt/detik, sedangkan pada kondisi minimumnya adalah sebesar 234 Lt/detik.

Listrik Dan Telekomunikasi

Secara umum keberadaan jaringan listrik sudah mencakup semua kelurahan yang ada di Kota Sukabumi. Tetapi belum semua warga bisa merasakan layanan listrik karena berbagai faktor seperti faktor kondisi alam yang tidak memadai dan faktor kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas.

Tabel 2.50.
Jumlah Pengguna Jaringan Listrik di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Uraian	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Keluarga Pengguna Listrik	53.189	54.061	55.182	56.309	63.230
	2. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN	53.031	54.080	55.590	57.889	65.157
	3. Jumlah Keluarga yang Belum Memakai Listrik	2.697	2.583	2.589	2.410	2.608
	4. Penerangan Jalan Utama	1.404	1.223	1.326	1.534	1.852
	5. Jenis Penerangan Jalan	394	411	432	453	511
	Jumlah	110.715	112.358	115.119	118.595	133.358

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Prasarana Telekomunikasi di Kota Sukabumi pada dasarnya sudah dapat melayani seluruh wilayah Kota Sukabumi baik telepon rumah (*fixed phone*) maupun seluler dan wartel, sebagai gambaran jumlah prasarana komunikasi di Kota Sukabumi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.51.
Jumlah Prasarana Telekomunikasi di Kota Sukabumi
Tahun 2003-2007

Kota Sukabumi	Uraian	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
	1. Jumlah Keluarga Pelanggan Telepon	13.531	14.211	14.948	16.028	20.326
	2. Jumlah Warpostel	643	694	773	891	1.120
	3. Kantor Pos	73	74	79	83	194
	Jumlah	14.247	14.979	15.800	17.002	21.640

Sumber : Hasil Survey Data Dasar RP4D Tahun 2007

Pengelolaan Persampahan

Volume sampah di Kota Sukabumi pada Tahun 2006 adalah ± 670,48 m³/hari atau sekitar 244.725,2 m³/tahun, sedangkan volume sampah yang terangkut baru mencapai 80 % (536,38 m³/ hari). Daerah pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Sukabumi. Kecilnya jangkauan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi dikarenakan sumber daya dan prasarana yang masih kurang. Masyarakat yang tidak

terlayani sistem, mengelola sampahnya dengan cara membakar atau menimbun di halaman. Tetapi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai halaman yang cukup, membuang sampah ke tempat-tempat terbuka dan sungai.

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang digunakan saat ini di Kota Sukabumi terletak di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu. TPA Cikundul memiliki luas 10,66 Ha. Metoda yang diterapkan di TPA Cikundul adalah *controlled landfill* tetapi belum optimal. Eksistensi TPA Cikundul pada gilirannya menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya TPA, sampah yang terakumulasi akan menimbulkan masalah. Pada gilirannya, Pemerintah Kota Sukabumi seyogyanya menempatkan pengelolaan sampah dalam tingkat prioritas yang paling tinggi, dan Dinas Kebersihan menempatkan pengelolaan TPA sebagai prioritas utama.

Pengelolaan sampah di TPA adalah pekerjaan yang terus berkembang secara kontinyu, seperti pengupasan tanah, pengurugan, penutupan, dan lain-lain yang membutuhkan pengelolaan yang serius dan memuaskan setiap hari, bukan hanya persoalan membuang sampah.

2.4.3. Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Sumberdaya Alam

Pada dasarnya Kota Sukabumi tidak memiliki sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis, namun demikian kondisi alam yang ada menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan disamping sumberdaya manusia (SDM) Kota Sukabumi. Kondisi alam yang dimiliki tetap dipertahankan agar tidak mengalami degradasi kualitasnya yang tentunya dapat merugikan Kota Sukabumi di masa-masa yang akan datang.

b. Lingkungan Hidup

Udara Bersih

Kegiatan transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor merupakan sumber utama penyebab terjadinya pencemaran udara Di Kota Sukabumi yaitu dengan dihasilkannya gas buangan berupa CO, NOx, Hidrokarbon, SO₂ yang merupakan parameter-parameter penting akibat aktivitas ini, unsur-unsur tersebut adalah bahan logam timah yang ditambahkan ke dalam bensin berkualitas rendah untuk meningkatkan nilai oktan guna mencegah terjadinya letupan pada mesin. Udara yang tercemar dengan partikel dan gas ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkatan dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran dan komposisi kimiawinya. Gangguan tersebut terutama terjadi pada fungsi faal dari organ tubuh seperti paru-paru, susunan saraf pusat dan pembuluh darah juga menyebabkan iritasi pada mata dan kulit.

Air Sungai Bersih

Sungai di Kota Sukabumi kondisinya semakin memprihatinkan, terutama pada pemukiman-pemukiman padat di sepanjang bantaran sungai, masyarakat banyak yang masih membuang sampah dan tinja ke sungai, kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab banjir pada musim hujan. Prilaku membuang sampah dan membuang tinja ke sungai memperlihatkan bahwa sebanyak 13,8 % dari jumlah KK di Kota Sukabumi mempunyai kebiasaan membuang sampah ke sungai, hal ini erat kaitannya dengan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

masyarakat, Kondisi ini salah satunya disebabkan pula oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di lokasi – lokasi tertentu di Kota Sukabumi

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau khususnya taman yang berada pada beberapa ruas jalan sampai tahun 2005 adalah seluas 6,542 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 18.599 pohon dari berbagai jenis diantaranya : angsana, mahoni, palm, akasia, kayu manis, caringin, gelodongan, bungur, dan lain-lain yang tersebar pada 35 ruas jalan atau taman.

Sempadan sungai yang luasnya 961,168 Ha di Kota Sukabumi seharusnya menjadi ruang terbuka hijau tetapi pada kenyataan di lapangan sebagian sudah terbangun dengan gedung-gedung dan rumah tinggal penduduk sekitar 30% atau sekitar 288,35 Ha. Adapun total luas lahan sempadan sungai yang masih menjadi RTH di Kota Sukabumi mencapai 672,112 Ha.

Secara keseluruhan RTH di Kota Sukabumi baru mencapai 683,86 Ha. Adapun berdasarkan standar nasional untuk ruang terbuka hijau di perkotaan adalah 30% dari luas wilayah atau sekitar 1.400 Ha untuk wilayah Kota Sukabumi.

Tantangan Apek Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 5 tahun ke depan diantaranya adalah

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan dalam rangka terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan, sadar lingkungan,
2. Masih sedikitnya ruang terbuka hijau yang dimiliki serta belum adanya hutan kota

2.5. Kondisi Pemerintahan Umum

2.5.1. Kondisi Politik

Berkembangnya kesadaran hak masyarakat dalam kehidupan politik di Kota Sukabumi yang dalam jangka panjang mampu dan mempunyai inisiatif bagi pengelolaan urusan publik. Peran tersebut tidak terlepas pula dalam peran partai politik, organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Secara umum kondisi politik di Kota Sukabumi relatif dinamis dimana salah satu indikatornya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah langsung yang mencapai lebih dari 70%. Komposisi fraksi-fraksi yang mewakili partai pemenang pemilu legislatif tahun 2004 terdiri dari Fraksi Partai Golkar 9 kursi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 5 kursi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 4 kursi, Fraksi Partai Amanat Nasional 3 kursi, Fraksi Bulan Bintang 3 kursi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 kursi dan Fraksi Partai Demokrat 3 Kursi.

2.5.2. Keamanan Dan Ketertiban Umum

Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan dibangunnya paradigma yang kokoh yaitu peranan masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan suasana tenteram, tertib, dan nyaman sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota Sukabumi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa. Akan tetapi di

Kota Sukabumi yang menjadi kendala sampai saat ini adalah mulai berkurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya.

2.5.3. Pemerintahan

Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Sukabumi masih perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kerja aparat adalah terkait dengan beberapa faktor, antara lain belum optimalnya koordinasi inter dan antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan dan juga belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik, belum didukung oleh jumlah personil yang cukup, dengan kualifikasi pendidikan yang relatif memadai, masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta struktur kelembagaan yang belum efektif dalam menjalankan pelayanan umum dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Sukabumi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 4.337 orang, yang melayani 259.268 orang penduduk, sehingga rasio perbandingan antara PNS terhadap masyarakat adalah rata-rata 1 : 60 orang. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai cukup besar. Menurut tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S3/S2 sebanyak 116 orang, lulusan S1 sebanyak 1.171 orang, D3/Akademi sebanyak 1.331 orang, SMA/SMK sebesar 1.377 orang, lulusan SLTP sebanyak 163 orang dan SD sebanyak 169 orang. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian adalah PNS (guru) yang perlu diantisipasi terutama guru inpres pertama diprediksikan akan terjadi pensiun massal. Tantangan aspek pemerintahan pada kurun waktu 2008 – 2013 diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur,
2. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik,
3. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik,
4. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar,

Dengan melihat kondisi umum daerah yang terdiri dari aspek-aspek Perekonomian, Pemerintahan, Sosial Budaya serta Penataan ruang dan sarana prasarana daerah, secara umum pada hakekatnya diukur oleh tingkat pencapaian indikator makro daerah. Perkembangan Indikator Makro Kota Sukabumi beserta komponen-komponennya, sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.52.

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Makro
Kota Sukabumi Tahun 2003-2007**

No	Indikator Makro	2003		2004		2005		2006		2007	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Penduduk	-	249.98	268.191	259.204	272.889	263.369	277.659	263.480	282.518	280.647
2	Pengangguran (TPAK)	-	44,85	60,03	66,84	57,03	64,48	54,17	45,50	51,47	56,91
3	Kemiskinan (KK)	-	8.428	6.181	9.447	4.872	8.18	3.537	12.346	2.174	19.944
4	AKB	-	38.96	16,1	34,5	15,8	32,27	15,5	31,97	15,2	
5	AHH	-	71,24	69,97	71,40	70,34	71,65	70,71	71,80	71,08	71,86
6	AMH	-	98,9	99,04	99,03	100,00	99,14	100,00	99,08	100,00	99,22
7	APK										
	-SD	-	104.70	111,28	100,58	111,38	106,97	111,48	114,83	111,58	100,00
	-SMP	-	79,60	122,11	96,58	122,21	122,66	122,31	105,89	122,41	100,00
	-SMU	-	68,70	105,35	98,71	105,45	106,03	105,55	99,88	105,65	100,00
8	APM										
	-SD	-	92,40	89,92	98,89	90,42	99,00	90,92	99,98	91,42	99,99
	-SMP	-	64,10	74,24	95,80	74,74	96,75	75,24	99,84	75,74	99,99
	-SMU	-	47,80	101,12	74,74	101,22	85,75	101,32	99,20	101,42	99,99
9	RLS (tahun)	-	8,70	8,40	8,92	9,00	9,15	9,10	9,30	9,20	9,38
10	LPE (%)	-	5,39	5,70	5,57	6,00	5,93*	6,30	6,23	6,50	6,64
11	Gini Ratio	-	0,159	0,200	0,163	0,200	0,191	0,200	0,200	0,200	0,200
12	Pendapatan Perkapita	-	6,192	5,645	5,575	6,222	8,724	6,874	10,433	7,643	11,323
13	Daya Beli Masyarakat	-	550.340	569.700	554.570	580.090	558.030	590.650	562.060	601.39	565.520
14	PAD (Rp. Milyar)	-	25,774	25,356	26,989	28,512	36,577	32,168	43,396	36,404	44,019
15	APBD (Rp. Milyar)	-	211,558	209,481	221,766	240,956	232,550	280,450	321,257	330,811	457,857
16	IPM	-	73,40	76,06	73,96	77,13	74,58	78,37	75,09	79,23	75,49

Sumber : BPS Kota Sukabumi 2007

*) Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sukabumi, 2007

2.6. Issue Strategis dan Tantangan Pembangunan

a. Issue Strategis

Dalam menentukan strategi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2008 – 2013 ada beberapa isu strategis yang berpengaruh. Isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Sukabumi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diantaranya adalah :

1. Pemanasan Global (*Global Warming*),

Akibat-akibat pemanasan global diantaranya adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Untuk mencegah dan mengurangi emisi gas karbondioksida dan efek rumah kaca mendorong lahirnya *Protokol Kyoto*. Dinegosiasikan di Kyoto Jepang pada Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Pebruari 2005, setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Upaya menghambat pemanasan global dapat dimulai dari skala kecil misalnya dengan menghemat pemakaian listrik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar di pembangkit-pembangkit listrik sebagai penyumbang emisi, serta skala besar antara lain melui kebijakan pemerintah kota yang lebih strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau kota.

2. Tingginya Harga Bahan Bakar Minyak

Tidak dapat dipungkiri kenaikan harga minyak dunia akan berdampak secara langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di dalamnya kondisi perekonomian Kota Sukabumi. Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia tersebut memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri yang berkisar antara 28 % - 30% berdasarkan asumsi saat RPJMD Kota

Sukabumi Tahun 2008 - 2013 ini disusun yang tentu akan mengakibatkan kenaikan harga-harga barang di pasaran karena biaya produksi yang juga ikut meningkat. Kondisi ini juga akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya daya saing sektor ekonomi masyarakat terutama UMKM. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi karena pada lima tahun ke depan dampak dari kenaikan BBM ini akan masih terasa di masyarakat. Selain itu dengan tingginya harga BBM, masyarakat, pemerintah dan sektor swasta Kota Sukabumi harus sudah mulai melakukan efisiensi dan penghematan energi serta harus mulai mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan akan energi.

3. *Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran*

Paradigma keberhasilan pembangunan dewasa ini tidak hanya diukur oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi semata, dimana pertumbuhan ekonomi yang merupakan fokus perhatian utama yang terus dipacu dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan bertampak kepada meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata justru tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terjadi adalah semakin lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan dan dampaknya mengakibatkan strata sosial di masyarakat semakin kentara antara masyarakat yang masih rendah dan masyarakat yang telah maju di tinjau dari berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu dengan adanya regulasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan aspek-aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga berpotensi untuk menaikkan jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam penanggulangan jangka menengah dan panjang hingga pada 20 tahun mendatang jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi diharapkan dapat terus ditekan dan secara bertahap dapat terpenuhi hak pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada saat ini masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, kebutuhan akan pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan merupakan tantangan ke depan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kota Sukabumi.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan adalah mendorong peran serta kelompok miskin untuk tetap terlibat secara aktif dalam proses pemecahan masalah kemiskinan dengan melakukan berbagai pendekatan yang partisipatif. Berbagai pendekatan tersebut digunakan dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari level paling rendah sampai di tingkat nasional walau terkadang semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari berbagai tekanan atau intervensi dari sponsor dalam negeri maupun luar negeri.

Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta

lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Oleh karenanya setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

4. *Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan*

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang tidak memadai lagi serta perlu disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945. Sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan juga dimaksudkan sebagai arah dan strategi pembangunan nasional bidang pendidikan.

Secara umum pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Namun demikian apabila dilihat dari sisi pemerataan pendidikan khususnya bagi penduduk perempuan masih relatif rendah dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya. Selain itu masih adanya keluhan biaya sekolah yang semakin tinggi yang semakin memberatkan masyarakat serta masih lemahnya daya saing lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja.

5. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat*

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi masyarakat yang akan bermuara pada kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatnya kualitas kesehatan sumberdaya manusianya diharapkan dapat meningkatkan produktifitasnya pula. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang masih melekat dalam pembangunan kesehatan diantaranya adalah rendahnya status kesehatan masyarakat miskin, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta penanggulangan penyakit menular.

6. *Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan,*

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik ada beberapa kondisi yang diharapkan, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi

hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pemerintahan di Kota Sukabumi adalah Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan. Selain itu dari sisi Sumber Daya Manusia permasalahan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

faktor globalisasi dan kemajuan teknologi informasi (*e-Government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat.

7. *Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang*

Pembangunan seringkali mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan bahkan membawa akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada gilirannya mengakibatkan bencana lingkungan. Berdasarkan perkembangan yang ada aspek penataan ruang diarahkan untuk memacu perkembangan kota, meningkatkan pelayanan sosial ekonomi terhadap masyarakat, mengatasi berbagai persoalan ruang dan pemeratakan pembangunan.

Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang saat ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkesinambungan. Tata ruang Kota Sukabumi sampai dengan saat ini masih dikatakan baik dan berkembang searah dengan perencanaan maupun yang tidak terencana. Namun demikian dalam kurun waktu 5 tahun kedepan pola pemanfaatan ruang Kota Sukabumi harus lebih efektif dan efisien karena akan menjadi semakin terbatasnya lahan yang ada di perkotaan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah Penegakan Hukum (*laws enforcement*) terhadap setiap pelanggaran dalam penggunaan lahan sehingga keseimbangan aktifitas dapat tetap dipertahankan.

8. **Masih Rendahnya Kinerja Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan merupakan sektor yang paling bertahan saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Sukabumi. Tahun 2006 tercatat ada 1.667 Industri yang berskala Kecil dan 22 Industri yang berskala Menengah dengan daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar yaitu sebanyak 10.079 orang dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. UMKM juga menyerap tenaga kerja perempuan yang relatif besar terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha jasa perdagangan, kerajinan, dan jasa boga. Kegiatan perekonomian di Kota Sukabumi juga didukung dengan adanya berbagai jenis koperasi. Menurut jenisnya koperasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu koperasi menurut lembaga dinas, koperasi menurut usaha komoditi dominan dan koperasi lainnya. Banyaknya koperasi aktif di Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2006 mencapai 323 buah dengan jumlah anggota mencapai 27.359 orang dari 323 koperasi 139 diantaranya dalam kondisi sehat dan jumlah modal sendiri sebesar Rp 17.682.102.000, modal luar sebesar Rp 20.923.931.000, dan aset sebesar Rp. 38.973.117.000,-. Namun demikian pada kenyataannya daya saing Koperasi dan UMKM ini masih lemah, hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- b. *Rendahnya produktivitas.* sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.
- c. *Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif.* Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena

pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

- d. *Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.* Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan.
- e. *Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.* Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia. Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya: (i) kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.
- f. *Kurang kondusifnya iklim usaha.* Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat. Disamping itu kesadaran

tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang. Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkauan hasil dan manfaat (*outreach impact*) yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarannya UMKM.

9. **Masih Rendahnya Investasi,**

Perkembangan perekonomian Kota Sukabumi dapat pula dilihat dari investasi yang ditanamkan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Investasi pemerintah dapat dilihat langsung dari jumlah pengeluaran pembangunan / belanja Publik / belanja langsung, sedangkan investasi swasta dan masyarakat dapat dilihat dari posisi kredit yang dikeluarkan oleh perbankan yang ada di Kota Sukabumi.

Dengan berkurangnya investasi yang dikucurkan akan mengakibatkan rendahnya kinerja ekonomi kota, meskipun modal kerja yang dikucurkan relatif stabil akan tetapi belum dapat menambah pendapatan masyarakat secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada pengeluaran pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder bukan didapat dari adanya pertambahan kegiatan ekonomi akan tetapi berasal dari pinjaman salah satunya dari penggunaan kredit untuk konsumsi, hal ini memperlihatkan adanya gejala pola hidup yang masih konsumtif dalam masyarakat Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam menyikapi kondisi masyarakat tersebut diatas perlu adanya program/kegiatan yang sinergi sehingga dapat menyatukan pandangan-pandangan, saling membahu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi Kota Sukabumi dengan demikian pergerakan ekonomi masyarakat tumbuh sejalan dengan berkurangnya posisi kredit konsumsi masyarakat dan diharapkan kondisi tersebut dapat terus meningkat agar dapat lebih menggairahkan perkembangan ekonomi kerakyatan Kota Sukabumi.

Permasalahan yang ada dalam aspek investasi di Kota Sukabumi diantaranya adalah :

a. *Kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur.*

Kurang bergairahnya iklim investasi disebabkan oleh keterbatasan dari daya saing produksi (*supply side*) dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur karena sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis. Pengembangan manufaktur yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih relatif rendahnya kemampuan SDM tenaga kerjanya memiliki implikasi yang tidak ringan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi yang pada gilirannya dapat memperburuk daya saing produk-produknya.

b. *Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas*

Terbatasnya kemampuan SDM dan kecilnya akses kepada informasi pasar dan sumber pembiayaan pada UKM ekspor masih tetap merupakan problema pokok UKM yang sangat memberatkan di dalam menghasilkan produk yang memenuhi kuantitas pemesanan dan kualitas yang konsisten dengan standar teknisnya.

c. *Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur*

Dengan Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, dan manajemen transportasi baik internal Kota Sukabumi maupun eksternal akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Sukabumi, dengan belum terselesaikannya beberapa agenda yang berkaitan dengan aspek transportasi dalam Kota Sukabumi seperti penyelesaian jalan lingkar selatan Sukabumi dan relokasi terminal serta adanya simpul-simpul kemacetan pada ruas jalan yang menuju Kota Sukabumi akan turut mempengaruhi minat investasi.

d. *Prosedur perijinan investasi yang belum memenuhi kebutuhan investor*

Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

b. **Tantangan**

Aspek Perekonomian

Tantangan di masa 5 (lima) tahun ke depan aspek ekonomi diantaranya

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran,
2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi manajemen asset daerah dan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari BUMD maupun pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan,
3. Peningkatan kualitas (*skill*) SDM tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar-pasar kerja,
4. Peningkatan investasi dalam upaya mendukung perekonomian Kota Sukabumi serta memperluas kesempatan kerja,
5. Pengembangan sektor UMKM yang diharapkan dapat menjadi daya dorong ekonomi rakyat, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan inovasi produksinya.
6. Bagaimana seluruh perusahaan memiliki TDP dan SIUP sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berlanjut maupun melalui upaya penegakan aturan (Perda).
7. Dilihat dari sisi spasial (keruangan), sudah saatnya ada penyebaran aktifitas perdagangan dari pusat kota sekarang ke wilayah-wilayah bagian selatan kota karena kondisinya sudah jenuh dan daya dukung lingkungan fisiknya sudah mulai mengalami penurunan akibat kemacetan, limbah dan persampahan dan lainnya. Apabila disebar ke wilayah-wilayah bagian selatan kota tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Aspek Sosial Budaya Daerah

Ketenagakerjaan

Tantangan aspek ketenagakerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan

kualitas (*skill*) SDM tenaga kerja Kota Sukabumi sehingga mampu bersaing di pasar-pasar kerja. Selain itu memperluas kesempatan kerja melalui sektor-sektor perekonomian Kota Sukabumi terutama sektor-sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Kependudukan

Tantangan aspek kependudukan pada 5 (lima) tahun ke depan adalah menciptakan penduduk yang seimbang dalam rangka menciptakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah usia non produktif, serta upaya menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing, dan kesejahteraannya, selain itu bagaimana jumlah penduduk yang ada di Kota Sukabumi dapat dipenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Keagamaan

Tantangan pembangunan aspek keagamaan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah mewujudkan kualitas kehidupan bergama yang dapat menciptakan harmonisasi dan kerukunan hidup inter dan antar umat bergama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pendidikan

Tantangan aspek pendidikan terletak pada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik kualitas manajemen maupun sarana dan prasarana pendidikan, selain itu tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pendidikan adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.

Kesehatan

Tantangan aspek kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah pada pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemberian akses/kemudahan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang didukung oleh manajemen kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel dan ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat baik pada waktu sakit maupun untuk konsultasi mengenai kesehatannya, selain itu mengendalikan penanganan akibat penyakit menular (HIV-AIDS, Tb Paru, DBD), meningkatnya penyakit degeneratif dan penyalagunaan NAPZA serta teknologi di bidang kesehatan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tantangan aspek pemberdayaan perempuan diantaranya adalah peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi, penurunan *trafficking*, serta penurunan tindak diskriminasi perempuan dalam dunia usaha dan politik

Pemuda Dan Olah Raga

Tantangan aspek kepemudaan adalah meningkatkan kualitas pemuda sehingga terbentuk generasi muda yang tangguh dan dapat memberikan

kontribusi yang optimal kepada pembangunan Kota Sukabumi, sedangkan tantangan dalam bidang olah raga adalah peningkatan prestasi olah raga dan memasyarakatkan olah raga diantaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Seni dan Budaya

Tantangan aspek seni dan budaya adalah kondisi pengaruh globalisasi dunia yang harus disikapi dengan bijaksana dan upaya kongkrit yang berkesinambungan dalam pelestarian nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal masyarakat Kota Sukabumi

Pariwisata

Tantangan sektor pariwisata adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Sukabumi sehingga tingkat hunian kamar dan jumlah wisatawan dapat bertambah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi alam yang ada seperti kawasan Cikundul untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata terintegrasi dengan konsep wisata alam (pemandian air panas), wisata pertanian (hortikultura dan peternakan) dan bumi perkemahan.

Kesejahteraan Sosial

Tantangan aspek kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tahun 2008 – 2013 ke depan adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pemberdayaan masyarakat akibat dari dampak sosial perekonomian yang semakin berat.

Penataan Ruang

Tantangan aspek penataan ruang adalah konsistensi antara perencanaan dengan implementasi penggunaan ruang yang ada sehingga tata ruang sesuai dengan peruntukannya, selain itu penerapan strategi *bipolar* terutama menempatkan aktifitas yang diharapkan dapat menstimulan pertumbuhan wilayah selatan Kota Sukabumi (Bacile).

Sarana Dan Prasarana Daerah

1. Dengan bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang memenuhi syarat dan berkualitas,
2. Konsistensi antara perencanaan dengan implementasi penggunaan ruang yang ada sehingga tata ruang sesuai dengan peruntukannya, untuk itu diperlukan pengaturan zona (*Zoning Regulation*) yang mempunyai dasar hukum yang kuat,
3. Penerapan strategi *bipolar* terutama menempatkan aktifitas yang diharapkan dapat menstimulan pertumbuhan wilayah selatan Kota Sukabumi (Bacile).
4. Penyelesaian jalan lingkar untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di pusat kota dan menstimulan pertumbuhan di wilayah yang dilalui,
5. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum Kota Sukabumi, dengan volume pemberangkatan yang sangat padat dan lokasi terminal yang ada sekarang berada di wilayah yang padat penduduk dan arus lalu lintasnya, relokasi terminal ke wilayah selatan merupakan suatu keharusan. Selain itu dengan volume kendaraan pribadi dan jumlah kendaraan angkutan umum yang tinggi belum dibarengi oleh penambahan panjang ruas jalan

sehingga terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan, untuk itu perlu adanya manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga dampak dari permasalahan tersebut dapat diatasi.

6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang efektif, efisien dan aman,
7. peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada penyediaan ruas-ruas jalan beserta fasilitas pendukungnya yang humanistik,
8. meningkatkan upaya penghematan penggunaan listrik karena listrik berkaitan erat dengan energi lain yaitu bahan bakar minyak yang kondisinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami krisis terutama semakin tingginya harga minyak untuk bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu penggunaan listrik dan produksi listrik lebih banyak penggunaan listrik juga menuntut kita untuk melakukan penghematan.
9. Pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan menyediakan TPS Terpadu untuk mereduksi jumlah volume sampah ke TPA yang umur pakainya diperkirakan akhir tahun 2013 sudah habis mas pakainya,
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, hal ini masih terlihat adanya kebiasaan membuang sampah ke badan sungai, membuang sampah tidak tepat waktu dan tepat lokasi,

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 5 tahun ke depan diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan dalam rangka terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar lingkungan,
2. Masih sedikitnya ruang terbuka hijau yang dimiliki serta belum adanya hutan kota,

Pemerintahan Umum

Tantangan aspek pemerintahan pada kurun waktu 2008 – 2013 diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur,
2. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*,
3. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar

2.7. Skenario Pembangunan 2008 – 2013

a. Skenario Aspek Perekonomian (Menciptakan Masyarakat Kota Sukabumi Yang Sejahtera)

Pengembangan UMKM dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM, fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pasar baik melalui teknologi informasi maupun ekspo sehingga UMKM dapat memiliki tingkat produktifitas tinggi dan berdaya saing dan dapat memperluas kesempatan kerja, sector pertanian didorong untuk mengarah pada agribisnis dengan bertumpu upaya

pemberian nilai tambah pada komoditi-komoditi pertanian dan memperluas jaringan pasar, optimalisasi infrastruktur pendukung dengan menyelesaikan jalan lingkar yang didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. Perkoperasian akan ditingkatkan perannya dengan upaya peningkatan kualitas manajemen dan kemampuan modal. Sektor industri diarahkan untuk meningkatkan peran IKM yang didukung oleh kemitraan antar industri, sector jasa, sector pengangkutan dan telekomunikasi didorong untuk tumbuh lebih pesat lagi dengan melalui peningkatan kelancaran distribusi barang dan pergerakan orang, hal ini akan didukung oleh terbangunnya terminal type A dan pusat pergudangan di wilayah selatan.

Skenario untuk keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Sukabumi.
- 2 Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2008 - 2013.
- 3 Kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh pada saat perencanaan disusun berjalan normal tanpa ada gejolak atau fluktuasi perubahan yang signifikan.

b. Skenario Aspek Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan

Diarahkan pada pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan peran program KB serta menciptakan penduduk yang seimbang dalam rangka menciptakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah usia non produktif. Untuk aspek ketenagakerjaan dititik beratkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja, memberikan pelatihan keterampilan yang disertai dengan upaya membangun jiwa wirausaha, kemampuan manajemen usaha serta harmonisasi kerja yang ditandai dengan menurunnya angka sengketa perburuhan, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan daya tarik investasi yang diharapkan dapat menambah kesempatan kerja.

c. Skenario Pembangunan Pendidikan (Menciptakan Masyarakat Kota Sukabumi Yang Cerdas)

Pembangunan pendidikan dilakukan dengan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, memberikan beasiswa pada pelajar yang kurang mampu, penambahan sekolah kejuruan (SMK) dengan kompetensi tertentu yang diperlukan oleh pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan kualitas kurikulum yang berbasis kompetensi dan Iptek serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Peningkatan PAUD dengan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasaran pendukung serta tenaga pengajarnya.

d. Skenario Pembangunan Kesehatan (Menciptakan Masyarakat Kota Sukabumi Yang Sehat)

Pembangunan aspek kesehatan ditujukan untuk memperluas akses masyarakat ke pelayanan-pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan penyuluh kesehatan, perasional bagi posyandu-posbindu, peningkatan pengetahuan tentang penyakit menular dan pencegahannya, mengoptimalkan peran BNK dan KPDA dalam penanggulangan bahaya narkoba dan HIV AIDS, perluasan pelayanan bagi ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak. Meningkatkan peran unit-unit kesehatan sekolah dalam pembinaan kesehatan kepada para siswa sekolah.

e. Skenario Pembangunan Aspek Aparatur dan Pemerintahan

Dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan teknis maupun penjenjangan (DIII, S1, S2 dan S3), meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran melalui peningkatan peran SKPD pengawasan, penerbitan Raperda dan produk hukum daerah lainnya yang menunjang otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Melakukan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga mampu untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal. Kemampuan keuangan daerah didorong melalui optimalisasi dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah serta manajemen asset pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

f. Skenario Penataan Ruang dan Pembangunan Lingkungan Hidup

Berdasarkan arah kebijakan kewilayahan provinsi Jawa Barat yang mengarahkan pembangunan perkotaan menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan dan Kota Sukabumi bersama dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Andalan Pembangunan Jawa Barat menempatkan Kota Sukabumi harus dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi dari wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang memang selama ini peran tersebut telah dijalankan oleh Kota Sukabumi. Namun demikian upaya pemberian nilai tambah bagi perekonomian Kota Sukabumi melalui peran tersebut harus dioptimalkan diantaranya melalui pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, perbaikan regulasi investasi dan kerjasama antara Kota Sukabumi dengan wilayah hinterlandnya.

Untuk itu kebijakan penataan ruang Kota Sukabumi diarahkan pada konsep *bipolar* untuk menyeimbangkan bagian utara dengan bagian selatan wilayah Kota Sukabumi yang masih kurang aktifitas ekonominya. Dengan penyelesaian jalan lingkar Kota Sukabumi dan pembangunan terminal type A diharapkan akan terjadi peningkatan aktifitas dan menciptakan *multiplier effect* bagi perkembangan wilayah.

Pembangunan di bidang lingkungan hidup diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi penggunaan ruang, pembangunan taman kota dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Selain itu dilakukan peningkatan kesadaran lingkungan kepada masyarakat dan upaya pengendalian

pencemaran lingkungan melalui program-program yang bersifat pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

2.8. Kondisi Yang Diinginkan Pada Akhir Tahun 2013

Dengan beberapa skenario diatas, diharapkan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai kondisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kondisi Kependudukan

Pada akhir Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Sukabumi diperkirakan mencapai 317.696 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2013 diperkirakan sebesar 2,27%, kondisi isi harus diimbangi dengan penyediaan kebutuhan infrastruktur, pangan dan kesejahteraannya. Apabila dilihat dari komposisinya, komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan terjadi pergeseran menjadi bertambahnya komposisi struktur umur produktif.

Tabel 2.53.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sukabumi 2008 - 2013

NO	TAHUN	Target RPJMD
1	2007	2.41%
2	2008	2.39%
3	2009	2.37%
4	2010	2.34%
5	2011	2.32%
6	2012	2.30%
7	2013	2.27%

Sumber : Hasil Analisis

Seiring dengan bertambahnya Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Sukabumi yang berarti adanya penambahan jumlah Usia Lanjut, harus diimbangi oleh penyediaan infrastruktur pendukungnya seperti panti jompo dan lain-lain.

a. **Kondisi Perekonomian Daerah**

Kondisi Perekonomian Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diprediksikan akan mengalami tekanan yang berat, salah satunya adalah dampak dari regulasi kenaikan BBM yang mencapai 28.7%. Kondisi ini akan berdampak sangat luas terutama menurunnya Daya Beli masyarakat dan berpeluang untuk menaikkan inflasi. Namun demikian upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif harus terus diupayakan disamping meningkatkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin ke pelayanan-pelayanan publik.

Kondisi Makro Ekonomi

Peningkatan Ekonomi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi seluruh unsur pelaku pembangunan yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pembangunan Ekonomi yang dinamis, saling mengimbangi akan ditentukan oleh intensitas dan kualitas interaksi diantaranya ketiganya. Dengan tiga elemen ini alokasi sumber daya diharapkan akan efektif dan terarah sehingga keunggulan bersaing daerah dapat dibangun sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kondisi yang diharapkan untuk aspek perekonomian yang paling utama adalah mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi yang positif sambil menekan Laju Inflasi. Pada akhir tahun 2013 diharapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat mencapai 7% - 7,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54.

Proyeksi LPE Kota Sukabumi 2008 - 2013

NO	TAHUN	LPE (%)	
		Target RPJMD	Target Renstra
1	2007	6.64	6.50
2	2008	6.71	6.71
3	2009	6.82	
4	2010	6.94	
5	2011	7.05	
6	2012	7.17	
7	2013	7.30	

Sumber : Hasil Analisis

Kontribusi sektor terhadap PDRB, diharapkan masih diperoleh dari sektor-sektor tersier yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant, sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.55.

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		PROYEKSI					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian, Pertenakan, Kehutanan						
	Perkebunan dan Perikanan	71,727.69	72,423.45	73,125.96	73,835.28	74,551.48	75,274.63
2	Pertambangan dan Penggalian	115.96	117.58	119.23	120.90	122.59	124.31
3	Industri Pengolahan	98,240.45	109,636.35	122,354.16	136,547.24	152,386.73	170,063.59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	23,178.93	25,774.97	28,661.76	31,871.88	35,441.53	39,410.98
5	Bangunan	106,277.16	114,035.40	122,359.98	131,292.26	140,876.59	151,160.58
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	734,518.85	786,669.69	842,523.24	902,342.39	966,408.70	1,035,023.72
7	Pengangkutan dan komunikasi	292,144.75	315,224.19	340,126.90	366,996.92	395,989.68	427,272.87
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	154,825.78	168,760.10	183,948.51	200,503.88	218,549.22	238,218.65
9	Jasa-jasa	246,618.38	262,648.57	279,720.73	297,902.57	317,266.24	337,888.55
	PDRB KOTA SUKABUMI	1,727,647.96	1,855,290.30	1,992,940.47	2,141,413.33	2,301,592.78	2,474,437.88

Sumber : Hasil Analisis

Demikian pula halnya PDRB per kapita meskipun dalam kondisi ekonomi yang melemah diharapkan akan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, adapun proyeksi PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56.

Proyeksi PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

NO	TAHUN	Target RPJMD
1	2007	11,323,000.00
2	2008	11,662,690.00
3	2009	12,012,570.70
4	2010	12,372,947.82
5	2011	12,744,136.26
6	2012	13,126,460.34
7	2013	13,520,254.15

Sumber : Hasil Analisis

- **Sektor Pertanian**
 - b. Terpenuhinya kebutuhan terhadap beras yang diperkirakan sebanyak 10.506,51 ton pada tahun 2013.

Tabel 2.57.

Perkiraan Kebutuhan Beras Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERKIRAAN KEBUTUHAN BERAS (Ton)
2006	274,436	9,075.86
2007	280,143	9,264.60
2008	282,944	9,357.23
2009	289,706	9,580.85
2010	296,572	9,807.92
2011	303,512	10,037.43
2012	310,554	10,270.32
2013	317,696	10,506.51

Sumber : Hasil Analisis

Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, kebutuhan tersebut ditunjang oleh pasokan dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang dan lain-lain

- c. Terpenuhinya kebutuhan jumlah ternak yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Sukabumi adalah sebanyak 17.968 ekor yang terdiri dari 5.874 ekor sapi, 2.989 ekor kerbau dan 9.105 ekor kambing/domba

Tabel 2.58.

Perkiraan Kebutuhan Ternak Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERKIRAAN KEBUTUHAN TERNAK (ekor)	SAPI (ekor)	KERBAU (ekor)	KAMBING/D OMBIA (ekor)
2006	274,436	16,724	5,467	2,782	8,475
2007	280,143	16,896	5,523	2,811	8,562
2008	282,944	17,070	5,580	2,840	8,650
2009	285,774	17,246	5,638	2,869	8,740
2010	288,632	17,424	5,696	2,898	8,830
2011	291,518	17,603	5,754	2,928	8,921
2012	294,433	17,785	5,814	2,958	9,012
2013	297,377	17,968	5,874	2,989	9,105

Sumber : Hasil Analisis

- **Sektor Industri Pengolahan**
 - a. Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan diharapkan rata-rata mencapai 7% - 11%,
 - b. Pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 3.302 orang pekerja diharapkan pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak ± 3.533 orang pekerja,
 - c. Bertambahnya jumlah perusahaan pada sektor industri.
- **Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih**
 - a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan energi listrik sebesar 1.182.375.355 VA,
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih menjadi 70%.

c. Terpenuhinya kebutuhan sambungan telepon masyarakat sebanyak 364.446 sambungan,

- **Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki SIUP dari 6,01 % pada tahun 2006 menjadi 10% pada tahun 2013,

Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari 208 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 199 perusahaan pada tahun 2006 naik 100% artinya seluruh perusahaan memiliki Tanda Daftar Perusahaan.

- **Sektor Pengangkutan, Komunikasi dan Pariwisata**

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada penumpang umum seiring dengan terbangunnya fasilitas terminal type A,

Fasilitas sudah masuk ke kawasan-kawasan permukiman dengan kualitas pelayanan yang semakin meningkat,

Untuk sektor pariwisata di Kota Sukabumi jumlah tamu yang menginap pada tahun 2006 adalah sebanyak 88.618 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 221 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 88.397 orang. Jumlah tamu tersebut menurun sebesar 1,01% jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang jumlahnya mencapai 89.521 orang. Pada Tahun 2013 diharapkan kembali meningkat sebesar 5% - 7%.

Terwujudnya kawasan wisata terintegrasi Cikundul,

- **Sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan**

Industri perbankan, besarnya simpanan dana pihak ketiga yang ada di bank-bank Kota Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 24,75% dari Rp. 1,433 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 1,788 milyar pada tahun 2006 dan diharapkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 35% dari Rp. 1,788 milyar menjadi Rp. 2,4 milyar.

Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dari 139 koperasi menjadi 166 koperasi pada tahun 2013,

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Sukabumi. Pada tahun 2013 jumlah usahanya akan naik 5% - 8% dengan jumlah penyerapan tenaga kerja naik 7% - 8%.

Semakin menguatnya peran lembaga keuangan non bank dalam menyalurkan kredit usaha kepada UMKM disamping peran perbankan yang semakin mudah diakses oleh UMKM melalui skema kredit yang mudah.

Kondisi Investasi

Dengan melemahnya kondisi perekonomian Kota Sukabumi selama kurun waktu 2008 – 2010 akibat kenaikan harga BBM dan diharapkan akan membaik pada kurun waktu 2011 – 2013, kebutuhan investasi yang masuk ke Kota Sukabumi baik PMA maupun PMDN non Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59.

**Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dan Kebutuhan Investasi
Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	PDRB (t-1)	r	I C O R	KEBUTUHAN INVESTASI
1					
2	2005	1,420,505,390,000	6%	2.50	199,364,944,922
3	2006	1,509,018,710,000	6%	2.5	221,283,300,000
4	2007	1,609,262,090,000	7%	2.5	281,620,865,750
5	2008	1,727,647,962,114	7%	2.5	295,964,680,285
6	2009	1,855,290,298,338	7%	2.5	319,105,840,560
7	2010	1,992,940,473,564	7%	2.5	344,125,438,066
8	2011	2,141,413,331,753	7%	2.5	371,182,145,472
9	2012	2,301,592,775,473	7%	2.5	400,448,609,301
10	2013	2,474,437,882,672	7%	2.5	432,112,767,997
			Kebutuhan Investasi 2008 - 2013		2,162,939,481,680

Sumber : Hasil Analisis

**c. Kondisi Sosial Budaya Daerah
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan (IPM) dan Indeks
Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat pembangunan manusia di tiap-tiap negara termasuk Indonesia. Kota Sukabumi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan IPM ini sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia. Dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2013 target IPM Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60.

**Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Tahun 2008 - 2013**

TAHUN	AHH	AMH	RLS	DB	IND.KES	IND.AMH	IND.RLS	IND. PEND	IND.DY BL	IPM
2007	71.82	99.27	9.34	565.520	78.03	99.27	62.27	86.94	61.36	75.49
2008	72.18	99.37	9.67	566.651	78.63	99.37	64.45	87.73	61.62	75.99
2009	72.54	99.47	10.01	567.784	79.23	99.47	66.70	88.55	61.88	76.55
2010	72.90	99.57	10.36	568.920	79.84	99.57	69.04	89.39	62.15	77.13
2011	73.27	99.67	10.72	570.058	80.45	99.67	71.45	90.26	62.41	77.71
2012	73.63	99.77	11.09	571.198	81.06	99.77	73.95	91.16	62.67	78.30
2013	73.67	100.00	12.00	572.340	81.12	100.00	80.00	93.33	62.94	79.13

Sumber : Hasil Analisis

Melihat pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2006 baru mencapai 60.36 point sedangkan IPM sudah mencapai 75.09 point, pada 5 (lima) tahun kedepan diharapkan pencapaian IPG tidak jauh berbeda dengan pencapaian IPM, dengan demikian harus ada upaya akselerasi untuk mencapai IPG agar sejajar dengan pencapaian IPM.

Aspek Pendidikan

Melihat pencapaian indikator pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan kondisi yang cukup menggembirakan, namun demikian upaya untuk lebih meningkatkan lagi diarahkan pada target sebagai berikut :

Tabel 2.61.**Proyeksi Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	Target RPJMD
1	2008	99.37
2	2009	99.47
3	2010	99.57
4	2011	99.67
5	2012	99.77
6	2013	99.87

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.62.**Proyeksi Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	Target RPJMD
1	2008	9.67
2	2009	10.01
3	2010	10.36
4	2011	10.72
5	2012	11.09
6	2013	11.48

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.63.**Proyeksi Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	APK							
	-SD	115.98	116.56	117.14	117.73	118.32	118.91	119.50
	-SMP	106.95	107.49	108.02	108.56	109.11	109.65	110.20
	-SMU	103.39	104.89	105.40	105.93	106.91	107.43	108.95
2	APM							
	-SD	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
	-SMP	99.93	99.94	99.95	99.96	99.97	99.98	99.99
	-SMU	99.10	99.15	99.20	99.25	99.50	99.75	99.98

Sumber : Hasil Analisis

Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan juga mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Sukabumi, terutama menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, sehingga pada akhir tahun 2013 diharapkan dapat mencapai target-target berikut :

Tabel 2.64.**Proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH)
Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	AHH	
		Target RPJMD	Target Renstra
1	2008	72.18	71.46
2	2009	72.54	
3	2010	72.90	
4	2011	73.27	
5	2012	73.63	
6	2013	73.67	

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.65.**Proyeksi Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	AKB	
		Target RPJMD	Target Renstra
1	2008	30.68	15.2
2	2009	29.91	
3	2010	29.16	
4	2011	28.43	
5	2012	27.72	
6	2013	27.03	

Sumber : Hasil Analisis

Aspek Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting, dimana aspek ini menyangkut pendapatan dan ekspresi diri masyarakat. Untuk itu dalam 5 (lima) tahun kedepan perluasan dan pengembangan lapangan kerja menjadi strategis selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Target aspek ketenagakerjaan terdiri dari :

Tabel 2.66.**Proyeksi Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK / %)
Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

NO	TAHUN	Target
1	2008	45.54
2	2009	45.56
3	2010	45.59
4	2011	45.62
5	2012	45.65
6	2013	45.71

Sumber : Hasil Analisis

Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada Memperkuat peran serta masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat penyandang cacat dan perlindungan masyarakat lanjut usia yang ditandai dengan semakin membaiknya kualitas hidup dan pelayanan sosial dasar, selain itu juga

diarahkan pada penanggulangan, angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan pada angka yang tidak lebih dari 63.000 jiwa atau 19.73% dari jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 317.696 jiwa pada akhir tahun 2013.

Aspek Keagamaan, Pemuda dan Budaya

Pada akhir tahun 2013 diharapkan pembangunan aspek keagamaan dapat menciptakan semakin berkualitasnya kehidupan beragama di masyarakat, dan meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan. Untuk aspek kepemudaan diharapkan semakin dinamisnya kegiatan kepemudaan yang dapat mendukung upaya pembangunan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk aspek Budaya diharapkan semakin tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal.

d. Kondisi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Daerah

Kondisi Penataan Ruang

- Penataan ruang diarahkan pada pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, selain itu kebijakan penataan ruang yang disarankan dari hasil evaluasi terhadap RTRW Kota Sukabumi Tahun 2002 – 2011 adalah mengarah pada konsep *Bipolar*, dimana pemerataan aktifitas dan pengembangan antara Utara – Selatan menjadi tujuan utama sehingga dapat dicapai pola pemanfaatan ruang yang seimbang.
- Tersusunnya *zoning regulation* untuk menciptakan tata ruang yang efisien dan efektif dengan dasar hukum yang jelas. Dengan tersusunnya zoning regulation yang juga merupakan amanat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, zoning regulation diharapkan dapat menjadi alat operasional untuk melengkapi perangkat aturan pada skala blok sehingga pemanfaatan ruang pada tiap tingkatan berjalan sesuai dengan rencana.

Kondisi Sarana Prasarana Daerah

- Percepatan pembangunan Aspek sarana dan prasarana daerah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan tahun 2008 – 2013. Untuk sarana prasarana perhubungan diharapkan pada akhir tahun 2013 dapat terbangun jalan tembus Otista – Pembangunan sepanjang 3 kilometer, terselesaikannya pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi sepanjang 19 kilometer serta pembangunan Terminal Type A.
- Untuk meningkatkan daya dukung lingkungan kota, diharapkan pada akhir tahun 2013 dapat tercipta Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 7 kecamatan yang meliputi :
 - a. Taman Kota (± 2 ha),
 - b. Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman (± 4 ha),
 - c. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial (± 6 ha),
 - d. Taman Hutan Kota (± 5 ha),
 - e. Lapangan Olah Raga pada tiap kecamatan (total ± 3 ha),
 - f. Lapangan Upacara (± 2 ha).
- Dalam pengelolaan persampahan, volume timbulan sampah pada periode tahun 2008–2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang diperkirakan akan naik 3% - 5% seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada Tahun 2013 jumlah volume sampah

diperkirakan akan mencapai 902.79 m³/hari, sedangkan volume sampah yang terangkut diharapkan mencapai 85% - 90% atau sekitar 812.51 m³/hari. Kondisi demikian tentu saja akan membebani TPA yang dimiliki yang pada akhir tahun 2013 telah habis masa pakainya,

- Selain itu untuk mengatasi masalah persampahan diharapkan pada akhir tahun 2013 telah dapat terbangun 15 TPS Terpadu (TPST) di 15 lokasi serta diterapkannya konsep *Reduce*, *Recycle* dan *Reuse*, sehingga dengan demikian volume sampah yang masuk ke TPA akan berkurang,
- Pada periode tahun 2008 – 2013 secara bertahap akan melakukan penambahan luas TPA,
- Penataan kawasan permukiman kumuh juga akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2008–2013 diantaranya di kawasan Cijangkar, kawasan Karang Tengah dan kawasan Babakan.
- Selain itu dilakukan penataan kembali Eks Terminal Cikondang dan Sub Terminal Bungbulang serta Pasar Seni pada akhir tahun 2013 telah dapat diselesaikan.
- Penataan kawasan wisata air panas Cikundul yang terintegrasi dengan bumi perkemahan dan agrowisata,
- Pembangunan gedung Balai Diklat Daerah, serta
- Penyusun dokumen-dokumen perencanaan wilayah (RTRW, RDTRK) dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- Prasarana Air Minum pada akhir tahun 2013 diharapkan sudah dapat melayani pelanggan dengan peningkatan sebanyak 10%, dari 8.45% pada tahun 2005.
- Pasar Induk dan pergudangan di wilayah selatan,
- Sarana Olah Raga Indoor dan lapangan olah raga di kecamatan-kecamatan untuk mewadahi aktifitas masyarakat,
- Kelengkapan sarana pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional,
- Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pada akhir tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 317.696 jiwa, kebutuhan akan perumahan diperkirakan akan mencapai ± 34.000 unit rumah dapat terpenuhi.

e. Kondisi Pemerintahan Umum

- Pada akhir periode perencanaan tahun 2008 – 2013 kondisi aspek Pemerintahan umum diharapkan sudah dapat mewujudkan suatu kondisi diantaranya adalah meningkatnya kapasitas SDM Aparatur, tertatanya kelembagaan yang efektif dan efisien , meningkatnya kapasitas keuangan daerah, meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga semakin menurunnya jumlah KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur, tertatanya peraturan perundang-undangan, meningkatnya kesadaran hukum,
- Pelayanan publik yang didukung teknologi informasi semakin berkembang dengan semakin meningkatnya jumlah SKPD dan Kelurahan yang telah akses internet, sehingga pelayanan kepada

masyarakat akan semakin tepat waktu, lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat,

- Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2013 sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan standar kelayakan,
- Meningkatnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik, sehingga tingkat kepatuhan hukum dapat diwujudkan dengan ditandai oleh menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Perda,
- Meningkatnya kerjasama baik regional, nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan,
- Meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan.

f. Kondisi Keuangan Daerah
Pendapatan Daerah

- Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2% - 3%. Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 79,71 % untuk Dana Perimbangan dan sekitar 12,25 % untuk PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 8,05 %.
- Meningkatnya pendapatan daerah terutama dari sektor Pajak Daerah dan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Tabel 2.67.

Proyeksi Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2014

TAHUN	PAD	%	DANA PERIMBANG.	%	LAIN2 PEND.YANG SAH	%	APBD	%
2008	52,184,455,000		332,093,704,000	-	33,361,814,000		477,169,632,000	
2009	53,319,776,000	2.13	355,340,263,280	7.00	36,697,995,400	7.00	524,886,595,200	10.00
2010	54,455,487,229	2.13	380,214,081,710	7.00	44,374,231,990	7.00	577,375,254,720	10.00
2011	55,615,389,107	2.13	406,829,067,429	7.00	48,811,655,189	7.00	635,112,780,192	10.00
2012	56,799,996,895	2.13	435,307,102,149	7.00	53,692,820,708	7.00	698,624,058,211	10.00
2013	58,009,836,829	2.13	465,778,599,300	7.00	59,062,102,779	7.00	768,486,464,032	10.00

Sumber : Dispenda Kota Sukabumi, 2007

Belanja Daerah

Belanja daerah sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh Belanja Langsung sekitar 60% - 70%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10% yang diseimbangkan dengan jumlah pendapatan.

Tabel 2.68.

Proyeksi Belanja Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2014

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	%	BELANJA LANGSUNG	%	TOTAL
1	2	3	4	5	6
2008	218,914,810,000.00	10	258,254,822,000.00	10	477,169,632,000.00
2009	240,806,291,000.00	10	284,080,304,200.00	10	524,886,595,200.00
2010	264,886,920,100.00	10	312,488,334,620.00	10	577,375,254,720.00
2011	291,375,612,110.00	10	343,737,168,082.00	10	635,112,780,192.00
2012	320,513,173,321.00	10	378,110,884,890.20	10	698,624,058,211.20
2013	352,564,490,653.10	10	415,921,973,379.22	10	768,486,464,032.32
2014	387,820,939,718.41	10	457,514,170,717.14	10	845,335,110,435.55

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Sukabumi, 2007

Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9% - 10%, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9% - 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah seimbang dengan perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran tidak lebih dari 2% - 4%.

Tabel 2.69.
Target Indikator Makro Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013

No	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1.	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi							
a.	Jumlah Penduduk	282,944	289,706	296,572	303,512	310,554	317,696	324,908
b.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP / %)	2.39	2.37	2.34	2.32	2.30	2.27	2.25
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE / %)	6.71	6.76	6.83	6.90	6.96	7.03	7.10
d.	Inflasi (%) Asumsi	6.09	6.27	6.46	6.62	6.79	6.98	6.91
e.	Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
f.	Pendapatan Perkapita (Rp.) / tahun	11,662,690	12,012,571	12,372,948	12,744,136	13,126,460	13,520,254	13,925,862
g.	Daya Beli (Rp.ribu) per jiwa / bulan	566.651	567.784	568.920	570.058	571.198	572.340	573.485
2.	Kesejahteraan Sosial							
	Pendidikan							
a.	Angka Melek Huruf (AMH / %)	99.37	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	100.00
b.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS / tahun)	9.67	10.01	10.36	10.72	11.09	12.00	11.88
c.	Angka Partisipasi Murni (APM / tahun)							
	- SD / MI / Paket A	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
	- SMP / MTs / Paket B	99.93	99.94	99.95	99.96	99.97	99.98	99.99
	- SMU / MA / Paket C	99.10	99.15	99.20	99.25	99.50	99.75	99.98
d.	Angka Partisipasi Kasar (APK / tahun)							
	- SD / MI / Paket A	115.98	116.56	117.14	117.73	118.32	118.91	119.50
	- SMP / MTs / Paket B	106.95	107.49	108.02	108.56	109.11	109.65	110.20
	- SMU / MA / Paket C	102.88	103.39	104.89	105.40	106.91	107.43	108.95
3.	Kesehatan							
a.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH / tahun)	72.18	72.54	72.90	73.27	73.63	73.67	73.74
b.	Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 kelahiran hidup)	30.68	29.91	29.16	28.43	27.72	27.03	26.35
4.	Kemiskinan							
a.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	67,610	66,596	65,597	64,613	63,644	62,689	61,749
a.	Persentase Penduduk Miskin (%)	23.90%	22.99%	22.12%	21.29%	20.49%	19.73%	19.01%
5.	Ketenaga Kerjaan							
a.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	45.54	45.56	45.59	45.62	45.65	45.71	45.75
6.	Keuangan Daerah							
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52,184,455,000	53,319,776,000	54,455,487,229	55,615,389,107	56,799,996,895	58,009,836,829	59,245,446,353
b.	Dana Perimbangan	332,093,704,000	355,340,263,280	380,214,081,710	406,829,067,429	435,307,102,149	465,778,599,300	498,383,101,251
c.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	33,361,814,000	36,697,995,400	40,367,794,940	44,404,574,434	48,845,031,877	53,729,535,065	59,102,488,572
d.	APBD	478,572,641,000	493,455,000,000	508,357,341,000	523,709,732,698	539,525,766,626	555,819,444,778	572,605,192,010
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.99	76.55	77.13	77.71	78.30	79.13	79.17

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi dan Misi Walikota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

Visi Walikota Sukabumi

Berdasarkan kondisi Kota Sukabumi pada saat ini, tantangan dan issue strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang termuat dalam RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 yaitu:

"TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA ", dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya.
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas.
4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah.
6. Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Nyaman dan Indah.

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008 – 2013 mempunyai visi sebagai berikut :

"DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) "

Pemerintahan yang amanah dan berparadigma surgawi mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan memiliki pola pikir dan pola tindak yang didasarkan pada norma-norma agama, hukum dan sosial.

Dengan visi tersebut diharapkan pada akhir Tahun 2013 dapat tercapai kondisi masyarakat yang :

Cerdas, adalah semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Kota Sukabumi pada akhir tahun 2013 sehingga dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan biaya sekolah yang terjangkau dan didukung oleh kualitas manajemen pendidikan dan kualitas tenaga pengajarnya, tumbuh dan berkembangnya minat baca di segala lapisan masyarakat.

Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi sehingga semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan

produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan kehidupan yang layak.

Sejahtera adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan beragama serta semakin dijunjungnya nilai-nilai religius dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan meningkatnya toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan perluasan lapangan kerja serta daya beli masyarakat, sehingga masyarakat Kota Sukabumi mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi tersebut diperlihatkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79.13 poin, dengan capaian Indeks Pendidikan sebesar 93,33, Indeks Kesehatan sebesar 81.12 dan Indeks Daya Beli sebesar 62,94 pada akhir tahun 2013 dengan asumsi daya beli mencapai Rp. 572.340,- per jiwa/bulan, Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 12 tahun dan Angka Harapan Hidup mencapai 73,67 tahun.

Misi Walikota Sukabumi

Untuk mewujudkan visi walikota dan wakil walikota tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Sukabumi pada periode 2008 – 2013 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama sehingga pertikaian antar agama dapat dihindari, meningkatnya kepedulian sosial masyarakat, menurunnya tindak kriminalitas, makin banyaknya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya, berkurangnya angka penangguran, terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk miskin yang disertai angka kemiskinan yang semakin dapat ditekan. Diarahkan pada :

- Peningkatan aktifitas dan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama,
- Penambahan sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan sosial budaya,
- Penurunan jumlah penyandang masalah sosial yang dibarengi dengan berkurangnya penduduk miskin,
- Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan,
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi,
- Peningkatan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan,
- Terciptanya penduduk tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk alami yang terkendali,
- Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan,
- Peningkatan pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi,
- Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal,

- Peningkatan ketertiban dan perlindungan serta kedisiplinan masyarakat,
- Peningkatan Kesadaran Berpolitik Masyarakat.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (*Good Governance and Clean Government*)

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta Berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang tidak ditindaklanjuti dan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana PAD meningkat pada setiap tahun. Diarahkan pada :

- Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas,
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang serta berorientasi pada kepentingan publik,
- Peningkatan pelayanan pemerintahan dalam rangka pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah,
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah sehingga tercipta pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,
- Peningkatan kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi,
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh sistem pengendalian yang efisien dan efektif,

3. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya.

Misi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah menjadi 12 tahun pada tahun 2013, Angka Melek Huruf mencapai 99,87%, Angka Harapan Hidup mencapai 73,67 tahun, Angka Kematian Bayi ditekan hingga mencapai 27,03 / 1.000 kelahiran hidup, pendapatan per kapita mencapai Rp. 13.520.254,- per tahun dan daya beli masyarakat mencapai Rp. 572.340,- per jiwa/bulan. Diarahkan pada :

- Peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau,
- Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri,
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
- Penyediaan sarana dan prasarana jasa kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- Peningkatan daya saing sektor-sektor ekonomi kota,
- Peningkatan daya saing dan produktifitas UMKM,
- Peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di

pasar kerja,

- Terciptanya pemanfaatan ruang yang serasi, nyaman dan efisien,
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota dan tercukupinya kebutuhan akan air baku,
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota,
- Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan masyarakat,
- Pengembangan sentra-sentra produk unggulan Kota Sukabumi dan membangun kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar,
- Pengembangan kepariwisataan Kota Sukabumi

BAB IV
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI 2008 - 2013

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2008-2013

Dalam kerangka pemikiran yang berkaitan dengan strategi pembangunan dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang transparan maka Visi Walikota dan Misi Walikota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan kebijakan dan program secara konsisten dan spesifik. Konsisten dan spesifik rumusan tersebut sangat penting untuk menjamin agar Pemerintah Kota Sukabumi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kinerja menjadi sistematis dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas.

Kebijakan dan program merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan pembangunan jangka panjang dengan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah dan tahunan, kerangka pemikiran ini dituangkan dalam rumusan tujuan, kebijakan dan program untuk setiap misi sebagai berikut.

Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya Visi Walikota yaitu : **Dengan Iman Dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi Yang Cerdas, Sehat Dan Sejahtera**, maka strategi dasar pembangunan kota Sukabumi untuk lima tahun kedepan (2008-2013), adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota masa jabatan 2008 – 2013, diambil beberapa kebijakan umum untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang meliputi :

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*),
2. Meningkatkan daya saing Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas melalui optimalisasi basis pertumbuhan ekonomi kota dan potensi kewilayahan,
3. Mewujudkan Kota Sukabumi yang aman, nyaman dan tertib, dalam rangka mendukung Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan,
4. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan,
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat Kota Sukabumi,

4.2. Strategi Pembangunan

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dihadapi pada lima tahun ke depan, disusun strategi sebagai berikut :

1. Misi - 1, Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Melaksanakan Kehidupan Sosial dan Budaya,

Salah satu dampak dari adanya proses globalisasi adalah menurunnya moral dan etika masyarakat. Globalisasi yang membawa semangat kapitalisme dan liberalisme mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif dan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dan akibat selanjutnya nilai-nilai moral, sosial dan agama semakin ditinggalkannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebersamaan seluruh pihak dan pendekatan yang komprehensif. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting adalah pendidikan, khususnya pendidikan tentang pentingnya pengalaman nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran agama di sekolah dapat ditinjau kembali untuk memberikan muatan yang lebih besar pada implementasi ajaran agama, selain tentunya untuk pemahanan hukum agama. Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh masyarakat lebih diperkuat dalam bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna menacapai kemajuan dalam pembangunan.

Upaya dalam aspek keagamaan harus didukung pula dengan penguatan hubungan antar individu dalam interaksi sosial. Berbagai komunitas sosial yang ada dimasyarakat diperkuat, sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Kota Sukabumi yang ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya sunda seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Strategi yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang religius,
- b. Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok, mengembangkan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas guna Mewujudkan Kehidupan Sosial Yang Kokoh Dengan Berlandaskan Pada Budaya Dan Kearifan Lokal,
- c. Meningkatkan Pendapatan per Kapita mencapai Rp. 13.520.254,- Daya Beli mencapai Rp. 572.340,- guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan pada akhir tahun 2013.

2. Misi – 2, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (*Good Governance and Clean Government*)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau "*Good Governance*" dalam era Otonomi daerah merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan tidak hanya didasarkan pada peran pemerintah atau negara saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta. Keterlibatan peran seluruh pemangku kepentingan tersebut dimulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Beberapa karakteristik atau unsur utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi kepatuhan pada hukum, transparansi, responsive, orientasi pada konsensus berkeadilan efektif dan efisien.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Sukabumi pada awal pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal terlihat dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya responsibilitas pemerintah terhadap kebutuhan publik dan terpolarisasinya masyarakat kedalam kelompok-kelompok. Berdasarkan kondisi tersebut diatas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah maka upaya yang ditempuh adalah membuka komunikasi yang seluas-luasnya yang berarti berbagai sarana digunakan, seluruh jajaran birokrasi lebih mudah diakses dan lebih proaktif dan responsif. Komunikasi seluas-luasnya dilaksanakan melalui proses diagnosis antara masyarakat dan pemerintah secara terbuka dan egaliter.

Dalam rangka proses komunikasi dan dialogis dibutuhkan pengurangan sakralisasi birokrasi serta kebijakan yang transparan dan akuntabel. Upaya membuka saluran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif akan mendorong masing-masing pihak untuk membuka dan mengurangi hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Tujuan lebih besar dari dibukanya komunikasi adalah tercapainya pembangunan partisipatif. Mewujudkan Kota Sukabumi yang memiliki *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) *clean government* (pemerintah yang bersih) berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum. Strategi yang ditetapkan diantaranya adalah : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah guna mewujudkan pemerintahan dengan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya pengaduan dan permasalahan yang tidak

ditindak lanjuti serta tidak adanya aparaturnya yang divonis melakukan KKN.

3. Misi – 3, Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi, Penduduk Kota Sukabumi harus mendapatkan layanan pendidikan formal sampai dengan tingkat Diploma III. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan bahwa tidak ada penduduk usia sekolah di Kota Sukabumi yang tidak bersekolah karena alasan tidak mampu membiayai.

Sebagai kota yang mengutamakan Sumber Daya Manusia, maka diperlukan lingkungan yang mendukung proses belajar. Untuk mewujudkannya maka pusat kegiatan belajar masyarakat dan bentuk pendidikan non formal lainnya akan mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Berbagai upaya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di Kota Sukabumi mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan menjadi paradigma sehat. Derajat tingkat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, meningkatnya tingkat pelayanan kesehatan, serta meningkatnya jumlah dan cakupan sarana dan prasarana kesehatan.

Selain masalah penyebaran penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang atau Napza juga menjadi salah satu perhatian serius bagi Kota Sukabumi. Selain itu Kota Sukabumi secara geografis terletak diantara pusat pertumbuhan mega urban *Jabodetabek* dan *Bandung Raya*, pada saat ini peredaran obat terlarang di Kota Sukabumi cenderung meningkat khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa. Peningkatan penyebaran obat terlarang ini salah satunya disebabkan karena masih lemahnya pengawasan peredaran obat terlarang serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang resiko penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut.

Selain permasalahan tersebut diatas masalah pembangunan kesehatan yang dihadapi di Kota Sukabumi pada saat ini adalah belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, masih terbatasnya pembiayaan kesehatan, belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya kesehatan dan potensi daerah yang dimiliki oleh Kota

Sukabumi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka program pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan investasi di Kota Sukabumi diarahkan untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan yang berkaitan dengan pelayanan investasi yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi serta memperbaiki kebijakan investasi, serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing.

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Strategi yang diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, dengan tujuan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai indikator :
 - a. RLS mencapai 12,00 Tahun,
 - b. AMH mencapai 100 %,
 - c. APK
 - SD mencapai 118.91 %
 - SMP mencapai 109.65 %
 - SMA mencapai 107.43 %
 - d. APM
 - SD mencapai 99,99 %
 - SMP mencapai 99,98 %
 - SMA mencapai 99,75%
- b. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, dengan tujuan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai indikator :
 - a. AHH mencapai 73.67 Tahun
 - b. AKB mencapai 27.03 / 1.000 Kelahiran Hidup
- c. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kota, dengan tujuan :
 - a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kota
 - b. Meningkatnya Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja Pelayanan Bidang Investasi

4.3. Kebijakan Pembangunan

Dalam melaksanakan Strategi yang telah ditetapkan diambil kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Misi - 1, Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Melaksanakan Kehidupan Sosial dan Budaya,

- a. Strategi Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang religius, Kebijakan yang diambil adalah :
 1. Meningkatkan Kesadaran Dan Implementasi Kehidupan Beragama Yang Didasari Pada Nilai-Nilai Luhur
 2. Meningkatkan Partisipasi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan
- b. Strategi meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok, mengembangkan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas guna Mewujudkan Kehidupan Sosial Yang Kokoh Dengan Berlandaskan Pada Budaya Dan Kearifan Lokal, Kebijakan yang diambil adalah :
 1. Mengembangkan aktifitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya,
 2. Membina aspek kepemudaan dan olah raga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh,
 3. Meningkatkan pemahaman dan implementasi gender dalam aspek pembangunan,
 4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada hukum dan peraturan,
 5. Pembinaan kamtibmas dan pertahanan sipil pada masyarakat,
 6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat dan menerapkannya dalam kegiatan pembangunan,
- c. Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pendapatan per Kapita masyarakat yang mencapai Rp. 13.520.254,- Daya Beli mencapai Rp. 572.340,- Kebijakan yang diambil adalah :
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada kelompok masyarakat perempuan, anak, lansia dan penduduk miskin,
 2. Meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan,
 3. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang melalui laju pertumbuhan penduduk alamiah yang terkendali,

2. Misi – 2, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (*Good Governance and Clean Government*)

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah guna mewujudkan pemerintahan dengan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, Kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur,
2. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah
4. Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
5. Menata Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM,
6. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,
7. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan,
8. Optimalisasi pengelolaan arsip daerah,
9. Menciptakan manajemen pemerintahan yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini,
10. Mewujudkan perencanaan yang aspiratif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

3. Misi – 3, Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya

- a. Strategi Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Kebijakan yang diambil adalah :
 1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya terjangkau untuk semua kalangan serta tuntasnya wajib belajar 12 tahun,
 2. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual,
 3. Optimalisasi dan perluasan pelayanan pendidikan non formal,
 4. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
- b. Strategi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, dengan Kebijakan yang diambil adalah :

Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki,

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang identifikasi dan pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat.
- c. Strategi Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kota, dengan Kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan daya tarik Investasi Kota Sukabumi melalui optimalisasi potensi daerah, regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya,
2. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM dan sektor lainnya agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya,
3. Meningkatkan kompetensi, daya saing dan perlindungan tenaga kerja,
4. Optimalisasi pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif yang diimbangi oleh aspek penegakan hukum,
5. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian Kota Sukabumi,
6. Meningkatkan kualitas perumahan sehingga memenuhi syarat rumah sehat,
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan permukiman masyarakat,
8. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perhubungan,
9. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan,
10. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan,
11. Memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka secara bertahap,
12. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian,
13. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat,
14. Meningkatkan kemitraan perdagangan,
15. Mengembangkan kepariwisataan yang berpotensi lokal.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4.4.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sukabumi. Arah pengelolaan pendapatan daerah kota Sukabumi tahun 2008 – 2013 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

4.4.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penggunaannya, belanja

daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas serta diseimbangkan dengan jumlah Pendapatan Daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah.

4.4.3. Arah Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 2% - 4% dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan.

4.4.4. Kebijakan Umum Anggaran Daerah

Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2% - 3% dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan yang masing-masing diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 2% - 3% dan 5% - 7%.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, *trend* kenaikan peranan PAD dan *trend* peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2013 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 79,71 % untuk Dana Perimbangan dan sekitar 12,25 % untuk PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 8,05 %. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya

adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Sukabumi maupun pada setiap perusahaan daerah.

Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Sukabumi. Dengan demikian maka disusun arah dan kebijakan umum Pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

- Penggalian sumber pendapatan baru dan potensi daerah yang dimungkinkan oleh Undang-Undang.
- Peningkatan pola kerja sama dan kemitraan, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan.
- Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan perhitungan-perhitungan potensi riil yang berkembang dimasyarakat dengan berbagai pendekatan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- Memberdayakan dan meningkatkan peran perusahaan daerah dengan lebih profesional.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2008 – 2013 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2013, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti :

1. Pertumbuhan ekonomi kota Sukabumi diperkirakan sebesar : 6.71% (2008), 6.76% (2009) ; 6,83% (2010) ; 6,90% (2011) ; 6,96 (2012); dan 7.03% (2013), atau secara umum diperkirakan sampai dengan tahun 2010 tumbuh rata-rata sekitar 6% - 7%;
2. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 6% -7% untuk setiap tahunnya;

3. ICOR tahunan selama periode proyeksi adalah sekitar 2,50 kali;
4. Kebutuhan investasi setiap periode proyeksi diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar Rp. 300 milyar – Rp. 400 milyar atau sekitar 15.73% dari rata-rata total proyeksi PDRB atas dasar harga konstan;
5. *Tax Ratio* (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai sekitar 0,61% untuk setiap tahunnya;
6. Untuk komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan diperkirakan tumbuh sekitar 15% - 20% setiap tahunnya;
- 1 Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan naik 5% - 7%.

Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh Belanja Langsung sekitar 54% - 60%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10%, dimana pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah Belanja Langsung rata-rata 9% - 10% dan Belanja Tidak Langsung rata-rata 9% - 10%. Kebijakan Belanja Daerah juga diselaraskan dan diseimbangkan dengan jumlah Pendapatan Daerah.

Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 3% - 9%, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9% - 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah seimbang dengan perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran tidak lebih dari 2% - 4%.

Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah :

- a. Kumulatif defisit APBD tahun 2008 – 2013 diperkirakan rata-rata sekitar 2% - 4% dari proyeksi PDRB tahun 2008 – 2013.
- b. Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan manajemen asset yang efektif dan efisien baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan

modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

Program Pembangunan 2008 – 2013

Prioritas Pembangunan

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2008 – 2013 yang menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan dan aspek penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup serta dalam upaya menjawab issue-issue strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Sukabumi. Prioritas pembangunan tersebut diantaranya adalah :

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya ,

Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat membawa semangat kapitalisme dan liberalisme mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif dan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dan akibat selanjutnya nilai-nilai moral, sosial dan agama semakin ditinggalkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebersamaan seluruh pihak dan pendekatan yang komprehensif. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Upaya dalam aspek keagamaan harus didukung pula dengan penguatan hubungan antar individu dalam interaksi sosial. Berbagai komunitas sosial yang ada dimasyarakat diperkuat, sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Kota Sukabumi yang ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya sunda seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penanganan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat,

Pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Needs*) masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dimana kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, air bersih,

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini menjadi prioritas seiring dengan semakin beratnya beban kehidupan masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi yang diharapkan diantaranya adalah menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan; terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau; terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin; terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Serta Sektor-Sektor Lainnya,

Memberikan iklim yang kondusif bagi investasi dan mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kemitraan dengan usaha menengah dan besar, sehingga aspek permodalan dan perluasan kesempatan kerja dapat ditingkatkan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Menuju *Good Governance* dan *Clean Government* ,

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui pembangunan sistem yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, baik sistem manajemen kepegawaian yang profesional, keuangan daerah dan struktur organisasi yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar, baik sekolah umum, sekolah berstandar nasional dan sekolah berstandar internasional.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional BKB-Posyandu, Posbindu, Pustu dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur Kota,

Menyeimbangkan pembangunan antara bagian utara kota dengan bagian selatan kota yang didukung oleh peningkatan aksesibilitas pergerakan orang dan barang untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan jaringan dan kualitas infrastruktur pendukungnya. Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah di Kota Sukabumi dengan didukung oleh pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Perkotaan,

Adanya issue lingkungan tentang pemanasan global memicu Kota Sukabumi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut, selain itu diharapkan semakin meningkatnya kualitas air permukaan dan air bawah tanah yang disertai dengan pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor. Meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan mengembangkan manajemen dan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Meningkatkan upaya pengelolaan persampahan perkotaan dengan menempatkan issue perlindungan dan ramah lingkungan sebagai faktor penentu kebijakan.

Indikasi Kegiatan Prioritas

Indikasi kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Perkotaan, dengan indikasi kegiatan :
 - b. Pembangunan Sumber Air Baku,
 - c. Koordinasi Pengelolaan SDA,
 - d. Pembangunan Percontohan Kelurahan Hijau,
 - e. Pembangunan dan Penataan Taman Kota,
 - f. Pengembangan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan.
2. Pengembangan Energi Alternatif dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengembangan Wilayah Percontohan Energi Alternatif.
3. Program Prioritas Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Menekan Angka kemiskinan dengan indikasi kegiatan :
 - a. Bantuan Permodalan Bagi Masyarakat Kurang Mampu,
 - b. Sanitasi Berbasis Masyarakat Yang Dipadukan Dengan Pemanfaatan Limbah MCK untuk biogas,
 - c. Perbaikan dan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh,
4. Program Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pemberian Beasiswa Bagi Pelajar Yang Berasal Dari Keluarga Kurang Mampu,
 - b. Kelas Khusus Bagi Pelajar Yang Berprestasi Belajar Di Atas Rata-Rata Yang Dapat Diakses Oleh Pelajar Yang Berasal Dari Masyarakat Kurang Mampu,

- c. Sekolah Dengan Ciri Khas Kota Sukabumi,
 - d. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Sekolah.
5. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - a. Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu,
 - b. Operasional BKB-Posyandu-Posbindu-PADU,
 - c. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Puskesmas, Pustu,
 - d. Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular dan HIV AIDS,
 - e. Optimalisasi Operasional Komite Peduli AIDS Daerah.
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Menuju *Good Governance* dan *Clean Government* dengan indikasi kegiatan :
 - a. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi,
 - b. Penataan Kelembagaan dan Penempatan Pegawai Yang Sesuai Dengan SOTK Baru,
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan,
 - d. Intensifikasi Koordinasi dan Kerjasama Regional,
 7. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur Kota dengan indikasi kegiatan :
 - a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
 - b. Penuntasan Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi,
 - c. Pembangunan Terminal Type A,
 - d. Pembangunan Jalan Tembus Otista – Pembangunan,
 - e. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agrowisata Terpadu Cikundul,
 - f. Pembangunan TPS Terpadu,
 - g. Penataan Kembali Eks Terminal Cikondang, Sub Terminal Bungbulang dan Pasar Seni,
 - h. Pasar Induk Dan Pergudangan di Wilayah Selatan Kota Sukabumi
 - i. Sarana Olah Raga Indoor dan lapangan olah raga di kecamatan-kecamatan,
 8. Program Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Serta Sektor-Sektor Lainnya, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Fasilitasi dan Penguatan Permodalan UMKM
 - b. Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan
 - c. Penataan Sentra-Sentra Produk Unggulan
 9. Program Prioritas Peningkatan Iklim Investasi, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan Sistem Pelayanan Satu Atap,
 - b. Promosi Peluang Investasi Kota Sukabumi,

BAB V

P E N U T U P

5.1. Program Transisi Tahun 2014

Program transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 – 2013 adalah Perencanaan Pembangunan Daerah daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada tahun berakhirnya masa berlaku RPJMD 2008 – 2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota masa jabatan 2008 – 2013. Program transisi ini berisi program indikatif untuk tahun 2014 yang mengacu pada RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 untuk masa perencanaan jangka menengah 2013 – 2018 yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

Program Transisi Tahun 2014 mengatur tentang program indikatif Kota Sukabumi Tahun 2014;

Tujuan Program Transisi Tahun 2014 sebagaimana dimaksud adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari Tahun 2013, dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD tahun 2014;

5.1.1. Issue Strategis

Permasalahan dan kondisi lingkungan strategis yang diperkirakan akan berpengaruh pada tahun 2014 diantaranya adalah :

1. Pemanasan Global dan Pengendalian Dampak Pencemaran,
2. Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan Hidup,
3. Ketersediaan dan Pelayanan Infrastruktur Kota,
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran,
5. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan,

5.1.2. Kebijakan Umum Tahun 2013 – 2018

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya perwujudan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, ditandai dengan terus meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintah yang meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah berpenghasilan menengah. Di samping itu indikator lainnya adalah menguatnya kinerja kelembagaan pengelola SDM, dan tetap konsisten dalam upaya penegakan hukum serta pendayagunaan SDM yang berkesinambungan.

Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas

Pada tahap ini dititikberatkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal;
2. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien; dan/atau
3. Mensinergikan antara pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pelayanan nasional.

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahap ini ditandai dengan terakreditasinya seluruh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dikelola secara profesional oleh tenaga kesehatan yang sudah mengikuti sertifikasi profesi dan berdampak pada menurunnya penderita gizi buruk, gizi kurang serta meningkatnya aksesibilitas penduduk miskin ke pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menggunakan jaminan/asuransi kesehatan masyarakat miskin dengan *contact rate* nya mencapai 1 kali setiap tahunnya.

Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain :

1. Peningkatan mutu dan pengembangan teknologi agribisnis mulai dari hulu sampai hilir dalam kerangka merespons tuntutan konsumen terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian produk;
2. Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi dan peningkatan kemampuan sumber daya industri kecil; dan/atau
3. Perluasan kawasan perdagangan di daerah yang cepat tumbuh serta penataan distribusi barang.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Pembangunan pemerintahan diarahkan pada pelembagaan aspek demokrasi yang menjunjung etika, penguatan produk hukum daerah (Perda) untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap ini dititikberatkan pada :

1. Peningkatan operasionalitas dan profesionalitas aparatur yang didukung oleh standar prosedur operasional yang jelas dan tata laksana serta kompetensi yang memadai;
2. Aspek keuangan daerah adalah dengan melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada lima tahun kedua serta diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan asset daerah, optimalisasi pengelolaan belanja daerah terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Menjaga kesinambungan fiskal daerah dan intensifikasi peluang-peluang untuk mendapatkan sumber dana di luar APBD Kota Sukabumi; dan/atau
4. Mengintensifkan kerjasama antar daerah, antara Kota Sukabumi dengan kota/kabupaten di dalam negeri maupun dengan kota-kota diluar negeri sebagai bentuk implementasi kerjasama Citynet (*government to government* dan *city to city cooperation*)

Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah pada tahap ini ditandai dengan semakin efisien dan efektifnya pemanfaatan ruang yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur kota yang semakin memadai, penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan secara bertahap telah berjalan di wilayah kota baru. Sejalan dengan itu pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013 – 2018 :

Pada dasarnya kebijakan pembangunan ditekankan pada upaya memberikan perlindungan social dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta meningkatkan akses mutu pelayanan dasar sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi ditekankan pada :

- a. Penguatan daya saing perekonomian Kota Sukabumi yang semakin kompetitif dan terpadu,
- b. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan swasta,
- c. Penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- d. Penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif,
- e. Pengembangan kemampuan inovasi, pengembangan industri kecil yang tangguh,
- f. Perluasan kawasan perdagangan di daerah cepat tumbuh, pemberdayaan produk lokal serta pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri,
- g. Pembangunan berkelanjutan,

5.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 ditetapkan dengan mempertimbangkan issue strategis dan ditindaklanjuti oleh program dan kegiatan dalam rangka kesinambungan pembangunan dan upaya meraih kondisi masyarakat Kota Sukabumi yang lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2014 terdiri dari :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kinerja perekonomian kota untuk memperluas kesempatan kerja,
 - Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia tenaga kerja,
 - Terwujudnya kemitraan strategis yang semakin kuat dan harmonis antar UMKM, Koperasi, IKM, BUMD dan lembaga perbankan,
2. Peningkatan Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur,
Meningkatnya kualitas pelayanan publik,
Meningkatnya akuntabilitas,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan,
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Perkotaan,
 - Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

5.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sukabumi. Arah pengelolaan pendapatan daerah kota Sukabumi tahun 2013 – 2018 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya melalui Optimalisasi eksetensifikasi pemungutan pajak-pajak daerah yang menjadi kewenangan kota tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

5.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada pola pengaturan pembelanjaan yang proporsional dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah dan keberpihakan pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, ramah lingkungan dan pada kesejahteraan masyarakat.

5.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan yang timbul dikarenakan jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, namun demikian jumlah kumulatif defisit anggaran tidak melebihi 2% - 4% dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain dari penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan kebutuhan pengeluaran penting lainnya.

5.3. Kebijakan Umum Anggaran Daerah

Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dengan asumsi sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tahun 2013 – 2018 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4% - 7% dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan yang masing-masing diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 9% - 10%.

Peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 79% untuk Dana Perimbangan dan sekitar 12% untuk PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 9%.

Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh Belanja Langsung sekitar 54% - 60%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2008 – 2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10%, dimana pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah Belanja Langsung rata-rata 10% dan Belanja Tidak Langsung rata-rata 10%.

Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah tahun 2014 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4% - 7%, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9% - 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah seimbang dengan perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2014 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran tidak lebih dari 2% - 4%.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kota Sukabumi, baik Pemerintah Kota, Masyarakat dan Sektor Swasta. Karena RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 ini merupakan acuan SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, maka perlu disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban melaksanakan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 sebagai bentuk implementasi

komitmen bersama dalam membangun Kota Sukabumi untuk 5 (lima) tahun ke depan,

- b. Seluruh SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013,
- c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi secara intensif dan berkala dengan SKPD dalam rangka mewujudkan kondisi yang diharapkan di akhir Tahun 2013,
- d. SKPD berkewajiban untuk menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD serta berkewajiban untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan di akhir Tahun 2013 sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian penjabaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2013 ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD serta melakukan evaluasi pelaksanaannya,
- f. Dalam rangka penyusunan LAKIP, maka perlu dilakukan pembobotan untuk masing-masing kegiatan terhadap program yang menjadi induknya,

5.3. Penutup

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 berisi tentang Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa jabatan tahun 2008 – 2013 sebagai janji dan kesepakatan dengan masyarakat untuk membangun Kota Sukabumi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2013, maka peran serta masyarakat dan sektor swasta mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013.